



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2024

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kerjasama dari semua pihak yang terkait lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 yang tertuang dalam pelaksanaan program kerja sebagai upaya pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Laporan ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kegiatan lainnya yang mendukung tugas pokok dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon melalui program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 oleh setiap bagian di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Laporan kinerja ini diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Ambon, 18 Juli 2024

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut

Ambon



Sarwono

Daftar ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	vii
Ringkasan Eksekutif	1
I. Pendahuluan	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.3. Tugas dan Fungsi	6
1.4. Sumberdaya Manusia	9
1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja	10
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	12
II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja	14
2.1 Visi	14
2.2 Misi Presiden	15
2.3 Arahana Utama Presiden	16
2.4 Kebijakan dan Strategi KKP	16
2.5 Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon	18
2.6 Penetapan Kinerja	20
2.7 Pengukuran Kinerja	31
III. Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan	33
3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama	33
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	37
3.2.1. Sasaran kegiatan I, Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat Di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	38
3.2.2. Sasaran Kegiatan II, Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	40

3.2.3. Sasaran Kegiatan III, Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	68
3.2.4. Sasaran kegiatan IV, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	74
3.3. Akuntabilitas Keuangan	99
3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran	108
3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran	109
IV. Penutup	110
4.1. Simpulan	110
4.2. Permasalahan/Kendala yang dihadapi	110
4.3. Langkah Perbaikan	110
V. Lampiran	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Ambon Th. 2024	8
Gambar 2. Capaian IKU + IKM BPBL Ambon 2024	31
Gambar 3. Produksi Planlet Rumput Laut	43
Gambar 4. Kegiatan penyerahan bantuan sarana KBRL	49
Gambar 5. Bibit rumput laut kultur jaringan	51
Gambar 6. Calon induk Ikan kakap putih (<i>Lates calcarifer</i>)	53
Gambar 7. Kegiatan penyaluran bantuan benih ikan	58
Gambar 8. Calon induk Ikan Kuwe (<i>Caranx</i> sp)	60
Gambar 9. Kegiatan Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan	63
Gambar 10. Bantuan Benih Ikan Hias Laut 2024	66
Gambar 11. Diagram Kejadian Penyakit Ikan	69
Gambar 12. Pemeriksaan Sampel Laboratorium Keskanling BPBL Ambon	71
Gambar 13. Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN	77
Gambar 14. Sertifikat Kegiatan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN ...	77
Gambar 15. Capaian IKU IKPA Triwulan Kedua	88

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2024	9
Grafik 2.	Pendidikan Pegawai (PNS dan PPPK) Lingkup BPBL Ambon 2024 .	10
Grafik 3.	Golongan Pegawai (PNS) Lingkup BPBL Ambon 2024	10
Grafik 4.	Perbandingan Capaian IKU PNBPN Satker Laut	39
Grafik 5.	Capaian IKU Produksi Bibit Rumput Laut Satker Laut	43
Grafik 6.	Capaian IKU Bantuan KBRL Satker Laut	50
Grafik 7.	Capaian IKU Bantuan Calon Induk Laut Satker Laut	53
Grafik 8.	Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut	55
Grafik 9.	Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut	59
Grafik 10.	Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Hias Laut	66
Grafik 11.	Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut	70
Grafik 12.	Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon	18
Tabel 2.	Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2024	20
Tabel 3.	Keselarasan Renstra dan PK Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon TA. 2024	27
Tabel 4.	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	33
Tabel 5.	Capaian IKU Nilai PNBPN BPBL Ambon Tahun 2024	38
Tabel 6.	Capaian IKU Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	42
Tabel 7.	Rincian Bahan Konstruksi 1 (satu) Unit Kebun Bibit Rumput Laut	45
Tabel 8.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara	46
Tabel 9.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara	46
Tabel 10.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat	47
Tabel 11.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kota Tual Provinsi Maluku	47
Tabel 12.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara	48
Tabel 13.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara	48
Tabel 14.	Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat	49
Tabel 15.	Capaian IKU Bantuan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Rumput Laut BPBL Ambon	49
Tabel 16.	Capaian IKU Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat	52

Tabel 17. Capaian IKU Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	54
Tabel 18. Rincian Bantuan Benih Ikan Laut	55
Tabel 19. Capaian IKU Produksi Calon Induk Ikan Laut yang diproduksi BPBL Ambon	58
Tabel 20. Rincian Produksi Calon Induk Unggul	59
Tabel 21. Kegiatan Diseminasi Teknologi Budidaya tahun 2024	62
Tabel 22. Capaian IKU Layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya Bidang Pembesaran Ikan	62
Tabel 23. Capaian IKU Bantuan Sarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok BPBL Ambon	64
Tabel 24. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Hias Laut BPBL Ambon	65
Tabel 25. Capaian IKU Prasarana Produksi yang direhabilitasi BPBL Ambon	67
Tabel 26. Capaian IKU Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan	69
Tabel 27. Capaian IKU Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	73
Tabel 28. Capaian IKM Indeks Profesionalitas ASN BPBL Ambon	75
Tabel 29. Capaian IKM Hasil Penilaian Konsensus ZI di BPBL Ambon	80
Tabel 30. Capaian IKM Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	82
Tabel 31. Capaian IKM Nilai Rekon Kinerja lingkup BPBL Ambon	84
Tabel 32. Capaian IKM Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	86
Tabel 33. Capaian IKM Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBL Ambon.....	87
Tabel 34. Capaian IKM Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPBL Ambon	89
Tabel 35. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa BPBL Ambon	91

Tabel 36. Capaian IKM Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPBL Ambon	92
Tabel 37. Deskripsi Tone Berita	94
Tabel 38. Capaian IKM Rasio Jumlah Pemberitaan Netral positif terhadap Total Pemberitaan Sektor Perikanan Budidaya	94
Tabel 39. Capaian IKM Pengawasan kearsipan BPBL Ambon	96
Tabel 40. Capaian IKM Indeks Pengelolaan Kepegawaian	97
Tabel 41. Capaian IKM Pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA	98
Tabel 42. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja Tahun 2024 dan 2023	99
Tabel 43. Data realisasi anggaran pada indikator kinerja utama (IKU) program prioritas	100
Tabel 44. Efisiensi Anggaran pada indikator kinerja utama (IKU) program prioritas	105

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (BPBL Ambon) sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan penerapan teknik perbenihan dan pembudidayaan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya induk/benih ikan dan lingkungan perairan disekitarnya. Lingkup wilayah kerja BPBL Ambon meliputi wilayah Maluku, Sulawesi, Papua dan Papua Barat. Cakupan wilayah kerja yang cukup luas yakni mencakup Indonesia bagian timur, secara langsung berdampak pada besarnya tanggung jawab yang diemban dengan tugas pokok dalam hal budidaya laut dimana BPBL Ambon dituntut mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di bidang perikanan budidaya laut guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan kegiatan budidaya laut di wilayah kerja melalui peningkatan kinerja dan kebijakan program yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024 ini merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis BPBL Ambon. Laporan Kinerja adalah dokumen evaluasi untuk mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBL Ambon dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Pada tahun 2024, BPBL Ambon menetapkan 4 sasaran kegiatan dan 25 indikator kinerja utama. Masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi balai. Dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2024, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp. 33.724.991.000 (Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang tertuang dalam DIPA Nomor-032.04.2.567720/2024 tanggal 24 November 2023. Realisasi Anggaran sampai dengan akhir Juni tahun 2024 sebesar Rp. 17.327.043.734 (Tujuh Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga

Puluh Empat Rupiah) atau 51,38% dari total pagu anggaran. Proses pencapaian Indikator kinerja utama pada tahun 2024 IKU utama telah dicapai dan dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah penjabaran persentase capaian IKU sampai dengan Juni tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. IKU nilai PNBP lingkup BPBL Ambon tercapai Rp. 310.217.474 atau 32,03 % dari target tahunan.
2. IKU Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat tercapai 64,79% dari target tahunan.
3. Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan tercapai 76,31% dari target tahunan
4. Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat tercapai 150% dari target tahunan
5. Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat tercapai 84,93% dari target tahunan.
6. Calon induk ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor), tercapai 1.671 ekor atau 40,86% dari target tahunan.
7. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 110% dari target tahunan.
8. Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat (%), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
9. Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat tercapai 33,33% dari target tahunan
10. Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi (Unit), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
11. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (%), tercapai 136,32% % dari target tahunan.
12. Persentase Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR) (%) tercapai 105,71 % dari target tahunan.
13. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Nilai), sebesar 79,97 di akhir semester pertama;

14. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai) perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua;
15. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (%) perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua;
16. Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua;
17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (%), tercapai 100% pada akhir triwulan kedua;
18. Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tercapai 96,61 akhir semester pertama
19. Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%), perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
22. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tercapai 100% pada akhir triwulan kedua
23. Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks) perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua
24. Indeks Pengelolaan Kepegawaian, perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua.
25. Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, perhitungan akan dilakukan pada akhir semester kedua.

Beberapa Indikator Kinerja Utama lingkup BPBL Ambon pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyusunan perencanaan dan kesesuaian pelaksanaan teknis di

lapangan sehingga proses ketercapaian kinerja 2024 dapat dilaksanakan dengan baik.

Tindak lanjut penerapan rekomendasi adalah penyusunan target perencanaan kinerja di 2024 harus disusun sebaik mungkin dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis dimulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan prioritas yang sesuai dengan visi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, telah mengamanatkan agar melakukan pembangunan berbagai bidang secara berkelanjutan. Fokus RPJMN 2020 – 2024, yaitu memantapkan pembangunan keunggulan kompetitif berbasis SDA, SDM Berkualitas, dan Kemampuan IPTEK sehingga diharapkan dapat terwujud : (i) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas; (ii) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (iii) meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan (iv) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (v) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (vi) membangun lingkaran hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (vii) memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Sesuai dengan arahan RPJMN tersebut, selama kurun waktu tahun 2020-2024, fokus kebijakan pembangunan perikanan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut : (i) teknologi produksi melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) Sosial Ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; dan (iii) Keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan dan memperhatikan daya dukung lingkungan dan (iv) berorientasi pasar, perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Arah kebijakan perikanan budidaya tersebut dengan potensi dan keunggulan karakteristik yang ada, diyakini mampu memberi kontribusi pada 9 (sembilan) agenda pembangunan nasional pemerintah (NAWACITA), diantaranya mewujudkan kemandirian ekonomi (termasuk pembudidaya ikan), serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budidaya yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Adapun strategi yang ditempuh untuk mewujudkan arah

kebijakan pembangunan perikanan budidaya tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut : (i) Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan; (ii) Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan ; dan (iii) Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya.

Dengan ditetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dengan masing-masing IKU seperti yang tercantum pada Renstra dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja antara lain :

1. sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kepada seluruh *stakeholders*;
2. sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada triwulan kedua tahun anggaran 2024 dalam upaya perbaikan kinerja atas tahun sebelumnya; dan sebagai bahan inputan dalam penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan uji terap teknik dan kerjasama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan serta bimbingan teknis perikanan budidaya laut yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

nomor : 6/PERMEN-KP/2014 yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 yang diuraikan lebih rinci dalam fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kegiatan teknis dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta laporan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
3. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi perikanan budidaya laut;
4. Pelaksanaan sertifikasi system perikanan budidaya laut;
5. Pelaksanaan kerjasama teknis budidaya laut;
6. Pengelolaan dan pelayanan system informasi dan publikasi perikanan budidaya laut;
7. Pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
8. Pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
9. Pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
10. Pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menjadi Eselon IIIa dengan struktur organisasi terdiri atas:

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, tersaji pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Ambon Th. 2024

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh 1 Kasubag Umum, kelompok Kerja dan seluruh pegawai yang berjumlah 62 orang dengan kompetensi yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan tercapainya kinerja yang akuntabel.

Adapun tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi BPBL Ambon adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

2. Kelompok Kerja

Tim Kelompok Kerja merupakan tim mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai IKU yang satker. Tim kerja terdiri dari pejabat fungsional umum dan tertentu yang menjalankan kegiatan kerekayasaan, pengujian, pendampingan, penerapan standar/sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan ikan air laut, pengendalian hama dan penyakit ikan, pengawasan benih/budidaya serta kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

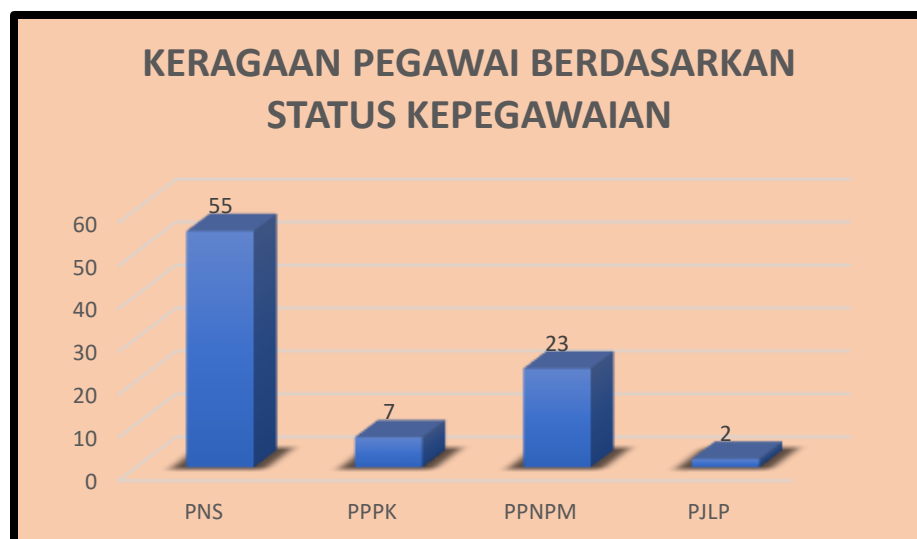
Pejabat fungsional tertentu di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon terdiri dari : Analis Akuakultur, Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, Pengelola Kesehatan Ikan, Statistisi, dan Pranata Humas.

Selain 2 bagian utama yang telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan SK Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon No. 05/Kpts/BPBLA/OT.210/I/2022 tentang Struktur Organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 2022 terdiri dari 4 divisi yakni:

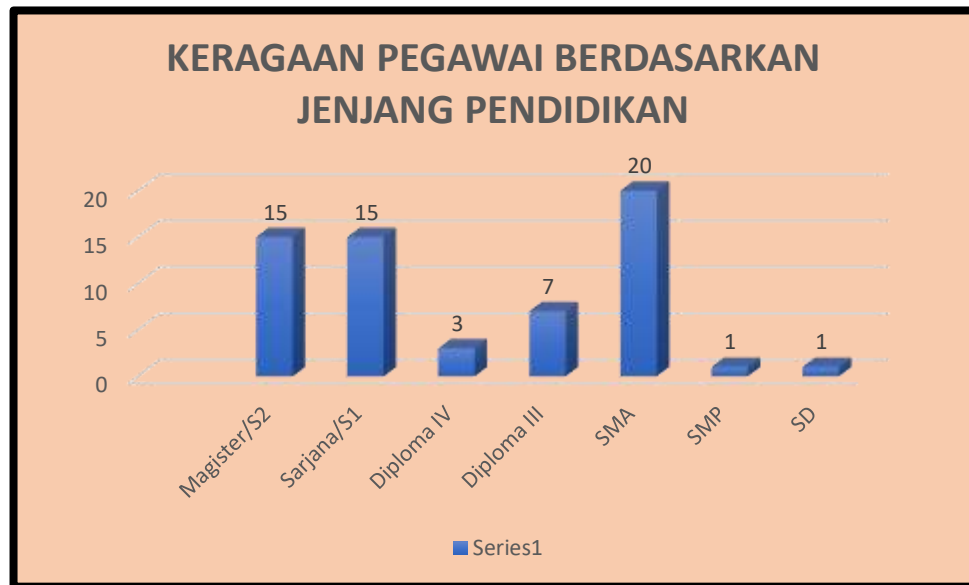
1. Divisi Produksi Benih Ikan Konsumsi
2. Divisi Produksi Calon Induk dan Rumpun Laut
3. Divisi Produksi Benih Ikan Hias Laut
4. Divisi Pengelolaan Laboratorium

1.4. Sumberdaya Manusia

Jumlah Pegawai BPBL Ambon pada tahun 2024 terdiri dari 62 ASN (PNS dan PPPK) serta tenaga kontrak yang diuraikan sebagai berikut :



Grafik 1. Komposisi Pegawai Lingkup BPBL Ambon 2024



Grafik 2. Pendidikan Pegawai (PNS dan PPPK) Lingkup BPBL Ambon 2024



Grafik 3. Golongan Pegawai (PNS) Lingkup BPBL Ambon 2024

1.5. Isu Strategis Pengembangan Budidaya Laut di Wilayah Kerja

Pengembangan budidaya laut atau dikenal dengan Marikultur terus dikembangkan. Didukung dengan potensi yang cukup besar, marikultur juga dinilai akan dapat berkontribusi banyak untuk mendorong Indonesia menjadi Poros

Maritim Dunia. Secara umum data produksi perikanan budidaya pada 2024 ditargetkan 24,85 juta ton, dimana produksi ikan dan udang sebesar 12,5 juta ton dan rumput laut 12,33 juta ton, dan ikan hias 1,64 Miliar ekor. Pengembangan kegiatan marikultur di wilayah kerja juga terus dilakukan guna mendukung peningkatan nilai produksi nasional khususnya produksi komoditas unggulan laut yang dikembangkan sampai saat ini.

Maluku menjadi salah satu provinsi kepulauan dengan potensi laut yang cukup besar, data menunjukkan potensi laut Maluku dapat mencapai 3,9 Juta ton dengan estimasi nilai perolehan sekitar Rp. 117 Triliun. Dengan kekayaan laut yang melimpah, sektor perikanan laut berpeluang besar dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam hal pengembangan budidaya laut di Maluku memiliki beberapa komoditas unggulan. Komoditas unggulan yang dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis penting antara lain beberapa jenis ikan kerapu, ikan kakap putih, dan ikan bubara atau Ikan Kuwe. Selain ikan konsumsi, ikan hias juga menjadi sektor andalan pengembangan budidaya. Ikan clownfish atau ikan badut atau banyak dikenal ikan nemo telah menjadi salah satu primadona komoditas ikan hias laut yang dibudidayakan. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon saat ini telah mampu mengembangkan teknologi budidaya ikan hias clownfish dengan melakukan hybridisasi induk sehingga diperoleh varian yang beraneka ragam corak dan warna, tercatat lebih dari 50 varian clownfish yang telah dihasilkan dan memiliki nilai jual tinggi dipasaran.

Selain itu Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya juga tengah fokus dalam mengembangkan komoditas unggulan rumput laut. Budidaya rumput laut menggunakan teknik kultur jaringan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan produksi rumput laut di Indonesia. Teknik ini telah diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan tujuan untuk menggenjot produksi rumput laut dan memperbaiki kualitas bibit rumput laut yang ada di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan produksi rumput laut, KKP juga telah membangun kawasan-kawasan sentra budidaya rumput laut di beberapa daerah seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur. Kawasan-kawasan ini sepenuhnya menggunakan bibit rumput laut hasil dari kultur jaringan.

Bibit rumput laut hasil kultur jaringan juga telah disalurkan kepada kelompok pembudidaya dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil produksi rumput laut secara keseluruhan. Dengan penerapan teknik kultur jaringan, diharapkan produksi rumput laut di Indonesia dapat terus meningkat dan menjadikan Indonesia sebagai produsen rumput laut nomor satu di dunia.

Beberapa isu dan permasalahan dalam pengembangan budidaya laut di wilayah timur Indonesia antara lain:

1. Penyediaan, distribusi induk dan benih berkualitas masih terbatas;
2. Mahalnya biaya pakan dalam budidaya;
3. Ancaman infeksi penyakit;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana perikanan budidaya sehingga berdampak rendahnya nilai produksi
5. Implementasi konsep biosecurity yang belum memadai sehingga intensitas infeksi penyakit pada ikan budidaya masih terus terjadi;
6. Masih rendahnya kualitas SDM pembudidaya di wilayah kerja
7. Masih rendahnya akses pasar yang menunjang pemasaran produk budidaya, dan
8. Akses permodalan bagi pembudidaya masih rendah

1.6. Sistematika Penyajian Laporan kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini disajikan ringkasan mengenai tujuan, sasaran, capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta antisipasi untuk menanggulangi permasalahan yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagai Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budidaya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan Laporan kinerja.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2020-2024. Rencana kinerja tahun 2024 dan indikator keberhasilan pencapaian penetapan kinerja berupa target program prioritas.

Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan, pada bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK), evaluasi dan analisis capaian kinerja termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan pencapaian target serta hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan di tahun sebelumnya. Serta akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.

Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan, permasalahan dan kendala serta upaya tindak lanjut untuk perbaikan tahun mendatang.

Lampiran, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV.

BAB II**PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Arahan utama Presiden yang kemudian disinkronkan dengan 7 agenda pembangunan RPJMN tahun 2022-2024, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMN 2020-2024, antara lain:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

2.1. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Untuk visi pembangunan nasional 2020-2024 menggunakan Visi Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Visi ini diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju sesuai pada cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan UUD 1945. Sedangkan visi KKP 2020 – 2024 adalah “Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020 – 2024 yang sejalan dengan visi presiden, wakil presiden dan KKP adalah “Terwujudnya masyarakat

perikanan budidaya yang sejahtera dan sumberdaya perikanan budidaya yang berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

2.2. Misi Presiden

Visi di atas dapat diwujudkan dengan pelaksanaan Misi Presiden dalam Nawacita II, antara lain:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia, melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon bertanggung jawab untuk membantu dalam penyelenggaraan pembangunan perikanan budidaya laut di lingkup wilayah kerjanya adapun visi dan misi yang ingin diwujudkan oleh BPBL Ambon sejalan dengan visi dan misi Ditjen Perikanan Budidaya yang mengacu pada visi misi presiden dan wakil presiden 2020 – 2024. Penerapan dan pelaksanaan visi misi dilakukan secara bertanggungjawab didasari sikap gotong royong, yang saling mendukung memberi manfaat dan memberikan nilai tambah dari sisi ekonomi bagi kepentingan stakeholder perikanan budidaya.

2.3. Arahan Utama Presiden

Misi Presiden di atas diimplementasikan melalui 5 Arahan Utama Presiden yang disampaikan pada Pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019, antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia, Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai IPTEK, mengundang talenta global untuk bekerjasama, mengembangkan *endowment fund* untuk manajemen SDM, serta optimalisasi kerjasama dengan industry
2. Pembangunan Infrastruktur, Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi, Kendala regulasi disederhanakan, dipotong dan dipangkas dengan pendekatan *omnibus law*, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang dan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi, Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.4. Kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Isu strategis dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan dalam lima tahun ke depan, diantaranya adalah (1) Pemberantasan perikanan ilegal, tanpa pelaporan, dan tak diatur (*IUU fishing*), (2) Keberlanjutan (*sustainability*) Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, (3) Peningkatan kesejahteraan (*prosperity*) masyarakat, (4) Meningkatkan daya saing industri perikanan, (5) Pengembangan SDM dan IPTEK Kelautan dan Perikanan, (6) Pembangunan Sumber Daya Kelautan (KKP 2019).

Ada 2 arahan Presiden untuk pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu: memperbaiki hubungan dengan *stakeholders* dan perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat lagi (KKP 2019).

Kebijakan pokok pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang dapat menyerap lapangan pekerjaan dan meningkatkan devisa negara, yaitu melalui delapan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM yang unggul
2. Pemberdayaan dan perlindungan usaha
3. Pengelolaan SDKP yang berkelanjutan
4. Peningkatan pengawasan SDKP
5. Industrialisasi kelautan dan perikanan
6. Peningkatan usaha dan investasi
7. Penguatan kebijakan dan regulasi berbasis data, informasi, pengetahuan yang faktual dan komunikasi dengan *stakeholders*
8. Reformasi birokrasi (KKP 2019).

Untuk melaksanakan kebijakan diatas maka strategi yang berkaitan dengan perikanan budidaya adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dan perlindungan usaha
2. Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan
 - Pengelolaan kawasan perikanan budidaya berkelanjutan
 - Optimalisasi produksi perikanan budidaya
 - Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya
3. Peningkatan usaha dan investasi KP
4. Penguatan kebijakan regulasi berbasis data dan informasi
5. Reformasi Birokrasi

Rumusan rencana strategis ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPBL Ambon. Penetapan tujuan adalah hal yang penting sebagai dasar penentuan arah strategis dan perubahan serta perbaikan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang, yaitu mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan BPBL Ambon adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan budidaya secara berkelanjutan, khususnya di wilayah kerja BPBL Ambon, mencakup kegiatan produksi calon induk, benih dan rumput laut kultur jaringan unggul.
2. Tersedianya paket teknologi budidaya laut yang mampu diterapkan oleh masyarakat pembudidaya;
3. Terselenggaranya kegiatan pengendalian hama dan penyakit ikan dalam menunjang pengembangan kawasan budidaya laut yang menerapkan system usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

2.5. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

Mengacu pada sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya 2020 – 2024 sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan ditetapkan melalui tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang terbagi menjadi empat perspektif dalam bentuk peta sasaran strategis BPBL Ambon.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan IKU BPBL Ambon

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
• Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	• Nilai PNBP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Rp)
• Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	• Persentase bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat (%). • Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen) • Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen) • Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen) • Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)

	• Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen) • Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen) • Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen) • Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)
• Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	• Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen) • Persentase Pengujian Sampel Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)
• Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	• Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks) • Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai) • Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen) • Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) • Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen) • Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%) • Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%) • Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%) • Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)

	• Ratio pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%) • Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks) • Indeks Pengelolaan Kepegawaian • Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)
--	---

2.5.1. Dukungan Anggaran

Dalam mendukung terlaksananya perencanaan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 33.724.991.000 (Tiga Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah). Berikut adalah komposisi penganggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2024:

Tabel 2. Komposisi Anggaran BPBL Ambon 2024

NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	6.529.664.000
2.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	10.280.000.000
3.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.825.853.000
4.	Dukungan Internal lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	15.089.474.000
Total Anggaran BPBL Ambon Tahun 2024		33.724.991.000

2.6. Penetapan Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pasca automatic adjustment tahun 2024, adalah sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL djperpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Sarwono**
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut
Ambon


Sarwono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDI DAYA LAUT AMBON**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	1. Nilai PNBP Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Rupiah)	958.400.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3. Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		5. Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		6. Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	4090
		7. Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	100
		8. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	75
		9. Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		10. Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	1
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	11. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	100
		12. Persentase Pengujian Sampel Antimikrobia Resistance (AMR) (Persen)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	13.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	85
		14.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		15.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen)	100
		16.	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	82
		17.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)	80
		18.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	86
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		22.	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	86
		23.	Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	75

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	24. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
	25. Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon


Sarwono

DATA ANGGARAN :

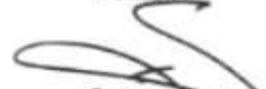
NO.	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	6.529.664.000
2.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	11.000.000.000
3.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan ikan	1.825.853.000
4.	Dukungan Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	15.089.474.000
Total Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon Tahun 2024		34.444.991.000

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


 Tb. Haeru Rahayu
ar

Pihak Pertama
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon


 Sarwono

Tabel 3. Keselarasan Renstra dan PK Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon TA. 2024

No.	Sasaran kegiatan 2023	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja (IKU)	Renstra	Realisasi 2023	Target 2024	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)	958.400.000	1.057.818.530	968.400.000	
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	40.000	0	75	
			Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	20	100	75	
			Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	-	150	75	
			Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)		118,30	75	
			Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	2200	3470	4090	
			Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	-	100	100	

			Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	10	100	75	
			Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	-	106,67	75	
			Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	-	1	1	
4.	Meningkatnya kualitas pengendalian kawasan dan kesehatan Ikan	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	1950	210,32	100	
			Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	-	152,94	100	
5.	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di	Indeks Profesionalitas ASN di Balai	72	91,34	85	

	lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)				
			Hasil Penilaian Konsensus ZI di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	76	79,78	76	
			Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100	100	100	
			Nilai Rekon SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	85	72,95	82	
			Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	60	100	80	
			Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	88	93,30	93,76	
			Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	85	87,34	86	
			Tingkat Kepatuhan Pengadaan	-	82,23	80	

			Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)				
			Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	-	77,90	80	
			Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	-	100	86	
			Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks)	-	85,03	75	
			Indeks Pengelolaan Kepegawaian	-	4	4	
			Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	-	84,21	80	

2.7. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, BPBL Ambon menerapkan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC). Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh tim *Strategic Management Office* (Tim Pengelola Kinerja BPBL Ambon) sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat;
2. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.
3. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.



Gambar 2. Capaian IKU + IKM BPBL Ambon 2024

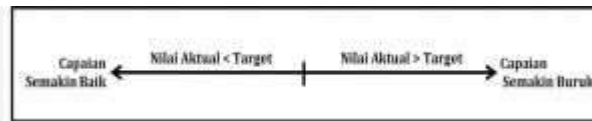
Polarisasi data menunjukkan ekspektasi (harapan) arah nilai aktual/realisasi dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target.

1. **Maximize:** Semakin tinggi nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.



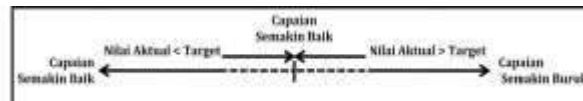
Contoh polarisasi data *maximize*.

2. **Minimize:** Semakin rendah nilai aktual/realisasi IKU terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya.



Contoh polarisasi data *minimize*.

3. **Stabilize:** Capaian kinerja dianggap semakin baik apabila nilai aktual/realisasi IKU mendekati target dalam suatu rentang tertentu.



Contoh polarisasi data *stabilize*.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran capaian IKU, bab ini menguraikan tentang indikator kinerja kegiatan, penjelasan tentang capaiannya, kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya termasuk langkah antisipasi yang dilakukan pada tahun berjalan.

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Nilai PNB BPBL Ambon (Rp)	940.200.000	377.444.941,00	310.217.474,00	Capaian IKU ini mencapai 82,19% pada triwulan kedua
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	60,00%	84,93%	Capain IKU ini mencapai 120% pada semester ini
		Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	50%	76,31%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada semester ini
		Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut	75%	60%	64,79%	Capaian IKU ini mencapai

	yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)				107,98% pada triwulan kedua
	Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	50%	150%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada semester I
	Calon induk ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor)	4.090 ekor	1.350 ekor	1,671 ekor	Capaian IKU ini mencapai 120% pada triwulan kedua
	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100% 4 Lokasi	100%	110%	Capaian IKU ini tercapai 110% pada tahun ini
	Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan

		Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	30%	33,33%	Capaian IKU ini tercapai 111.10% pada semester I
		Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Unit)	1 unit	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
3.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang kawasan dan kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	50%	136,32%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada triwulan kedua
		Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	50%	105,71%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada triwulan kedua
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan	85	80	79,97	Capaian IKU ini tercapai 99,96%

Budidaya Laut Ambon	Budidaya Laut Ambon (Nilai)				pada semester I
	Hasil Penilaian Konsensus ZI di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	76	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
	Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
	Nilai Rekon SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	93	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	80%	80%	100%	Capaian IKU ini mencapai 120% pada triwulan kedua
	Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	93,76	83	96,61	Capaian IKU ini tercapai 116,40% di semester I
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	86%	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan	80%	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan

		Budidaya Laut Ambon (%)				
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	77,5	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	86	86	100	Capaian IKU ini mencapai 116,28% pada triwulan kedua
		Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	75	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan
		Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	80	-	-	Capaian IKU ini dihitung secara tahunan

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Bagian berikut menguraikan tentang evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan dan analisis capaian kinerja dari sasaran kegiatan.

SASARAN KEGIATAN I : EKONOMI SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA MENINGKAT DI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

IKU 1 : Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)

PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan. Kelompok penerimaan negara bukan pajak meliputi:

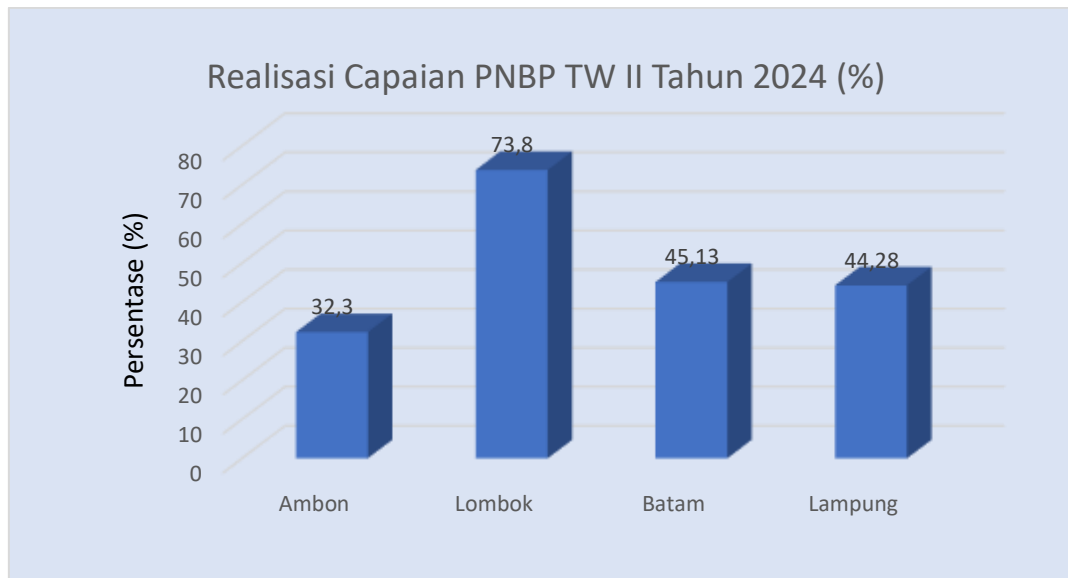
- Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
- Penerimaan dari pemanfaatan sumberdaya alam
- Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Tabel 5. Capaian IKU “Nilai PNBP BPBL Ambon Tahun 2024”.

Sasaran Kegiatan : Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023(%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
377.444.941	310.217.474	82,19	513.290.841	60,43	968.400.000	32,03	22,89

Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPBL Ambon Tahun 2024 adalah sebesar Rp 968.400.000. dan terealisasi di triwulan kedua ini sebesar Rp. 310.217.474 atau sebesar 32,03% terhadap target tahun 2024. Capaian PNBP tersebut diperoleh dari penjualan hasil perikanan, pendapatan jasa lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Fungsional dan Umum sebesar Rp. 297.929.240; dan
2. Pendapatan Non Anggaran sebesar Rp. 12.288.234.



Grafik 4. Perbandingan Capaian IKU PNBW Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian PNBW pada 4 (Empat) satker laut yakni Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada triwulan kedua tahun 2024 bervariasi, hal ini tentunya disebabkan perbedaan target yang diterima yang ditetapkan dalam PK Balai, selain itu perbedaan jenis komoditas yang dikembangkan setiap balai memiliki karakteristik yang berbeda, selera pasar dan konsumen yang berbeda juga akan berpengaruh pada aspek pemasaran atau tinggi rendahnya penjualan hasil komoditas setiap Balai Perikanan Budidaya Laut.

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian PNBW pada 4 (Empat) satker laut yakni Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada triwulan pertama

Penerimaan PNBW BPBL Ambon pada tahun 2024 mencapai 32,03% dari target yang telah ditetapkan, hal ini didukung dengan nilai penjualan komoditas budidaya dan kegiatan pendukung lainnya. Tidak tercapainya target triwulan kedua ini dikarenakan proses penjualan komoditas dilakukan secara bertahap dikarenakan terbatasnya permintaan pasar. Dan rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan jalan meningkatkan koordinasi dan promosi kepada stekholder ketersediaan komoditas untuk meningkatkan nilai PNBW balai di waktu kedepan.

Penerimaan PNBП Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon mengalami kenaikan secara bertahap jika dibandingkan penerimaan PNBП pada periode 2017. Penerimaan PNBП pada 2017 sebesar Rp. 766.519.304,- atau sebesar 120%. Hal itu menunjukkan bahwa kegiatan budidaya yang dilaksanakan semakin baik dari segi perencanaan dan pencapaian targetnya.

Rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan berdasarkan rekomendasi pada LKJ periode sebelumnya adalah pelaksanaan pengawasan secara berkala telah dilakukan oleh pimpinan dan PPK terhadap divisi produksi terkait target dan strategi pencapaian PNBП pada saat rapat koordinasi bulanan yang dilakukan penentuan target perolehan PNBП setiap divisi produksi dan pelaporan perolehan PNBП pada Bendahara Penerimaan. Salah satu langkah pengendalian resiko penurunan hasil penjualan komoditas budidaya adalah dengan melakukan promosi langsung pada penjual maupun konsumen dan media sosial seperti WhatsApp terkait komoditas budidaya yang siap jual, diharapkan dengan cara seperti ini konsumen dapat dijangkau secara lebih luas dan melakukan perencanaan produksi pada tahun 2024 secara cermat sehingga hasil produksi budidaya dapat terserap oleh pasar dan meningkatkan perolehan PNBП pada tahun berjalan.

SASARAN KEGIATAN II : MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

IKU 2 : Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)

Pada tahun 2024 secara nasional produksi rumput laut nasional ditargetkan sebesar 10,58 juta ton. Dalam mendukung nilai produksi tersebut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berusaha mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki terutama dalam proses penyediaan bibit kultur jaringan. Saat ini Laboratorium kultur jaringan rumput laut ditargetkan mampu menghasilkan 5000 planlet dimana akhir dari proses ini menghasilkan 1500 Kg bibit rumput laut yang siap didistribusikan ke sentra sentra budidaya rumput laut di wilayah kerja.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai bulan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp. 247.976.000,- dari pagu anggaran senilai Rp. 269.800.000 atau sebesar 91,91%.

Rumput laut Kottoni adalah salah satu komoditas unggulan dibidang perikanan dan kelautan Indonesia karena jenis rumput laut ini menghasilkan karagenan yang bernilai ekonomis tinggi. Karagenan merupakan senyawa hidrokoloid dari polisakarida rantai panjang yang diperoleh dari hasil ekstraksi rumput laut dengan menggunakan air panas atau larutan alkali pada temperature tinggi. Rumput laut penghasil karagenan disebut rumput laut karaginoFit, yang terdiri dari jenis *Kappaphycus* sp, *Euchema* sp, *Chondrus* sp, *Hypnea* sp dan *Gigartina* sp. Dalam industry dan perdagangan, karagenan memberikan manfaat antara lain dalam industry farmasi, makanan, dan kosmetik sebagai stabilizer, bahan pengental (thickener), pembentuk gel (gelling agent) dan pengemulsi, (Parenrengi et.al. 2011).

Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan. Pada saat ini pengadaan bibit rumput laut masih mengalami banyak kendala diantaranya iklim laut yang tidak bisa dikendalikan. Pada musim tertentu kondisi perairan tidak cocok untuk pertumbuhan rumput laut sehingga semuanya mati atau tidak tumbuh secara optimal, sehingga pada musim tanam berikutnya menyebabkan ketersediaan bibit sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Hal ini menyebabkan penyediaan bibit secara berkesinambungan untuk peningkatan luas area budidaya belum dapat terpenuhi.

Penyediaan bibit unggul rumput laut telah dilakukan dengan cara seleksi rumpun yang memiliki laju pertumbuhan harian tinggi pada beberapa generasi penanaman, (Masak et al.2011). Bibit seleksi kemudian diperbanyak dengan metode stek kemudian disebar ke pembudidaya rumput laut. Produktifitas penyediaan bibit unggul dengan metode stek ini belum dapat memenuhi kebutuhan pembudidaya rumput laut yang diperkirakan mencapai 1-2 juta ton per tahun.

Kultur jaringan merupakan Teknik perbanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman seperti daun, mata tunas serta menumbuhkan bagian bagian tersebut dalam media buatan secara aseptik dalam wadah tertutup sehingga

bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap.

Bibit yang dihasilkan dari kultur jaringan mempunyai beberapa keunggulan antara lain :

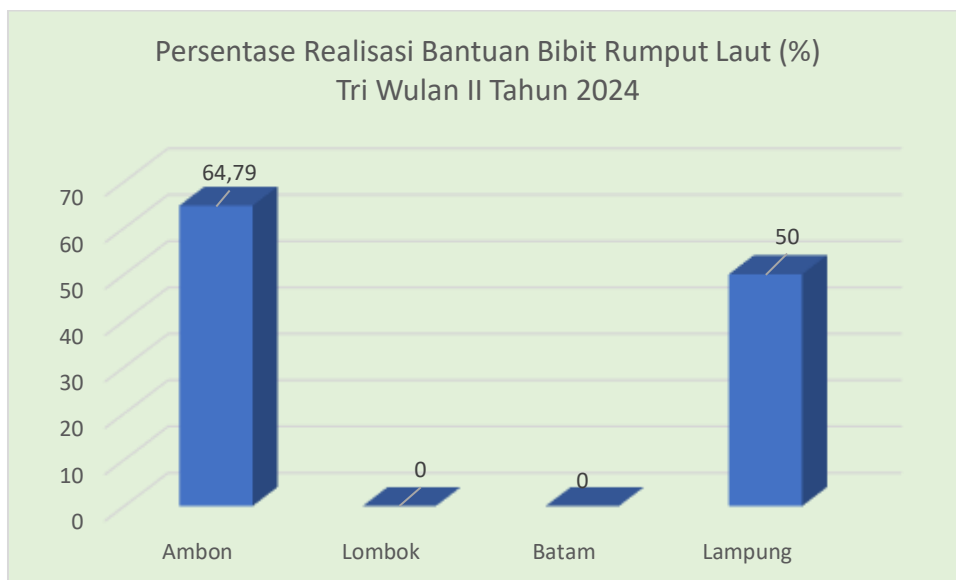
- Memiliki sifat identic dengan induknya
- Tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas
- Mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar
- Kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin
- Pada rumput laut, produksi bibit dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa dipengaruhi musim.
- Teknik embryogenesis somatic pada rumput laut adalah Teknik mengubah sel somatic dari talus menjadi sel embrio bipolar atau dalam rumput laut disebut sel carpospore. Teknik ini dilakukan dengan menginduksi tumbuhnya kalus dari potongan talus, kalus adalah sekelompok sel yang tumbuh tidak berdiferensiasi, sel sel kalus yang terbentuk diregenerasikan menjadi kalus embriogenik yang selanjutnya sel embrio somatic ini diregenerasikan menjadi mikropropagul kemudian menjadi planlet siap diaklimatisasi.

Tabel 6. Capaian IKU “ Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)”

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
60	64,79	107,98	-	-	75	86,39	-



Gambar 3 . Produksi Planlet Rumput Laut



Grafik 5. Capaian IKU Produksi Bibit Rumput Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Produksi planlet rumput laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada tahun 2024 bervariasi. Data tersebut menunjukkan setiap satker dalam tahapan produksi planlet rumput laut berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan tata kelola yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu lokasi perairan memiliki karakteristik tersendiri

dalam menunjang pertumbuhan rumput laut seperti tingkat pertumbuhan, respon kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi planlet rumput laut antara lain melalui peningkatan jumlah sarana kultur sehingga kultur eksplan/kalus baru dapat ditingkatkan sehingga produksi planlet skala laboratorium akan meningkat. Selain itu adalah monitoring kondisi parameter perairan seperti kandungan fosfat dan unsur mikro lainnya harus dalam kondisi optimal.

Rencana aksi untuk periode mendatang adalah meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan produksi sehingga produksi dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi planlet rumput laut berkualitas, dan siap diaklimatisasi dan dibiakkan di kebun bibit.

IKU ini merupakan IKU Baru sehingga pada tahun 2017 belum dapat diperbandingkan nilai produksinya.

IKU 3 : Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)

Program bantuan sarana dan prasarana kebun bibit rumput laut kultur jaringan menjadi salah satu program prioritas Ditjen Perikanan Budidaya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Program ini adalah IKU Ditjen Perikanan Budidaya yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan budidaya khususnya produksi rumput laut. Target atas IKU ini adalah 38 paket bantuan kebun bibit rumput laut.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai bulan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.313.062.816,- dari pagu anggaran senilai Rp. 2.090.000.000 atau sebesar 62,83%.

Perkembangan usaha budidaya rumput laut harus diimbangi dengan adanya ketersediaan bibit yang cukup dan berkualitas baik dan hal ini menjadi permasalahan dalam pengembangan budidaya rumput laut. Peningkatan produksi rumput laut memerlukan ketersediaan bibit secara berkesinambungan, baik secara kualitas maupun kuantitas serta sarana budidaya rumput laut yang memadai.

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya merupakan suatu komitmen yang menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.

Jenis dan jumlah bantuan yang diberikan berupa unit kebun bibit rumput laut kultur jaringan lengkap dengan bibit, tali dan pelampung. Adapun rincian bahan untuk 1 unit konstruksi kebun bibit rumput laut minimal seperti tertera pada Tabel berikut.

Tabel 7. Rincian Bahan Konstruksi 1 (satu) Unit Kebun Bibit Rumput Laut

		SPESIFIKASI
A.	Sarana Utama	
	1.	Bibit Rumput laut harus memenuhi kualifikasi sebagai bibit kultur jaringan dengan spesifikasi sebagai berikut: - Strain: Kappaphycus alvarezii/Euchema cottoni - Bibit hasil perbanyakan kultur jaringan yang dihasilkan oleh UPT DJPB atau kelompok pembibit rumput laut binaan UPT DJPB (Pada saat penyerahan barang dilengkapi dengan surat keterangan asal “ASLI” yang diterbitkan oleh UPT DJPB. - Bibit starter Euchema cottoni (sakul/maumere/tambalang) dari kelompok pembibit RL - Kesegaran: Thalus tidak berlendir dan patah - Thalus bercabang banyak - Warna: Hijau/coklat/jingga - Bersih: tidak ditemeli lumut dan organisme lainnya
B.	Peralatan	
	1.	Tali Utama (minimal PE 12 mm)
	2.	Tali Jangkar (minimal PE 12 mm)
	3.	Tali Ris (PE 4-5 mm)
	4.	Tali Pengikat Pelampung (tali rafia atau minimal tali PE 3 mm)
	5.	Tali Pengikat Bibit (Tali Rafia/Tali Nylon/Tali PE 1 mm)
	6.	Pemberat / Jangkar (Berat min 50 kg atau kayu atau bambu yang ditancap)

		Untuk metode lepas dasar patok kayu (patok kayu atau bambu berdiameter minimal 5 cm)
	7.	Pelampung Utama (Styrofoam volume min 125 cm ³ atau bola berbahan PE dengan diameter min 30 cm)
	8.	Pelampung jalur (Botol HDPE 1 L atau bola diameter minimal 10 cm)
	9.	Pelampung penunjang berupa Styrofoam atau drum plastic volume min 60 cm ³ atau bola berbahan PE dengan diameter min 20 cm.

Penerima Bantuan Kebun Bibit Rumpun Laut pada tahun 2024, yang telah melalui tahap identifikasi dan verifikasi dan telah menerima bantuan tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Citra Mandiri	Kepulauan Sula	Maluku Utara	BAST B.789/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Juni 2024
2.	Mina mandiri	Kepulauan Sula	Maluku Utara	BAST B.789.1/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Juni 2024
3.	Pasgatel	Kepulauan Sula	Maluku Utara	BAST B.794/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Juni 2024
4.	Santosa	Kepulauan Sula	Maluku Utara	BAST B.794.1/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Juni 2024
5.	Pulau Kucing	Kepulauan Sula	Maluku Utara	BAST B.795/BPBLA/PL.140/II/2024 Tanggal 28 Juni 2024

Tabel 9. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Pulau Morotai Propinsi Maluku Utara

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Bawal	Pulau Morotai	Maluku Utara	BAST B.972/BPBLA/PB.140/V/2024 Tanggal 4 Mei 2024
2.	Tike Laha	Pulau Morotai	Maluku Utara	BAST B.973/BPBLA/PB.140/V/2024 Tanggal 4 Mei 2024

3.	Kakap	Pulau Morotai	Maluku Utara	BAST B.973.1/BPBLA/PB.140/V /2024 Tanggal 4 Mei 2024
4.	Pomakirio	Pulau Morotai	Maluku Utara	BAST B.973.2/BPBLA/PB.140/V /2024 Tanggal 4 Mei 2024
5.	Tonidora	Pulau Morotai	Maluku Utara	BAST B.973.3/BPBLA/PB.140/V /2024 Tanggal 4 Mei 2024

Tabel 10. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Arfak Bay II	Kaimana	Papua Barat	BAST B.1346/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024
2.	Somu I	Kaimana	Papua Barat	BAST B.1347/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024
3.	Arfak Culture	Kaimana	Papua Barat	BAST B.1348/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024
4.	Somu III	Kaimana	Papua Barat	BAST B.1349/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024
5.	Somu IV	Kaimana	Papua Barat	BAST B.1350/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024

Tabel 11. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kota Tual Provinsi Maluku

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten /Kota	Provinsi	
1.	Said Makmur	Tual	Maluku	BAST B. 1120/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 1 Juni 2024
2.	Talenta	Tual	Maluku	BAST B. 1121/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 1 Juni 2024
3.	Harmoko Jaya	Tual	Maluku	BAST B. 1122/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 1 Juni 2024
4.	Tunas Harapan	Tual	Maluku	BAST

				B. 1123/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 1 Juni 2024
5.	Jaya Bahari	Tual	Maluku	BAST B. 1124/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 1 Juni 2024

Tabel 12. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Bina Bahari	Halmahera Selatan	Maluku Utara	BAST B.1356/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024
2.	Jaya Bakti	Halmahera Selatan	Maluku Utara	BAST B.1357/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024
3.	Sinar Mas	Halmahera Selatan	Maluku Utara	BAST B.1358/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024
4.	Pasir Panjang Tanjung	Halmahera Selatan	Maluku Utara	BAST B.1359/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024
5.	Mano Jaya III	Halmahera Selatan	Maluku Utara	BAST B.1360/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024

Tabel 13. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Sejahtera	Halmahera Timur	Maluku Utara	BAST B.1366/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024
2.	Sarimalaha	Halmahera Timur	Maluku Utara	BAST B.1367/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024
3.	Sehati	Halmahera Timur	Maluku Utara	BAST B.1368/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024
4.	Makro Alga Fayaul	Halmahera Timur	Maluku Utara	BAST B.1389/BPBLA/PB.140/VI/2024 Tanggal 29 Juni 2024

Tabel 14. Data Kelompok Pembudidaya Calon Penerima KBRL di Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Nama Kelompok	Alamat		Keterangan
		Kabupaten/Kota	Provinsi	
1.	Bawak Waru	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	Terverifikasi
2.	Laut Biru	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat	Terverifikasi

Tabel 15. Capaian IKU “Bantuan Sarana dan Prasarana Kebun Bibit Rumput Laut BPBL Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
50	76,31	120	13,04	585,2	75	101,75	-



Gambar 4. Kegiatan penyerahan bantuan sarana KBRL



Grafik 6. Capaian IKU Bantuan KBRL Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan kebun bibit rumput laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung masih 0%, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (76,31%), Lombok (78,57%) dan Batam (50%) pada tahun 2024, perhitungan pencapaian IKU ini dihitung secara semester, sesuai target yang tercantum dalam perjanjian kinerja. Adanya perbedaan tata kelola dan perencanaan (kegiatan lelang) yang didukung dengan lengkap atau tidaknya data administrasi usulan kelompok calon penerima bantuan KBRL dari setiap kabupaten kota yang menjadi sentra pengembangan rumput laut, menyebabkan proses ketercapaian IKU ini setiap satker laut akan berbeda.

Pada tahun 2024 secara nasional produksi rumput laut nasional ditargetkan sebesar 10,58 juta ton. Dalam mendukung nilai produksi tersebut Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berusaha mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki terutama dalam proses penyediaan bibit kultur jaringan. Saat ini Laboratorium kultur jaringan rumput laut ditargetkan mampu menghasilkan 5000 planlet dimana akhir dari proses ini menghasilkan 1500 Kg bibit rumput laut yang siap didistribusikan ke sentra sentra budidaya rumput laut di wilayah kerja.



Gambar 5. Bibit rumput laut kultur jaringan

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi rumput laut antara lain melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang dikembangkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang memiliki beberapa keunggulan seperti memiliki sifat yang sama seperti indukan, cepatnya pertumbuhan thalus serta relative tahan terhadap penyakit, meningkatkan sarana budidaya rumput laut serta melakukan koordinasi dengan Dinas KP, Penyuluh Perikanan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait potensi pengembangan budidaya rumput di wilayah kerja.

Rencana aksi untuk periode mendatang adalah meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan laboratorium kultur jaringan rumput laut sehingga produksi planlet dapat ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi kebutuhan bibit rumput laut kultur jaringan.

IKU 4 : Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)

Program bantuan calon induk ikan adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat menghasilkan benih bermutu pada masyarakat pembudidaya ikan.

Tujuan bantuan calon induk ikan kepada unit pembenihan milik masyarakat (UPR/HSRT) untuk meremajakan induk yang ada di masyarakat, meningkatkan

kualitas dan kuantitas induk sehingga dapat menghasilkan benih bermutu serta mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 20,06 juta ton. Menurut petunjuk teknis bantuan, Nomor 307/PER-DJPB/2022 spesifikasi teknis calon induk ikan laut adalah sebagai berikut : Kakap Putih dengan berat 300 gram.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai bulan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp. 6.016.400,- dari pagu anggaran senilai Rp.6.638.000 atau sebesar 90,67%..

Tabel 16. Capaian IKU “Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat”

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator: Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
50	150	120	150	100	75	200	-

IKU Bantuan Calon Induk Ikan Laut yang didistribusikan kepada masyarakat lingkup BPBL Ambon, merupakan IKU baru pada tahun 2024, dimana pada tahun 2022 BPBL Ambon belum memiliki IKU tersebut sehingga perhitungan perbandingan nilai dengan tahun sebelumnya belum dapat dilakukan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi dan penjaminan kualitas calon induk yang dihasilkan antara lain melalui penerapan *biosecurity* di lingkungan budidaya secara optimal, melakukan manajemen pemberian pakan yang tepat, pakan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik, terutama dalam kandungan nutrisi pakan yang terkandung didalamnya. Pakan diberikan secara tepat ukuran, jumlah, frekuensi pemberian sehingga berdampak pada peningkatan survival rate calon induk ikan , dan secara umum optimalkan implementasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) di instalasi produksi budidaya.



Gambar 6. Calon induk Ikan kakap putih (*Lates calcarifer*)



Grafik 7. Capaian IKU Bantuan Calon Induk Laut Satker Laut

Capaian IKU Bantuan Calon Induk Ikan Laut yang didistribusikan kepada masyarakat di BPBL Ambon mencapai 150%, termasuk lebih besar bila dibandingkan dengan satker lain seperti BBPBL Lampung (14,24%), BPBL Batam (100%) dan BPBL Lombok (0%). Hal ini menunjukkan dalam pencapaian IKU ini, BPBL Ambon telah menjalankannya dengan perencanaan yang tepat dan dapat mengantisipasi kendala/ resiko yang mungkin terjadi di lapangan.

IKU 5 : Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)

Target jumlah bantuan benih yang harus disalurkan oleh BPBL Ambon tahun 2024 sebesar 538.000 ekor atau 100%. Dimana Perhitungan pencapaian target IKU

bantuan benih dilakukan per semester dalam aplikasi kinerjaku, IKU ini dibagi menjadi 2 (dua) IKU Bantuan Benih Ikan Konsumsi dan Ikan Hias Laut. Pagu anggaran IKU Bantuan Benih Ikan Laut Rp. 9.600.000.000,- Target IKU bantuan benih ikan konsumsi pada tahun ini menjadi 538.000 Ekor. Secara rill progress capaian Bantuan Benih sampai dengan bulan Juni 2024 ini adalah sebesar 456.900 ekor atau 84,93% dari perencanaan target yang telah ditetapkan. Bantuan Benih yang disalurkan pada triwulan kedua terdiri atas benih ikan konsumsi yang didominasi benih ikan kakap putih.

Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU ini pada triwulan kedua TA. 2024 terealisasi sebesar Rp. 463.000.000, atau sebesar 4,83% dari total pagu anggaran yang ditetapkan

Tabel 17. Capaian IKU “Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
60	84,33	120	53,92	156,40	75	113,64	-

Data Penerima Bantuan benih telah diproses penginputan dalam aplikasi Bantuan Pemerintah KKP, Realisasi Bantuan Benih pada tahun 2024 telah mencapai target yang telah direncanakan, hal ini disebabkan jumlah produksi benih cukup baik, untuk beberapa komoditas unggulan seperti kakap putih, kerapu dan bubar. Berikut adalah rincian Bantuan benih ikan laut pada tahun 2024, tersaji pada tabel 8 berikut:

Tabel 18. Rincian Bantuan Benih Ikan Laut

No.	Bantuan Benih Ikan	Jumlah Bantuan (Ekor)	Jenis Bantuan	Sebaran Lokasi Bantuan
1.	Bantuan Benih Ikan Konsumsi Laut	538.000 Ekor atau (100%)	• Kakap Putih • Bubara • Kerapu Bebek	• Kota Ambon • Kabupaten Seram Bagian Barat • Kabupaten Maluku Tengah • Kabupaten Muna • Kabupaten Konawe Utara • Kabupaten Buru



Grafik 8. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU bantuan benih ikan laut pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung dan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada triwulan kedua tahun 2024, secara umum 4 satker laut telah melakukan proses pencapaian IKU. Perbedaan nilai realisasi bantuan benih ikan laut hal ini tentunya disebabkan perbedaan komoditas yang dikembangkan dan didistribusikan kepada masyarakat. Setiap Balai memiliki komoditas unggulan tertentu misalnya Lampung dengan cobia, Batam dengan bawal

bintang, Lombok dengan kakap putih nya. Pencapaian tertinggi ada di BPBL Ambon yang diikuti oleh Batam, Lombok dan Lampung.

Secara khusus Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menguasai teknologi budidaya kakap putih dan bubara (Kuwe). Perbedaan tata Kelola komoditas akan berpengaruh pada tinggi rendahnya nilai produksi benih ikan. Selain itu dalam realisasi bantuan benih juga dipengaruhi faktor non teknis seperti kelengkapan administrasi usulan permohonan bantuan dari pokdakan yang kurang lengkap atau jarak lokasi balai dan lokasi calon penerima bantuan yang terlalu jauh/akses transportasi sulit atau biaya operasional pengangkutan yang terlalu tinggi.

Pada proses produksi benih ikan konsumsi, Selain faktor lingkungan, adanya serangan pathogen juga menyebabkan masalah pada produksi benih. Pada benih kakap putih dan bubara juga ditemukan infeksi *Trichodina*. *Trichodina* sp. merupakan ektoparasit pada ikan air tawar maupun ikan laut. Hampir semua spesies ikan dapat terserang *Trichodina* sp. (Durborow 2003). Inang yang paling sering terserang *Trichodina* sp. biasanya berasal dari famili Cyprinidae (Afifah et al. 2014). *Trichodina* sp. akan mudah menginfeksi ikan jika kepadatan penebaran tinggi dan tingkat pemberian pakan yang tinggi serta kualitas air yang rendah (Durborow 2003). Predileksi *Trichodina* sp. adalah permukaan tubuh, sirip dan insang (Afifah et al. 2014). Karakter morfologi, identifikasi *Trichodina* sp. meliputi ukuran diameter tubuh, diameter cincin dentikel, diameter adhesive disc, lebar membran dan karakter meristik yaitu jumlah dentikel (Dana et al. 2002; Anisah et al. 2016).

Zheila (2013), permukaan tubuh berhubungan langsung dengan lingkungan yang memudahkan serangan *Trichodina* sp., selain itu permukaan tubuh juga menjadi tempat hidup yang baik bagi ektoparasit (Zheila 2013). Menurut Pramono dan Syakuri (2008), *Trichodina* sp. menempel pada permukaan tubuh dan akan berputar 360o dengan menggunakan silia sehingga akan merusak sel-sel disekitar dan memakan sel RIWIDIHARSO et al. – *Trichodina* pada benih ikan nilem di Balai Benih Ikan Kutasari Purbalingga 323 epitel yang hancur hingga mengakibatkan iritasi pada permukaan tubuh. Tingginya kandungan bahan organik dalam kolam dapat menyebabkan tingginya jumlah patogen sehingga kulit akan mensekresi

mucus yang berlebih sebagai antibodi untuk mendegradasi patogen. Hal ini menyebabkan kerusakan pada kulit sehingga lebih mudah terinfeksi ektoparasit. Serangan *Trichodina* sp. dengan intensitas tinggi dapat menyebabkan hiperplasia pada permukaan tubuh dan insang (Afifah et al. 2014). Serangan parasit ini menyebabkan hiperplasia yang dapat menyebabkan gangguan osmotik, pernapasan bahkan menyebabkan kematian. Kondisi ini mengakibatkan terhalangnya aliran air menuju filamen insang sehingga dapat menyebabkan ikan stres dan sulit untuk bernapas (Afifah et al. 2014).

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi dan penjaminan kualitas benih yang dihasilkan antara lain melalui penerapan *biosecurity* di lingkungan hatchery secara optimal, melakukan manajemen pemberian pakan benih yang tepat, pakan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik, terutama dalam kandungan nutrisi pakan yang terkandung didalamnya. Pakan induk dan benih tepat secara ukuran, jumlah, frekuensi pemberian sehingga berdampak pada peningkatan survival rate induk dan benih, dan secara umum optimalkan implementasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di instalasi produksi budidaya. Selain itu pengoptimalan pengelolaan kualitas air dengan menjaga perputaran media pemeliharaan menjadi bagian penting dalam penanganan penyakit ikan.

Rencana aksi dalam manajemen kesehatan ikan, khususnya penanganan infeksi *Trichodina* dapat dilakukan dengan perendaman ikan dengan menggunakan fumisid 5-10 ppm selama 30 menit dan diulang jika masih terjadi infeksi. Selain itu dilakukan penambahan vitamin C dalam pakan yang diberikan sampai ikan terlihat sehat, vitamin C secara umum dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh terhadap serangan penyakit.

Jumlah bantuan benih ikan laut pada 2017 sebanyak 188.300 ekor dan mengalami kenaikan signifikan di tahun 2024. Hal itu menunjukkan bahwa penguasaan teknologi budidaya terutama ikan ikan komoditas unggulan seperti kakap putih, bubar, dan kerapu semakin baik sehingga produksi dapat ditingkatkan dan realisasi bantuan kepada masyarakat juga semakin merata di wilayah kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.



Gambar 7. Kegiatan penyaluran bantuan benih ikan

IKU 6 : Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)

Produksi calon induk ikan adalah salah satu kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bantuan tersebut merupakan program strategis sebagai langkah terobosan untuk memenuhi kebutuhan calon induk unggul yang dapat menghasilkan benih bermutu pada masyarakat pembudidaya ikan.

Tabel 19. Capaian IKU “ Produksi Calon Induk Ikan Laut yang diproduksi BPBL Ambon”

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Jumlah Calon Induk Ikan Laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023(%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
1,350	1,671	120	1.301	124,30	4.090	40,86	

Pada tahun 2024, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon juga ditargetkan memproduksi induk/calon induk unggul sebanyak 4090 ekor. Sampai akhir triwulan kedua tahun 2024 capaian produksi calon induk teralisasi 1.671 Ekor,

produksi calon Komoditas induk yang diproduksi oleh BPBL Ambon meliputi jenis ikan konsumsi dan ikan hias. Produksi induk unggul ikan konsumsi yaitu kakap putih dan bubara. Sedangkan produksi induk unggul ikan hias yaitu ikan hias *clownfish* dengan berbagai varian.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan bulan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp. 901.535.760 dari pagu anggaran senilai Rp. 1.093.094.000 atau sebesar 82,48 %.

Berikut adalah rincian produksi calon induk yang dihasilkan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon triwulan kedua tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 20 berikut:

Tabel 20. Rincian Produksi Calon Induk Unggul

No.	Komoditas	Jumlah Komoditas
1.	Kakap Putih	1.230 ekor dengan bobot tubuh minimal 500 gr/ekor
2.	Clownfish	421 Ekor dengan ukuran minimal 4 cm.
3.	Kuwe,	20 ekor dengan bobot tubuh minimal 500 gr/ekor
4.	Kerapu	-



Grafik 9. Produksi Calon Induk Ikan Laut Satker Laut

Pada grafik diatas diketahui bahwa capaian IKU Produksi calon induk ikan pada satker Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, Lombok dan Batam pada tahun 2024 berbeda beda, produksi calon induk ikan pada triwulan kedua tahun 2024 tertinggi dihasilkan oleh BPBL Ambon dengan prosentase capaian sebesar 150% BPBL Batam sebesar 100%, BBPBL Lampung sebesar 14,24% dan BPBL Lombok belum ada produksi. Data tersebut menunjukan setiap satker telah melaksanakan produksi calon induk berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya disebabkan perbedaan tata kelola budidaya yang diterapkan oleh setiap balai, misal dalam hal teknis penanganan komoditas, selain itu perbedaan jenis komoditas budidaya yang dikembangkan berpengaruh pada jumlah calin yang diproduksi karena setiap komoditas memiliki karakteristik tersendiri seperti tingkat pertumbuhan, respon terhadap pakan hingga kemampuan beradaptasi dengan lingkungan perairan.



Gambar 8. Calon induk Ikan Kuwe (*Caranx sp*)

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan produksi calon induk antara lain melalui peningkatan jumlah produksi benih yang diseleksi secara ketat sehingga menghasilkan benih ikan unggul yang siap dibesarkan menjadi calon induk. Telah dilakukan Grading secara teratur guna menekan tingkat kanibalisme ikan selama proses pemeliharaan. Mengatur pola pakan yang tepat (mencukupi) dengan melakukan pemberian pakan dengan jenis pakan buatan (pabrikan) dan pakan segar (ikan rucah) yang relative lebih murah.

Rencana aksi untuk periode mendatang adalah meningkatkan sarana prasarana penunjang kegiatan produksi calon induk sehingga produksi dapat

ditingkatkan dengan cukup baik guna memenuhi calon induk yang berkualitas, dan mampu menghasilkan benih ikan yang baik dalam segi kualitas maupun kuantitas.

Realisasi capaian produksi calon induk pada tahun 2017 sebanyak 2035 ekor dan pada triwulan kedua tahun 2024 sebanyak 181 ekor. Hal ini disebabkan perubahan target pada setiap periode, sehingga capaian nya bervariasi namun secara keseluruhan, target produksi calon induk BPBL Ambon telah sesuai target yang telah ditetapkan.

IKU 7 : Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)

Diseminasi teknologi merupakan suatu proses penyebaran teknologi kepada pengguna, sehingga teknologi yang dihasilkan memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan pertanian, diseminasi teknologi tidak dapat dipisahkan dari penelitian dan pengkajian pertanian. Secara sederhana di lingkup kerja masing-masing, dapat dipertanyakan manfaat teknologi pertanian yang proses perakitannya telah menelan banyak biaya. Besar kecilnya manfaat tersebut tidak dapat dilepaskan dengan diseminasi paket teknologi.

Dalam suatu keadaan, suatu perubahan yang kecil dan sederhana dalam budidaya perikanan mungkin merupakan tindakan paling strategis dalam menghilangkan berbagai hambatan serta dalam meletakkan landasan bagi pembangunan. Suatu diseminasi teknologi perikanan budidaya dilakukan secara bertahap, maka jumlah teknologi yang didiseminasikan harus terbatas. Kalau jumlah teknologi terbatas, pembudidaya dapat memilih teknologi yang mampu menggabungkan antara kesederhanaan dan risiko yang rendah dengan tambahan produksi yang cukup berarti. Dengan cara demikian akan dicapai tingkat keberhasilan kegiatan diseminasi yang tinggi dan secara otomatis akan memperoleh kepercayaan masyarakat.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini terealisasi sebesar Rp. 399.998.560 dari pagu anggaran senilai Rp. 400.000.000, atau sebesar 100%. Target IKU layanan diseminasi pada tahun 2024 adalah 110% yang terbagi menjadi 4 kali kegiatan.

Berikut adalah rekapitan kegiatan layanan diseminasi teknologi perikanan budidaya pada tahun 2024 :

Tabel 21. Kegiatan Diseminasi Teknologi Budidaya tahun 2024

NO	JUDUL KEGIATAN DISEMINASI	ANGGOTA KOMISI IV DPR RI	PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Laut di Kabupaten Buru Provinsi Maluku	SAADIAH ULUPUTTY, S.T	Telah dilaksanakan dengan 120 Orang peserta
2	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan di Kota Ambon Provinsi Maluku	ABDULLAH TUASIKAL, M.Si	Telah dilaksanakan dengan 120 Orang peserta
3	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua	H. SOLAEMAN L. HAMZAH	Telah dilaksanakan dengan 100 Orang peserta
4	Bimbingan Teknis Budidaya Ikan Laut di Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara	ALLIEN MUS, S.H	Telah dilaksanakan dengan 100 Orang peserta

Tabel 22. Capaian IKU “Layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya Bidang Pembesaran Ikan (Unit)”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
100	110	110	100	110	100	110	-

Rencana tindak lanjut yang telah dilakukan dalam upaya layanan Diseminasi Teknologi Perikanan Budidaya antara lain melalui koordinasi intensif dengan TA Anggota Komisi IV DPR RI di wilayah kerja terkait pelaksanaan kegiatan bimtek bagi pembudidaya di wilayah konstituen, sehingga proses diseminasi informasi teknologi budidaya dapat tersampaikan secara efektif.



Gambar 9. Kegiatan Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan

IKU 8 : Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)

Perikanan Budidaya saat ini menjadi tumpuan penting dalam menopang pembangunan perikanan nasional seiring dengan meningkatnya fenomena kenaikan kebutuhan pangan masyarakat yang aman dikonsumsi serta upaya dalam peningkatan gizi masyarakat. Usaha budidaya nila memiliki prospek yang menjanjikan, komoditas ini mudah untuk dibudidayakan dan termasuk komoditas yang diminati oleh pasar.

Melalui penerapan teknologi adaptif, aplikatif efektif dan efisien maka penerapan system budidaya dengan bioflok dinilai mampu untuk meningkatkan produksi ikan. Pada tahun 2024 Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kembali mendapat tugas untuk mendistribusikan bantuan sarana produksi ikan sistem bioflok sebanyak 45 paket yang tersebar di beberapa provinsi di wilayah kerja.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar Rp. 6.893.730.000 dari pagu anggaran senilai Rp. 9.600.000.000 atau sebesar 71,81%. Target IKU bantuan sarana bioflok pada tahun 2024 terealisasi 100% dan sampai akhir triwulan kedua tahun 2024 kegiatan yang dilakukan antara lain kegiatan identifikasi, verifikasi calon penerima,

pemasangan sarana budidaya air tawar dan monitoring kegiatan budidaya pada penerima bantuan telah dilakukan di beberapa provinsi.

Tabel 23. Capaian IKU “Bantuan Sarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok BPBL Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
-	-	-	-	-	75	-	-

Pengukuran IKU ini dilakukan pada akhir tahun. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU ini antara lain lamanya rekomendasi Usulan Calon Penerima Calon Lokasi dari anggota dewan DPR RI Komisi IV yang dapilnya berada di wilayah kerja BPBL Ambon. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya percepatan realisasi bantuan sarana budidaya ikan system bioflok antara lain melalui koordinasi intensif dengan pihak anggota dewan, pihak dinas dan pihak ketiga (kontraktor) dalam hal percepatan pelaksanaan pekerjaan di lokasi penerima bantuan. pekerjaan fisik, penyediaan sarana pendukung budidaya dikoordinasikan dengan baik sehingga barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi barang yang telah ditentukan.

IKU 9 : Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)

Target jumlah bantuan benih yang harus disalurkan oleh BPBL Ambon tahun 2024 sebesar 538.000 ekor. Yang terbagi menjadi 2 IKU Bantuan Benih Ikan Konsumsi dan Ikan Hias Laut. Target IKU bantuan benih ikan hias laut pada tahun ini sebanyak 3.000 Ekor. Capaian Bantuan benih ikan hias laut ini pada triwulan kedua adalah sebanyak 1.000 ekor atau 33,33 % dari target yang telah ditetapkan, namun perhitungan pencapaian IKU dilakukan setiap semester sesuai dengan aplikasi kinerjaku. Bantuan Benih yang disalurkan pada tahun 2024 terdiri atas benih ikan hias yang didominasi benih ikan clownfish.

Tabel 24. Capaian IKU “Bantuan Benih Ikan Hias Laut BPBL Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
30	33,33	111,10	65	51,28	75	44,44	-

Dalam proses pencapaian target IKU bantuan benih ikan hias laut, dukungan anggaran tidak dialokasikan secara khusus namun pada pelaksanaannya digabungkan dengan kegiatan bantuan benih ikan laut yang didistribusikan ke masyarakat di wilayah kerja. Penggunaan anggaran dalam akhir proses pencapaian target IKU bantuan benih ikan laut ini pada triwulan kedua TA. 2024 terealisasi sebesar Rp. 895.380.000, atau sebesar 29,11% dari total pagu anggaran yang ditetapkan

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya pencapaian target IKU bantuan ikan hias laut adalah menambah koleksi indukan berbagai varian yang diseleksi secara ketat sehingga menghasilkan benih ikan hias unggul yang siap dibantukan kepada masyarakat, maupun sebagai salah satu sumber perolehan PNBP bidang produksi.

Rencana aksi dalam upaya mempercepat capaian kinerja adalah dengan meningkatkan sarana produksi benih ikan hias, sehingga volume kegiatan pembenihan dapat ditingkatkan dan produksi benih ikan hias akan mencukupi dalam memenuhi kegiatan bantuan maupun restocking di perairan.



Grafik 10. Capaian IKU Bantuan Benih Ikan Hias Laut



Gambar 10. Bantuan Benih Ikan Hias Laut 2024

IKU 10 : Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok pembudidaya ikan serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah melalui bantuan prioritas yang dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Pembangunan sarana dan

prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Pada tahun 2024, terdapat IKU yang mewadahi kegiatan rehabilitasi fasilitas produksi yang dilaksanakan di BPBL Ambon. Upaya peningkatan sarana dan prasarana produksi di BPBL Ambon memiliki tujuan mendukung naiknya nilai produksi komoditas budidaya, diharapkan dengan peningkatan produksi, distribusi penyaluran bantuan prioritas dari BPBL Ambon kepada kelompok pembudidaya ikan di wilayah kerja dapat terealisasi dengan baik.

Tabel 25. Capaian IKU “Prasarana Produksi yang direhabilitasi BPBL Ambon”.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Unit)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2022 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
-	-	-	-	-	100	-	-

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU sarana UPT yang direhabilitasi ini sampai dengan bulan Juni 2024 terealisasi sebesar Rp. 1.080.371.575 dari pagu anggaran senilai Rp. 1.500.000.000, atau sebesar 72,02 %. Secara umum kegiatan rehabilitasi UPT di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahapan proses pelaksanaan.

Belum ditemukan adanya permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini karena semua tahapan pekerjaan dilakukan sesuai dengan perencanaan.

Rencana aksi untuk kegiatan IKU sejenis adalah melakukan identifikasi kebutuhan rehabilitasi sarana produksi yang dibutuhkan sehingga target yang diinginkan dapat tepat sasaran dan mampu mendukung kegiatan produksi dengan baik.

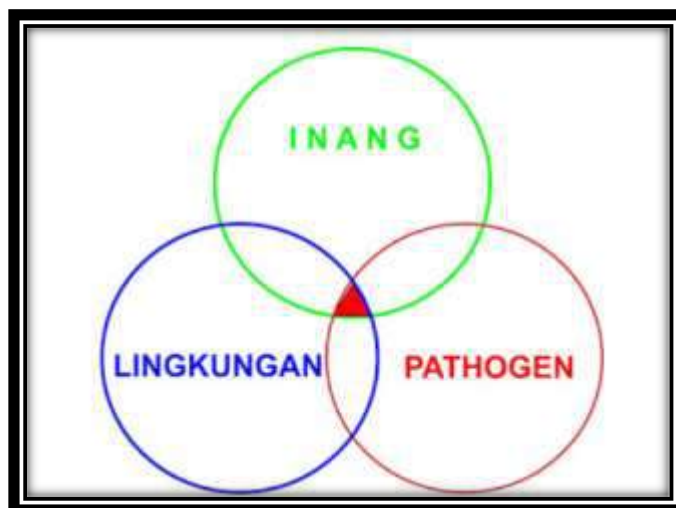
SASARAN KEGIATAN II : MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIKANAN BUDIDAYA BIDANG KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN DI WILAYAH KERJA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

IKU 11 : Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Salah satu faktor penyebab gagalnya usaha budidaya ikan adalah terjadinya kejadian penyakit pada ikan budidaya, penyakit ikan dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar dengan mortalitas tinggi. Penyakit ikan adalah segala bentuk penyimpangan yang dapat menyebabkan ikan merasa terganggu kehidupannya. Atau dapat diartikan sebagai suatu keadaan fisik, kimia, biologis, morfologi dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal yang disebabkan factor internal atau eksternal.

Penyebab penyakit dapat berasal dari dalam tubuh ikan maupun luar. Faktor internal antara lain akibat keturunan (genetic), seksresi internal, imunodefisiensi, kelainan saraf atau gangguan metabolik. Sedangkan faktor eksternal antara lain: serangan pathogen, hama, lingkungan atau malnutrisi.

Upaya pengendalian hama dan penyakit ikan yang biasa dilakukan oleh pembudidaya adalah upaya preventif dan kuratif. Upaya preventif adalah tindakan yang sebaiknya dilakukan pembudidaya untuk mengatasi serangan penyakit. Upaya kuratif atau pengobatan adalah upaya yang dilakukan pembudidaya untuk mengatasi penyakit ikan dengan menggunakan obat baik yang bersifat alami maupun sintetis. Pengobatan diberikan berdasarkan jenis penyakit, pathogen dan dosis tertentu.



Gambar 11. Diagram Kejadian Penyakit Ikan

Hingga akhir triwulan kedua tahun 2024, capaian kinerja pada IKU pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan mampu melebihi target yang ditetapkan. Capaian realisasi terhadap jumlah sampel yang di uji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon mencapai 1.092 sampel atau 136,33% dari total target sampel uji di tahun 2024.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir triwulan kedua tahun 2024 Anggaran pengujian sampel dengan pagu Rp. 124.882.000 dan terealisasi Rp. 68.602.000 (54,93%).

Tabel 26. Capaian IKU “Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)”.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang kawasan dan kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
50	136,25	120	107,49	126,76	100	136,32	



Grafik 11. Capaian IKU Pengujian Sampel Laboratorium Satker Laut

Hasil identifikasi menunjukkan terjadi kejadian serangan penyakit yang disebabkan oleh parasit, bakteri dan virus pada beberapa komoditas yang dibudidayakan seperti ikan Bubar, Kakap putih dan Kerapu Cantang. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan ikan terinfeksi parasite *Trichodina*.

Trichodina berperan besar dalam penurunan kekebalan tubuh ikan. Trichodiniasis akan menunjukkan gejala klinis seperti berenang abnormal, frekuensi pernapasan meningkat, melanosis, pertumbuhan menurun. Kematian terjadi karena ikan memproduksi lendir secara berlebihan dan akhirnya kelelahan. Kematian biasanya terjadi akibat terganggunya sistem pertukaran oksigen karena dinding lamella insang tertutup oleh lendir.

Pengendalian serangan *Trichodina* dilakukan dengan mempertahankan kualitas air dan suhu berada pada kisaran 29°C. Meningkatkan Frekuensi pergantian air untuk mengurangi kandungan bahan organik sehingga kualitas media budidaya dapat dipertahankan tetap dalam kondisi baik.

Vibriosis merupakan penyakit yang potensial menyerang ikan laut baik ikan budidaya maupun ikan liar. Dalam keadaan normal bakteri vibriosis spp merupakan mikroflora yang hidup pada usus ikan air laut. Kematian yang diakibatkan mencapai 50% terutama jika menginfeksi ikan stadia muda. Gejala klinis menunjukkan ikan

anorexia, warna tubuh menjadi lebih gelap, warna insang menjadi pucat. Pada infeksi akut bagian pectoral membengkak luka pada kulit dan bernanah. Penanggulangan infeksi ini dapat dilakukan dengan vaksinasi ikan untuk menambah ketahanan tubuh terhadap serangan infeksi ini.



Gambar 12. Pemeriksaan Sampel Laboratorium Keskanling BPBL Ambon

Rencana aksi dalam upaya pencapaian target pengujian sampel adalah meningkatkan sarana pelayanan pengujian serta melakukan kunjungan langsung ke kawasan budidaya yang teridentifikasi terjadi adanya kejadian penyakit ikan, sehingga sampel yang diperoleh dapat diujikan dan dijadikan informasi yang memadai bagi penanggulan HPI di suatu kawasan budidaya perikanan. Pengujian sampel ini bersifat eksternal dan internal sehingga dalam proses pencapaian IKU dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan.

IKU 12 : Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

AMR adalah kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi dan parasit menjadi resisten atau kebal terhadap antimikroba (antibiotik, antivirus, antifungal, antiparasit) yang sebelumnya efektif untuk mencegah atau membunuh mikroorganisme tersebut.

Intermediet adalah suatu keadaan dimana terjadi pergeseran dari keadaan sensitif ke keadaan yang resisten tetapi tidak resisten sepenuhnya. Sedangkan resisten adalah suatu keadaan dimana mikroba sudah peka atau sudah kebal terhadap antibiotik.

Antibiotik bekerja secara sitostatik atau sitotoksik untuk menghilangkan mikroorganisme. Antibiotik mempunyai mekanisme kerja menghambat proses sintesis protein sel bakteri, asam deoksiribonukleat/DNA dan ribonukleat asam/RNA (Zaman et al., 2017). Antibiotik bersifat toksik secara selektif pada bakteri, namun tidak toksik pada sel inang (host). Antibiotik pada peternakan digunakan dengan tujuan: sebagai pengobatan, metaphylactic, prophylactic dan pemacu pertumbuhan (Noor dan Poeloengan, 2004). Pelarangan penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan dikompensasi dengan meningkatnya penggunaan sebagai metaphylactic dan prophylactic (Woolhouse et al., 2015). Dosis yang diserap atau dimetabolisme oleh individu hewan atau orang, berkisar 10- 80%, dengan sisanya diekskresikan sebagai senyawa aktif melalui urin dan kotoran ke lingkungan yang dapat mengandung mikroorganisme resisten dan gen resistensi antimikrob (FAO 2018). Resistensi adalah kemampuan bakteri untuk beradaptasi terhadap paparan antibiotik (Spellberg et al., 2013). Sifat ini merupakan suatu mekanisme alamiah untuk bertahan hidup. Penyebab utama kejadian resistensi adalah karena penggunaan antibiotik yang tidak bijak pada manusia dan hewan. Dampak dari resistensi antibiotik adalah upaya pengobatan menjadi lebih sulit dan membutuhkan biaya kesehatan yang lebih tinggi (Noor dan Poeloengan, 2004). Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tidak terkendali merupakan sebab utama penyebaran resistensi antibiotik secara global, sehingga terjadi bakteri yang multiresisten terhadap sekelompok antibiotic.

Infeksi oleh bakteri yang telah resisten mengakibatkan pengobatan menjadi tidak efektif sehingga infeksi terus berlanjut dan meningkatkan risiko penyebaran infeksi ke orang lain (WHO 2016). Gen resisten dapat diwariskan atau dapat diperoleh dari unsur genetik seluler seperti plasmid yang dapat terjadi antar bakteri (Read dan Woods, 2014). Konsentrasi antibiotik dosis rendah (subterapeutik) dapat meningkatkan perkembangan resistensi antibiotik dengan memicu perubahan

genetik (Ventola 2015). Isolat dari sampel ikan kemudian dilanjutkan dengan pengujian antimicrobial susceptibility testing (AST) yang bertujuan untuk menguji kepekaan antibiotik.

Tabel 27. Capaian IKU “Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon”.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang kawasan dan kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
50	105,71	120	117,64	89,86	100	105,71	-

Hingga akhir triwulan kedua tahun 2024, capaian kinerja pada IKU pengujian sampel AMR belum melebihi target yang ditetapkan. Capaian realisasi terhadap jumlah sampel yang di uji pada laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan BPBL Ambon sudah mencapai 37 sampel atau 105,71% dari total target sampel uji di tahun 2024.

Penggunaan anggaran dalam proses pencapaian target IKU ini sampai dengan akhir triwulan kedua tahun 2024 Anggaran pengujian sampel dengan pagu Rp. 72,311.000 dan terealisasi pada Triwulan II sebesar 33.311.000 atau 46,07%.



Grafik 12. Capaian IKU Pengujian Sampel AMR Satker Laut

Rencana aksi dalam upaya pencapaian target pengujian sampel AMR adalah meningkatkan sarana pelayanan pengujian serta melakukan kunjungan langsung ke kawasan budidaya yang teridentifikasi terjadi adanya kejadian penyakit ikan, sehingga sampel yang diperoleh dapat diujikan dan dijadikan informasi yang memadai bagi penanggulan HPI di suatu kawasan budidaya perikanan.

SASARAN KEGIATAN IV : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

IKU 13 : Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pembangunan perikanan budidaya, salah satu pendorong utamanya adalah tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional. Di samping itu, SDM juga merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas, kompeten, serta memiliki daya saing tinggi dalam era globalisasi. Oleh sebab itu, salah satu sasaran strategis yang ditetapkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya adalah tersedianya SDM Ditjen Perikanan Budidaya yang kompeten dan profesional.

SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (*attitude*) dan kapasitas (*skill*) yang memadai dalam meningkatkan kinerja

organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Pengangkatan seorang pegawai di dalam jabatan struktural diharapkan sesuai dengan kompetensinya sehingga prinsip *the right man and the right place* dapat terpenuhi.

Hal ini dapat dicapai apabila pengangkatan dalam jabatan struktural berpedoman pada Standar Kompetensi Manajerial (SKM), dimana SKM menggambarkan jenis dan level kompetensi yang diperlukan bagi suatu jabatan, sehingga pelaksanaan tugas suatu jabatan dapat dilaksanakan dengan baik. Sementara itu indeks kompetensi dan integritas merupakan angka yang menunjukkan agregasi dari indeks kompetensi (membandingkan kompetensi hasil rekomendasi penilaian kompetensi/*assessment* dari asesor dengan jenis standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-SJ/2014), persentase capaian output SKP, persentase tingkat kehadiran dan kepatuhan pejabat terhadap LHKPN/LHKASN, serta data tambahan berupa persentase pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan nilai *Human Capital Development Plan* (HCDP).

Tabel 28. Capaian IKM “Indeks Profesionalitas ASN BPBL Ambon”.

Saasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
80	79,97	99,96	75,21	106,32	85	94,09	-

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN.

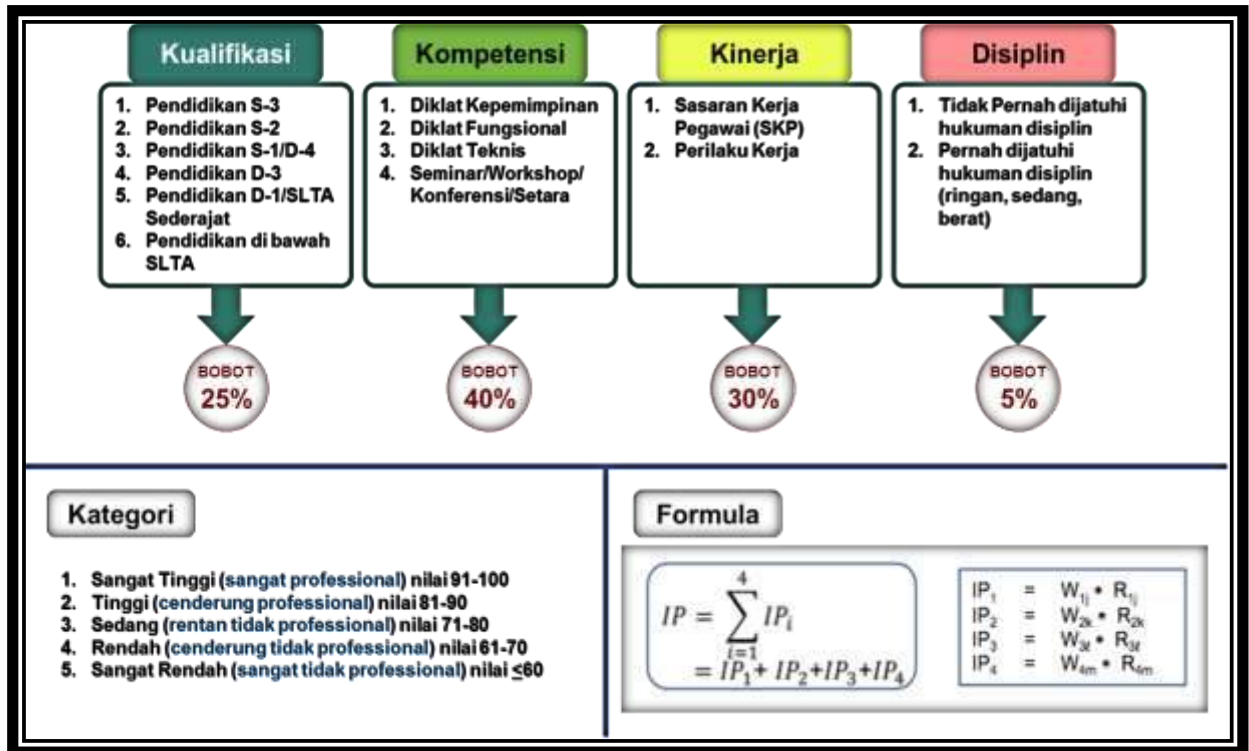
Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis;
3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.

Bimbingan Teknis memiliki pengertian sebagai sebuah layanan bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh tenaga ahli atau profesional dibidangnya dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Seiring dengan jaman yang terus berkembang, Bimbingan Teknis atau Bimtek memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Beberapa tujuan dari Bimbingan Teknis Secara Umum, meliputi Peningkatan kualitas Sumber Daya manusia, Koordinasi yang lebih baik, Peningkatan kinerja

institusi dan organisasi untuk menunjang keberhasilan suatu institusi, Memiliki kompetensi untuk secara optimal melaksanakan tugas jabatan yang diduduki dan Memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.



Gambar 13. Kriteria Penilaian Indeks Profesionalitas ASN



Gambar 14. Sertifikat Kegiatan dalam penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Dalam proses pencapaian target IKU IP ASN, dukungan anggaran tidak dialokasikan secara khusus, karena pada saat ini peningkatan IP ASN dapat dilakukan secara daring seperti Bimtek, Seminar maupun Workshop melalui zoom meeting. Perhitungan IKU IP ASN ini dilakukan setiap semester.

Indeks Profesionalitas ASN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 2024 pada akhir triwulan kedua mencapai 79,97 (Kategori sedang) hal ini didukung dengan terpenuhinya data dukung dari 4 kategori yakni kualifikasi Pendidikan, kompetensi mencakup kegiatan diklat, seminar, bimbingan teknis maupun workshop yang diikuti oleh pegawai, kinerja mencakup terpenuhinya target dalam sasaran kinerja pegawai dan penilaian perilaku serta tingkat kedisiplinan pegawai. Berdasarkan data <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/unker/515> komposisi nilai IP ASN BPBL Ambon adalah sebagai berikut, jumlah pegawai yang dihitung 57 pegawai dengan Kualifikasi senilai 29,91 Kompetensi senilai 28,42, Kinerja senilai 25,64 dan Disiplin senilai 5. Dibandingkan pencapaian IP ASN di beberapa satker yang relative sama antara lain Balai Perikanan Budidaya Laut Batam sebesar 78,67 (Kategori sedang) Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok 84,46 (Kategori tinggi) Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung 81,28 (Kategori tinggi) pada periode yang sama.

Salah satu faktor tingginya perolehan IP ASN BPBL Ambon antara lain, kualifikasi atau jenjang pendidikan pegawai yang relatif sudah berada pada jenjang master, sarjana dan beberapa di jenjang Diploma dan SMA, tentunya hal tersebut mempengaruhi nilai persentase yang diperoleh, kemudian keaktifan pegawai mengikuti seminar, workshop atau bimbingan teknis baik yang berkaitan dengan fungsional maupun umum serta secara rutin menginput bukti keikutsertaan kegiatan dalam aplikasi E-Pegawai. Pelaksanaan Diklat yang terbatas tidak menjadi hambatan dalam pengembangan kompetensi pegawai, namun hal tersebut dijadikan sebuah inputan dalam proses perencanaan kedepan dalam menyusun daftar pengembangan kompetensi SDM BPBL Ambon (Kebutuhan Diklat), sehingga setiap pegawai dapat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pengembangan kompetensi tentunya dengan persyaratan yang berlaku dalam pelaksanaannya. Selain itu inisiatif dalam melaksanakan inhouse training dengan

mendatangkan narasumber dari luar juga menjadi solusi peningkatan nilai kompetensi pegawai BPBL Ambon.

Perolehan nilai SKP dan perilaku BPBL Ambon juga menunjukkan hasil yang baik, bahkan beberapa pegawai menunjukkan hasil sangat baik, hal ini tentunya dipengaruhi pencapaian realisasi kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Tingkat kedisiplinan pegawai juga menunjukkan hasil yang baik dimana hasil presensi (kehadiran pegawai) serta tidak adanya pegawai yang mendapat hukuman disiplin pada periode ini.

Belum ditemukan permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini, karena kegiatan peningkatan kompetensi pegawai saat ini bisa dipenuhi dari kegiatan kegiatan bimtek dan sejenisnya secara daring.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai sehingga indeks profesionalitas dapat ditingkatkan.

IKU 14 : Hasil Penilaian Konsensus ZI di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan langkah pertama dalam mewujudkan suatu system pemerintahan atau organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan reformasi birokrasi ini tidak lain adalah peningkatan kualitas pelayanan masyarakat secara tepat, cepat dan efisien, namun pada saat pelaksanaannya sering ditemukan beberapa kendala seperti penyalahgunaan wewenang, adanya indikasi KKN dan masih lemahnya fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Grand design reformasi birokrasi tertuang pada Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 yang menjelaskan tiga sasaran utama yakni peningkatan kapasitas, akuntabilitas organisasi dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Untuk membantu mewujudkan tiga sasaran tersebut maka diperlukan suatu project kongkret melalui pembangunan zona integritas di setiap instansi.

Zona Integritas menurut Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan public. Sedangkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) adalah predikat yang diberikan pada unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas layanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang berintegritas, khususnya di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, dapat terwujud apabila seluruh pimpinan dan pegawai mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien.

Tabel 29. Capaian IKM “Hasil Penilaian Konsensus ZI di BPBL Ambon”

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Hasil Penilaian Konsensus ZI di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
-	-	-	-		76	-	-

Pencapaian target ini telah dicapai pada tahun 2021, dimana BPBL Ambon telah mendapat predikat unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan nilai perolehan 83,14. Pada tahun 2024 akan dilakukan assessment penilaian ulang dari

kegiatan zona integritas di BPBL Ambon. Progress kegiatan dalam mempertahankan predikat tersebut adalah:

- Pendokumentasian kegiatan perencanaan
- Pendokumentasian kegiatan akuntabilitas kinerja
- Pendokumentasian manajemen SDM
- Pendokumentasian sistem pengawasan
- Pendokumentasian kegiatan pelayanan publik

Belum ditemukan permasalahan dalam proses pencapaian IKU ini, karena kegiatan penilaian WBK saat ini bisa dipenuhi dari kegiatan pemenuhan dokumen pengungkit dan unsur persepsi masyarakat yang menjadi stakeholder Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan zona integritas dimana pemenuhan dokumen di 6 unsur penguatan serta persepsi anti korupsi dapat diperoleh dengan baik.

IKU ini merupakan IKU baru sehingga capaian keberhasilan IKU nya belum dapat dibandingkan dengan capaian IKU pada tahun 2017.

IKU 15 : Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Menurut pasal 16 UU No. 15/2004, muatan yang termasuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sendiri adalah sebagai berikut:

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
- (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara.

Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan

Tabel 30. Capaian IKM “Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)”

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
-	-	-	-	-	100	-	-

Dalam proses pencapaian IKU ini belum ada anggaran khusus yang digunakan. Pencapaian IKU ini biasanya dilakukan pada akhir tahun berjalan. Tindak lanjut pelaksanaan IKU ini adalah dengan berupaya melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta menindaklanjuti segala temuan pemeriksaan dengan data dukung yang memadai.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

IKU 16 : Nilai Rekon SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)

AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodic. Yang melatar belakangi penyusunan AKIP adalah dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Tabel 31. Capaian IKM “Nilai Rekon Kinerja lingkup BPBL Ambon”.

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Rekon SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
-	-	-	-		82	-	-

Progress pencapaian IKU ini pada tahun 2024 mencakup:

1. Laporan Kinerja Triwulan I
2. Rencana Aksi Triwulan I
3. Laporan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I
4. Rincian Target IKU tahun 2024
5. Perjanjian Kinerja tahun 2024
6. Renja
7. Manual IKU

Dalam proses pencapaian IKU ini belum ada penggunaan anggaran secara khusus, proses difokuskan dalam pemenuhan dokumen yang diperlukan dalam evaluasi SAKIP dan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan : (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen

SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan review dan evaluasi kinerja.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

IKU 17 : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Pelaksanaan audit pada dasarnya merupakan operasionalisasi dari langkah kerja PKA meliputi pengumpulan data audit, pengolahan dan analisa data/bukti audit sesuai teknik audit, pengembangan temuan audit. Adapun proses pelaksanaan audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar audit adalah sebagai berikut:

- Pengumpulan bukti audit
- Pengujian bukti audit
- Kertas kerja audit
- Penyusunan dan temuan audit

Temuan audit adalah masalah masalah penting serta memiliki dampak terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja. Temuan audit harus mengandung unsur temuan yang lengkap yaitu menggambarkan kondisi sebenarnya, kriteria yang harus dipatuhi oleh auditor, penyebab hakiki, akibat yang ditimbulkan dan rekomendasi yang menghilangkan penyebab dan akibat.

Temuan audit harus mendapatkan tanggapan dari pihak auditi.

Hal yang harus diperhatikan dalam menyusun temuan dan simpulan hasil audit yaitu:

- Judul, mencerminkan uraian substansi temuan
- Informasi, masukan informasi yang penting dan relevan dengan temuan
- Obyektif, yakinkan bahwa setiap kata didukung oleh bukti dan tidak dilebih-lebihkan apalagi bersifat menekan
- Kenali pendapat penting
- Yakin

- Kalimat konstruktif, bersifat membangun dan tidak kualitatif serta untuk perbaikan dimasa datang
- Pengakuan, apresiasi terhadap kegiatan yang sudah dicapai oleh manajemen
- Jujur
- Pengendalian manajemen, utamakan pembahasan pengendalian manajemen disetiap tingkatan pada bidang yang dipermasalahkan
- Pengaruh negative, jelaskan pengaruh negative yang sudah terjadi
- Penyebab hakiki, tunjukan penyebab atau alasan yang menjadi dasar terjadinya masalah
- Ringkas, uraian permasalahan singkat dan jelas
- Bahasa sederhana.

Tabel 32. Capaian IKM “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)”

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
80	100	120	100	100	80	120	120

Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun hasil capaian IKU Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPBL Ambon pada triwulan kedua tahun 2024 sebesar 100% rekomendasi itjen telah terselesaikan seluruhnya dan lebih tinggi dari satker lainnya seperti BBPBL Lampung (96%) , BPBL Batam dan BPBL Lombok (72%) artinya belum semua rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh satker tersebut.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan kegiatan dimana pemenuhan dokumen kegiatan

sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat disusun dengan baik.

IKU 18 : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L. Pagu Anggaran Belanja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 29.158.797.000,-

Tabel 33. Capaian IKM “Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBL Ambon (persen) tahun 2024”.

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
83	96,61	116,4	88,44	109,24	93,76	116,4	-

Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian *output* anggaran melalui : (i) Kelancaran pelaksanaan anggaran (*pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM*); (ii) Mendukung manajemen kas (*pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D*); dan (iii) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (*LKKL/LKPP*) (*penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja*).

MONEVPA

notifikasi

BALAI BUDIDAYA LAUT AMBON

16 JUN 2024

F123

F23

F123

Indikator Pelaksanaan Anggaran

100.00

SAMPAI DENGAN 1 JUNI

100.00 100.00 100.00

IND	KODE EPPN	KODE BK	KODE SATKER	URAIAN SATKER	REKONSILIASI	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI ROKET	SASARAN RPI (PENGURANG)	NILAI IKU TOTAL/NO ROKET
						PIR: DPA	DEV: AKLAGAN II DPA	PIYIPAKAN ANGGARAN	BELANG KONTRAKTUAL	PEYELUASAN TAGIHAN	PEMBELAJAN UP DAN TUP					
1	081	082	507720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	91.01	95.51	98.51	100.00	100.00	92.78	98.67	100%	3.00	
				Bahan		10	15	20	10	10	10	25				
				Nilai Akhir		10.00	13.65	16.90	8.87	10.00	10.00	23.18				
				Nilai Akhir		95.51			98.51			92.78				

Gambar 15. Capaian IKU IKPA Triwulan Kedua

Perhitungan IKU IKPA tahun 2024 dilakukan per semester, data diatas merupakan data sementara per Maret 2024. Data capaian IKPA sementara berdasarkan data OM SPAN sampai dengan Juni 2024 sebesar 96,61.

Belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun hasil capaian IKU Nilai Pelaksanaan Kinerja Anggaran lingkup BPBL Ambon dan satker lainnya seperti BBPBL Lampung, BPBL Batam dan BPBL Lombok akan bervariasi, perbedaan yang terlihat dari nilai deviasi halaman III DIPA yang menunjukkan nilai perolehan yang berkaitan dengan perencanaan pencairan anggaran dalam menunjang ketercapaian output kinerja. Semester pertama Balai Laut lingkup DJPB menunjukkan perolehan nilai IKPA diatas Target yang ditetapkan yang artinya semua inputan pada komponen penilaian telah memenuhi nilai minimal yang ditetapkan.

Tindak lanjut dari pelaksanaan IKU ini adalah penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian *output* yang benar-benar optimal.

IKU 19 : Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Kinerja anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.

1. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi
 - a. Capaian Keluaran
Pengukuran capaian keluaran output program dilakukan menghitung rata rata ukur secara geometric (Π) perbandingan antara realisasi indikator dengan target indikator.
 - b. Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
 - c. Efisiensi, dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Tabel 34. Capaian IKM “Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPBL Ambon (%) ”

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
-	-	-	-	-	86	-	-

Proses pencapaian kinerja anggaran dilakukan pada akhir tahun berjalan. Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini. Data kinerja anggaran BPBL Ambon mengacu pada perhitungan di tingkat eselon I. Data yang dimuat merupakan data adopsi langsung pada aplikasi Smartkeu.

Rencana aksi dalam proses percepatan pencapaian IKU ini adalah melakukan identifikasi dan perencanaan anggaran dimana pemenuhan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran guna pencapaian target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

IKU 20 : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Pengadaan barang dan jasa sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintah. Pada sektor pemerintah, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berlangsung cukup sulit. Proses yang berlangsung harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggar peraturan sedikitpun.

Pengadaan barang dan jasa pada sektor pemerintahan terbilang sulit karena pembiayaannya berkaitan erat dengan APBN/APBD sehingga segala proses yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan dengan sejelas-jelasnya. Sementara itu, pengadaan barang dan jasa pada sektor non pemerintah atau perusahaan, proses pengadaan yang dilaksanakan cenderung cukup mudah dan tidak serumit pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

- Efektif, Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.
- Efisien, Kegiatan pengadaan diusahakan dengan dana yang terbatas untuk mencapai sasaran yang dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan
- Transparan, Adanya suatu keadaan dimana pihak ketiga kegiatan pengadaan bisa melihat dengan jelas barang atau jasa yang akan dibeli.
- Terbuka, Siapapun dapat mengikuti proses lelang yang berlangsung sebagai calon penyedia dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- Bersaing, Penentuan penyedia yang akan dipilih ditentukan dengan persaingan lelang yang sehat antar penyedia.
- Adil/Tidak Diskriminatif, Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua calon penyedia tanpa mengarah untuk memberi keuntungan pada pihak tertentu

- Akuntabel, Kegiatan pengadaan dapat ditelusur dari segi keuangan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pada berbagai pihak.

Tabel 35. Capaian IKM “Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa BPBL Ambon”

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
-	-	-	-	-	80	-	-

Proses pencapaian tingkat kepatuhan barang dan jasa dilakukan pada akhir tahun berjalan. Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap mengacu pada peraturan yang diberlakukan LPSE sehingga data pengadaan barang jasa dapat dipantau dengan baik.

IKU 21 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya belum dapat dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu dilakukan penggantian untuk menjawab permasalahan dan praktik yang belum tertampung dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan

pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan Barang Milik Negara tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang disesuaikan dengan siklus perbendaharaan. Dalam bahan ajar ini hanya akan membahas sebagian dari siklus pengelolaan BMN, yaitu tahap penatausahaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang diperoleh atas beban APBN meliputi baik melalui pembelian maupun pembangunan. Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi:

1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 36. Capaian IKM “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPBL Ambon”

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
-	-	-	-	-	80	-	-

Proses pencapaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dilakukan pada akhir tahun berjalan. Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap

mengacu pada peraturan yang diberlakukan. Penginputan data di Aplikasi pengelolaan BMN sehingga data pengelolaan BMN dapat dipantau dengan baik.

IKU 22 : Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks)

Media Relations menurut Dian Wardhani (2008:1) adalah aktivitas komunikasi public relations/humas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian serta dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan balance (berimbang). Adapun pendapat Lesly dalam Yosol (2011:29) mengatakan media relations sangat berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Dengan itu sebuah instansi harus memiliki hubungan media relations yang baik agar mendapat pemberitaan yang baik untuk instansinya.

Perkembangan media massa yang sangat pesat ini mempengaruhi kegiatan media relations yang dijalankan oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Adapun kegiatan yang dilakukan Public Relations Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain mengamati perkembangan media, target sasaran, dan isu – isu yang berkembang di masyarakat agar dapat menentukan strategi media relations yang tepat untuk organisasinya.

Menurut standar analisis humas pada media tradisional yang dikeluarkan Institute for Public Relations (2012) Tone berita adalah penilaian yang dilakukan setelah membaca keseluruhan artikel (Eisenmann, 2012). Menurut Stacks (2006), tone mengukur apa yang dirasakan oleh target audiens tentang individu, perusahaan, produk atau topik, setelah membaca/melihat/mendengar berita di media massa. Tone biasanya terbagi atas positif, netral/balanced, dan negatif. Berikut indikator penentuan sebuah tone (Eisenmann, 2012):

Tabel 37. Deskripsi Tone Berita

No.	Tone Pemberitaan	Deskripsi
1.	Positif	Peliputan media membuat pembaca mendukung, merekomendasikan, dan/atau bersedia bekerjasama dengan perusahaan/brand
2.	Netral	Peliputan media tidak mengandung sentimen tertentu, hanya melaporkan fakta yang ada. Dalam pemberitaan yang negatif, sebuah artikel bisa saja netral jika hanya menyuguhkan fakta tanpa ada komentar editorial. Jika perusahaan/brand berada dalam kondisi yang tidak baik, paling tidak perusahaan/brand berupaya mendapatkan peliputan yang netral.
3.	Negatif	Peliputan media membuat pembaca tidak mau mendukung dan bekerjasama dengan perusahaan/brand.
4.	Balanced (Berimbang)	Hasil dari tone secara keseluruhan adalah berimbang.

Tabel 38. Capaian IKM “Rasio Jumlah Pemberitaan Netral positif terhadap Total Pemberitaan Sektor Perikanan Budidaya”

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan I 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2022 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
86	100	116	100	1	86	116	0

Proses pencapaian rasio pemberitaan dilakukan setiap triwulan berjalan dengan target 86% dan pencapaian IKU ini pada triwulan kedua adalah 100% dimana pemberitaan sub sector perikanan budidaya memiliki tendensi positif. Walaupun belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan monitoring media dan mengklasifikasikan berdasarkan tendensi isu yang terjadi.

Capaian di triwulan kedua tahun 2024 dibandingkan dengan capaian di triwulan yang sama pada tahun 2023 adalah sama yaitu sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya konsistensi dalam menjalankan IKU tersebut.

IKU 23 : Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks)

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip sangat penting dalam pengamanan aset Institusi dan sebagai bahan pembuktian baik secara *de facto* maupun/ *de jure*.

Output tindak lanjut pengawasan arsip adalah melahirkan pengelolaan arsip baik secara fisik, isi informasi utuh dan terkoneksi secara online. Pengelolaan secara fisik dan elektronik perlu dilakukan secara komprehensif. Pengelolaan arsip butuh komitmen dari pimpinan & konsistensi pelaksana. Tindak lanjut adalah perlu sinergi & sinkronisasi dalam pengelolaan arsip dalam tingkat teknis diantara perlunya bintek-bintek pemberkasan.

Dalam pengelolaan Arsip Dinamis membutuhkan SDM, Sarana & Prasarana, dan sumber daya lain. Empat pilar pengelolaan arsip dinamis yang harus dilakukan organisasi kerja yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, JRA, Sistem Klasifikasi Keamanan.

Tabel 39. Capaian IKM “Pengawasan kearsipan BPBL Ambon”

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Indeks)							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
-	-	-	-	-	75	-	-

Belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan pengelolaan kearsipan dan mengklasifikasikan arsip berdasarkan jenis dan kebutuhan arsip.

IKU 24 : Indeks Pengelolaan Kepegawaian

Administrasi kepegawaian negara adalah pengelolaan kepegawaian negara atau pegawai negeri yang dikaji sebagai ilmu dan seni untuk mempelajari proses penggunaan tenaga manusia, mulai penerimaan hingga pemberhentiannya. Dapat juga dikatakan, administrasi kepegawaian negara merupakan proses penyelenggaraan politik kepegawaian atau program kerja, dan tujuan yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia yang digunakan dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi kepegawaian dalam instansi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan administrasi secara keseluruhan. Lingkup kegiatan administrasi kepegawaian, antara lain meliputi penerimaan, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun tupoksi dari pengelola kepegawaian:

1. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
2. Membuat Daftar Absen dan Rekap
3. Menyusun Acara pelantikan Sumpah Jabatan.
4. Mengusulkan kenaikan Pangkat dan Jabatan.
5. Mengusulkan pensiun Pegawai / Janda.

6. Menyusun DUK PNS dan Bezeting.
7. Membuat Surat Pernyataan Menduduki Jabatan.
8. Membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
9. Membuat Surat Kenaikan Gaji Berkala.
10. Membuat BA. Sumpah Pejabat Fungsional/Pejabat Struktural/PNS.
11. Membuat KP4 Pegawai.
12. Membuat daftar Nominatif Pegawai.
13. Mengetik Surat Keluar/SKP Pegawai/Surat Tugas.
14. Memberikan laporan kegiatan kepada atasan.

Tabel 40. Capaian IKM “Indeks Pengelolaan Kepegawaian”

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : Indeks Pengelolaan Kepegawaian							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
-	-	-	-	-	4	-	-

Proses pencapaian dan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun berjalan. Belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan pengelolaan kepegawaian berdasarkan aturan yang berlaku. Rencana aksi dalam proses pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan validasi data kepegawaian secara berkala dan dilaporkan secara berjenjang kepada SDMAO Eselon 1.

IKU 25 : Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Tujuan utama budidaya perikanan adalah memproduksi biota akuatik untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, terutama protein, dan bukan pangan.

Kendala Budidaya Ikan antara lain :

- Mahalnya harga pakan.
- Susahnya Ketersediaan benih yang berkualitas.
- Besarnya biaya pembuatan kolam.
- Waktu pengontrolan setiap saat.
- Pemberian pakan harus tepat waktu.
- Susah untuk beradaptasi dengan lingkungan.
- Tidak semua species ikan bisa dibudidayakan.

Kartu KUSUKA merupakan kartu identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI). Yang berhak memiliki kartu ini mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan hingga petambak garam.

Adapun fungsi dari dari kartu KUSUKA ini antara lain sebagai integrasi dari semua kartu identitas Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di KKP menjadi satu Kartu, integrasi satu data stakeholder KKP yang dapat digunakan lintas eselon, pemanfaatan data dengan Kementerian atau Lembaga lain, prasyarat calon penerima bantuan

Selain menjadi identitas pelaku usaha kelautan dan perikanan, Kartu KUSUKA juga berfungsi sebagai basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Tak hanya itu, tapi juga pelayanan, pembinaan, serta sarana pemantauan evaluasi pelaksanaan program KKP.

Tabel 41. Capaian IKM “Pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA”

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon							
Nama Indikator : <i>Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Persen)</i>							
Triwulan II			Realisasi Pada Triwulan II 2023	Perbandingan Triwulan II tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)	Realisasi Terhadap Target Jangka Menengah (%)
Target	Realisasi	Capaian					
-	-	-	-	-	80	-	-

Proses pencapaian dan perhitungan IKU ini dilakukan pada akhir tahun berjalan. Belum ada penggunaan anggaran khusus dalam pencapaian IKU ini namun dalam proses pencapaian IKU ini, BPBL Ambon tetap melakukan proses pendataan pelaku usaha budidaya yang merupakan calon penerima bantuan prioritas tahun 2024, berdasarkan petunjuk teknis bantuan setiap anggota atau kelompok telah terdaftar atau teregistrasi dengan kartu KUSUKA.

Rencana aksi dalam proses pencapaian IKU ini adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyuluh perikanan dan Dinas KP setempat terkait usulan pelaku usaha budidaya ikan harus memiliki akses KUSUKA, sehingga diharapkan setiap kelompok penerima bantuan dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah terintegrasi dengan KUSUKA KKP.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN 2024 pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah sebesar Rp 33,724,991,000, Berdasarkan data dari *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) tahun 2024, realisasi anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai bulan Juni 2024 telah tercapai sebesar Rp. 17,327,043,734, atau sebesar (51.38%).

Pembagian alokasi pagu anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tersebut menurut jenis belanja yaitu: (i) Belanja Pegawai sebesar Rp. 9,253,840,000, (ii) Belanja Barang sebesar Rp 22,871,151,000; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp 1,600,000,000.

Tabel 42. Pagu dan Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon per Jenis Belanja Tahun 2024 dan 2023

JENIS BELANJA	TRIWULAN I TAHUN 2024			TRIWULAN I TAHUN 2023		
	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pegawai	9,253,840,000	4,981,230,676	53.83	8,130,021,000	4,093,846,194	50.35
Barang	22,871,151,000	11,838,295,665	51.76	21,175,153,000	6,027,226,846	28.46
Modal	1,600,000,000	507,517,393	31.72	2,136,000,000	1,202,354,202	56.29
Total	33,724,991,000	17,327,043,734	51.38	31,441,174,000	11,323,427,242	36.01

Persentase anggaran belanja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Barang.

Penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ditujukan untuk memenuhi target beberapa program prioritas yang menjadi tugas pokok dan fungsi utama. Pada tahun 2024, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memiliki beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin diwujudkan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung oleh anggaran yang memadai. Berikut adalah sasaran strategis dan indikator kinerja utama beserta dukungan anggaran:

Tabel 43. Data realisasi anggaran pada indikator kinerja utama (IKU) program prioritas

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Triwulan II	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)	940.200.000	940.200.000	310.217.474	Capaian 32,03%
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	3.070.132.000	2.483.276.995	Capaian 80,89 %
		Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang terdistribusi berdasarkan usulan	75%	2.090.000.000	1.313.062.816	Capaian 62,83 %

		masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)				
		Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75%	269.800.000	247.976.000	Capaian 91,91 %
		Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	6.638.000	6.018.400	Capaian 90,67 %
		Calon induk ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor)	4.090 ekor	1.093.094.000	901.535.760	Capaian 82,48 %
		Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100% 4 Lokasi	400.000.000	399.998.560	Capaian 100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat di Balai Perikanan	75%	9.600.000.000	6.893.730.000	Capaian 71,81 %

		Budidaya Laut Ambon (%)				
		Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%			Anggaran tergabung dengan kegiatan bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat
		Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Unit)	1 unit	1.500.000.000	1.080.371.575	Capaian 72,02 %
3.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang kawasan dan kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	124.882.000	68.602.000	Capaian 54,93 %

		Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	72.311.000	33.311.000	Capaian 46,07 %
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Indeks Profesionalitas ASN di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	85	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Hasil Penilaian Konsensus ZI di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	76	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Persentase penyelesaian LHP BPK atas satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Nilai Rekon SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	93	-	-	Belum ada penganggaran khusus
		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Perikanan	80%	-	-	Belum ada penganggaran khusus

	Budidaya Laut Ambon (%)				
	Nilai Indikator Pelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Nilai)	93,76	-	-	Belum ada penganggaran khusus
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	86%	-	-	Belum ada penganggaran khusus
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	80%	-	-	Belum ada penganggaran khusus
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	77,5	-	-	Belum ada penganggaran khusus
	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	86	-	-	Belum ada penganggaran khusus
	Nilai Pengawasan Kearsipan di Balai Perikanan	75	-	-	Belum ada penganggaran khusus

	Budidaya Laut Ambon (Nilai)				
	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4	-	-	Belum ada penganggaran khusus
	Persentase pelaku usaha perikanan budidaya yang terintegrasi dengan KUSUKA lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	80	-	-	Belum ada penganggaran khusus

Tabel 44. Efisiensi Anggaran pada indikator kinerja utama (IKU) program prioritas

No.	Sasaran Kegiatan 2024	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Anggaran Triwulan II	RO Triwulan II	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)		(7)
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budidaya Meningkatkan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Nilai PNBP BPBL Ambon (Rp)	940.200.000	310.217.474	32,03%	
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Persentase bantuan benih yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	2.483.276.995	84,93%	
		Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL)	75%	1.313.062.816	76,31%	

		yang terdistribusi berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)				
		Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75%	247.976.000	64,79%	
		Persentase bantuan calon induk yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	6.018.400	150%	
		Calon induk ikan laut yang diproduksi di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Ekor)	4.090 ekor	901.535.760	40,86%	
		Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat di Balai Perikanan	100% 4 Lokasi	399.998.560	110%	

		Budidaya Laut Ambon (%)				
		Persentase Sarana dan Prasarana Bioflok yang disalurkan ke masyarakat di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%	6.893.730.000	-	
		Persentase bantuan benih ikan hias laut yang tersalurkan ke masyarakat berdasarkan usulan masyarakat lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	75%		33,33%	
		Prasarana produksi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (Unit)	1 unit	1.080.371.575	-	
3.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang kawasan	Persentase sampel kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji Laboratorium Kesehatan	100%	68.602.000	136,32%	

	dan kesehatan Ikan di Wilayah Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)				
		Persentase sampel Surveillance Resistensi Antimikroba yang diuji Laboratorium Kesehatan ikan dan lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon (%)	100%	33.311.000	105,32%	

3.4. Evaluasi dan Analisis Penggunaan Anggaran

Berikut adalah uraian tentang evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang telah direalisasikan serta analisis capaian kinerja dari sasaran strategis. Pencapaian program prioritas Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon merupakan bagian sasaran kegiatan yakni pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dan Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Efisiensi merupakan ketepatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia (tenaga, waktu, dan biaya), yang terbatas, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat menghasilkan keluaran atau output yang telah ditetapkan. Akan dikatakan efisien jika mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal, tetapi usaha yang dilakukan atau sumber daya yang digunakan minimal. Berdasarkan data pada :

<https://monev.kemenkeu.go.id/app2024/satker/dashboard> nilai efisiensi sementara Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2024 sebesar 16,26%.

3.5. Upaya Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam upaya melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah melakukan beberapa upaya dalam pencapaian target kinerja utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun secara umum penggunaan anggaran 2024 menunjukkan selisih cukup kecil antara nilai pagu dan realisasi anggaran.

Upaya – upaya yang telah dilakukan adalah:

- Penggunaan aplikasi media seperti ZoomUs, Google Meet merupakan aplikasi gratis dalam video conference yang dapat diaplikasikan dengan mudah, hal ini biasanya digunakan dalam koordinasi kegiatan prioritas, maupun pelaksanaan seminar, bimtek maupun workshop bagi peningkatan kapasitas SDM BPBL Ambon.
- Mencari sumber alternatif pakan ikan (Pakan ikan segar) sehingga biaya pakan dapat ditekan.
- Melakukan perhitungan secara cermat terhadap kebutuhan bahan pendukung produksi sehingga ketersediaanya mencukupi.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Laporan Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Pencapaian target kinerja pada triwulan I tahun 2024 telah mencapai target.

4.2. Permasalahan/Kendala dihadapi

Pada tahun 2024, belum ada kendala yang berarti dalam proses pencapaian indikator kinerja utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, walaupun masih terdapat sedikit kendala teknis seperti masih ditemukannya sistem filterisasi media yang kurang maksimal yang berdampak pada kurang optimalnya kualitas media pemeliharaan yang siap digunakan dalam proses pemeliharaan ikan, banyaknya kematian benih ikan, serangan ektoparasit, bakteri maupun virus, menurunnya kualitas media pemeliharaan dan terjadi blooming protozoa tertentu di perairan akibat perubahan parameter lingkungan secara signifikan namun realisasi bantuan masih dapat memenuhi target serta masih terbatasnya produksi telur dari beberapa jenis komoditas seperti kerapu bebek dan macan.

Capaian untuk IKU Nilai PBNP yang di triwulan II masih dibawah target triwulan yang dikarenakan proses penjualan komoditas dilakukan secara bertahap dikarenakan terbatasnya permintaan pasar.

4.3. Langkah Perbaikan

Beberapa upaya telah dilakukan dalam memenuhi pencapaian target IKU yang menjadi tugas utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Langkah perbaikan yang dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan perawatan sand filter dan pembersihan sarana filter guna meningkatkan sistem filtrasi media pemeliharaan pada fasilitas produksi.
- Telah dilakukan perbanyak sarana heater sebagai bentuk antisipasi ketika terjadi penurunan suhu secara signifikan dan perbaikan sarana filtrasi media guna menekan tingginya mortalitas benih ikan.
- Telah dilakukan grading secara rutin terhadap benih ikan konsumsi seperti kakap putih, bubar dan kerapu, meningkatkan frekuensi pemberian pakan, mengurangi padat tebar sehingga kanibalisme benih dapat ditekan.
- Melakukan pengujian sampel HPI secara berkala pada semua fasilitas budidaya yang dimiliki.
- Melakukan perbaikan sarana dan teknik kultur pakan alami skala massal untuk meminimalisir kegagalan dalam kegiatan produksi pakan alami untuk menunjang kegiatan pemeliharaan larva ikan.
- Pemeliharaan ikan yang sesuai SOP dan penanganan ikan yang sakit dilakukan sesuai gejala klinis dan dengan penanganan yang cepat dan tepat.
- Meningkatkan koordinasi dan promosi kepada stakeholder ketersediaan komoditas untuk meningkatkan nilai PNBPN Balai di waktu kedepan.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi BPBL Ambon, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun mendatang. Secara internal laporan kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders* /mitra kerja, sehingga kontribusi BPBL Ambon dalam pembangunan perikanan budidaya dapat lebih ditingkatkan.

LAMPIRAN

Tahun Anggaran : 2024
Kementerian/Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
Nilai Kinerja : 108.00 %
Nilai Evaluasi : 108.00 %

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target		Capaian	Data Dukung		Keterangan
		2024	Juni	Juni	Kinerjaku	Google Drive Sakip	
IKS.1	Nilai PNBP Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Rupiah)	968,400,000.00	377,444,941.00	310,217,474.00	310,217,474.00	310,217,474.00	Sesuai
IKS.02.1	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	60	64.79	64.79	64.79	Sesuai
IKS.02.2	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	50	76.31	76.31	76.31	perhitungan progress kegiatan dilakukan setiap semester tahun
IKS.02.3	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	50	150	150	150	perhitungan progress kegiatan dilakukan setiap semester tahun
IKS.02.4	Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	60	84.93	84.93	84.93	Sesuai
IKS.02.5	Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	4,090.00	1,350.00	1,671.00	1,671.00	1,671.00	Sesuai
IKS.02.6	Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	100	100	110	110	110	Sesuai
IKS.02.7	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	75	0				Pengukuran dilakukan akhir tahun
IKS.02.8	Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75	30	33.33	33.33	33.33	Pengukuran dilakukan akhir tahun
IKS.02.9	Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	1	0		-	-	- Pengukuran dilakukan akhir tahun
IKS.03.1	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	100	50	136.32	136.32	136.32	Sesuai
IKS.03.2	Persentase Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR) (Persen)	100	50	105.71	105.71	105.71	Sesuai
IKS.04.1	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	85	80	79.97	79.97	79.97	perhitungan progress kegiatan dilakukan setiap semester tahun
IKS.04.10	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	86	86	100	100	100	Sesuai
IKS.04.11	Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	75	0		-	-	- perhitungan progress kegiatan dilakukan pada akhir tahun
IKS.04.12	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4	0		-	-	- perhitungan progress kegiatan dilakukan pada akhir tahun
IKS.04.13	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80	0		-	-	- perhitungan progress kegiatan dilakukan pada akhir tahun

IKS.04.2	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76	0		-	-	perhitungan progress kegiatan dilakukan pada akhir tahun
IKS.04.3	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen)	100	0		-	-	perhitungan progress kegiatan dilakukan pada akhir tahun
IKS.04.4	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	82	0		-	-	perhitungan progress kegiatan dilakukan pada akhir tahun
IKS.04.5	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)	80	80	100	100	100	Sesuai
IKS.04.6	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	93.76	83	96.61	96.61	96.61	perhitungan progress kegiatan dilakukan setiap semester tahun
IKS.04.7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	86	0		-	-	perhitungan progress kegiatan dilakukan setiap semester tahun
IKS.04.8	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80	0		-	-	perhitungan progress kegiatan dilakukan pada akhir tahun
IKS.04.9	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80	0		-	-	perhitungan progress kegiatan dilakukan pada akhir tahun



Unit yang diverifikasi

Sarwono, S.St.Pi

Jakarta, 12 Juli 2024

Telah diverifikasi oleh

Kamil

Insan Kamil, A.Md.Pi, S.P



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.4627/DJPB.1/KU.340/VII/2024 11 Juli 2024
Sifat : -
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Capaian Realisasi PNBP Lingkup DJPB
Triwulan II Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan II Tahun 2024, bersama ini disampaikan Capaian Realisasi PNBP Lingkup DJPB Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Diperoleh dari jumlah Pendapatan Fungsional dan Umum Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak UPT dan BLU DJPB periode 1 Januari 2024 s.d. 30 Juni 2024 (Triwulan II 2024).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak UPT dan BLU DJPB pada periode pengukuran hingga periode Triwulan II Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar **33,99%** (sebesar **Rp16.989.598.627** dari target PNBP DJPB sebesar **Rp. 49.985.496.000**).
3. Rincian capaian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari masing-masing UPT dan BLU DJPB disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B.4627/DJPB.1/KU.340/VII/2024

Tanggal : 11 Juli 2024

DAFTAR NAMA PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Kepala BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
2. Plh. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
3. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4. Kepala BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
5. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
6. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
7. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
8. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
9. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
10. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
11. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
12. Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
13. Kepala BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
14. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem
15. Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Direktorat Jenderal,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

No.	KODE SATKER	NAMA SATUAN KERJA	TARGET SESUAI PK	REALISASI S/D CAPAIAN IKU	% SESUAI PK	S / D BULAN
1	2	3	4	5	6	7
		REALISASI PENDAPATAN PNBP				
1	632462	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Pusat)	Rp 50.000.000	Rp 2.761.307.056	5522,61	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 50.000.000	Rp 369.024.999	738,05	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 2.392.282.057		
2	445393	BLU Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Rp 27.358.090.000	Rp 1.282.326.746	4,69	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 27.358.090.000	Rp 173.064.402	4,35	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum		Rp 1.016.980.864		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 92.281.480		
3	239192	BLU Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Rp 4.500.400.000	Rp 1.175.547.249	26,12	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 4.500.400.000	Rp 46.279.764	25,96	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum		Rp 1.121.833.851		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 7.433.634		
4	238734	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Rp 1.590.081.000	Rp 962.313.244	60,52	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.590.081.000	Rp 952.701.914	59,92	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 9.611.330		
5	427706	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Rp 1.189.308.000	Rp 526.578.609	44,28	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.189.308.000	Rp 526.561.418	44,27	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 17.191		
6	567350	BLU Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Rp 3.552.374.000	Rp 4.382.963.067	123,38	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 3.552.374.000	Rp 577.223.050	122,74	
	II	Pendapatan Badan Layanan Umum		Rp 3.782.869.156		
	III	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 22.870.861		
7	237657	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi	Rp 1.555.000.000	Rp 708.760.388	45,58	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.555.000.000	Rp 667.089.000	42,90	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 41.671.388		
8	567680	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Rp 1.683.158.000	Rp 1.416.526.433	84,16	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp 1.683.158.000	Rp 1.365.696.836	81,14	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp -	Rp 50.829.597		

9	567385	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee	Rp	1.232.517.000	Rp	388.516.588	31,52	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.232.517.000	Rp	383.566.226	31,12	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	4.950.362		
10	567474	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Rp	1.274.795.000	Rp	575.253.460	45,13	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.274.795.000	Rp	564.413.191	44,27	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	10.840.269		
11	567584	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	Rp	1.214.288.000	Rp	612.914.156	50,48	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.214.288.000	Rp	564.278.793	46,47	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	48.635.363		
12	538911	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu	Rp	1.212.600.000	Rp	307.319.735	25,34	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.212.600.000	Rp	305.260.108	25,17	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	2.059.627		
13	567720	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Rp	968.400.000	Rp	310.217.474	32,03	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	968.400.000	Rp	297.929.240	30,77	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	12.288.234		
14	567762	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Rp	781.085.000	Rp	576.401.834	73,80	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	781.085.000	Rp	409.006.584	52,36	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	167.395.250		
15	567800	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	Rp	1.100.000.000	Rp	515.925.070	46,90	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	1.100.000.000	Rp	515.925.070	46,90	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	-		
16	445394	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem	Rp	723.400.000	Rp	515.925.070	71,32	CAPAIAN IKU
	I	Pendapatan Fungsional dan Umum	Rp	723.400.000	Rp	486.224.048	67,21	
	II	Pendapatan Non Anggaran	Rp	-	Rp	503.470		
		JUMLAH PENDAPATAN FUNGSIONAL + UMUM (I)	Rp	49.985.496.000	Rp	8.204.244.643	28,26	
		JUMLAH PENDAPATAN BLU (II)			Rp	5.921.683.871		
		JUMLAH NON ANGGARAN (III)	Rp	-	Rp	2.863.670.113		
		JUMLAH PENDAPATAN I + II + III	Rp	49.985.496.000	Rp	16.989.598.627	33,99	CAPAIAN IKU



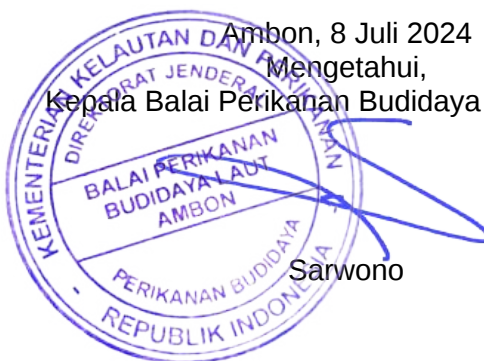
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAM www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 2. DATA DUKUNG PERSENTASE BANTUAN BIBIT RUMPUT LAUT
YANG DISALURKAN s.d TRIWULAN II TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NO	JENIS IKAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN BIBIT RUMPUT LAUT (%)			
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Bibit Rumput Laut	7100 Kg atau 100%	4600	0	4600	64,79
	TOTAL		4600	0	4600	64,79

Ambon, 8 Juli 2024
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono

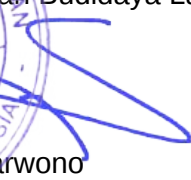


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 3. DATA DUKUNG PERSENTASE BANTUAN SARANA KEBUN BIBIT
RUMPUT LAUT YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT (KBRL)
s.d TRIWULAN II TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NO	JENIS BANTUAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN KEBUN BIBIT RUMPUT LAUT (%)			
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1.	KBRL	38 Paket atau 75%	10	19	29	76,31
	TOTAL		10	19	29	76,31

Ambon, 8 Juli 2024
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Sarwono





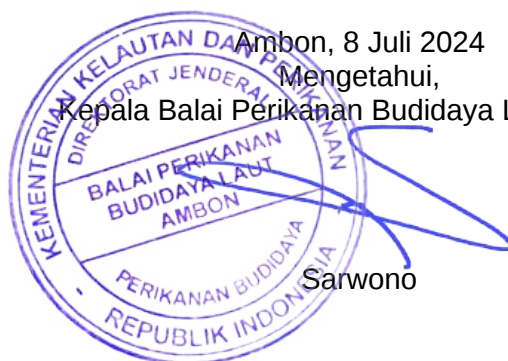
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

**IKU 4. DATA DUKUNG PERSENTASE BANTUAN CALON INDUK YANG
DISALURKAN KE MASYARAKAT s.d TRIWULAN II TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

NO	JENIS BANTUAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN CALON INDUK IKAN LAUT (%)			
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Calon Induk Ikan Laut	20 Ekor atau 75%	0	30	30	150
	TOTAL		0	30	30	150

Ambon, 8 Juli 2024
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono



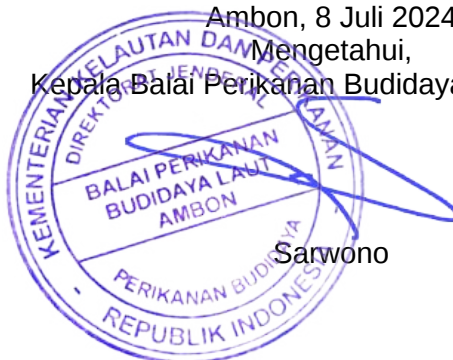
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAM www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 5. DATA DUKUNG PERSENTASE BANTUAN BENIH IKAN LAUT
YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT s.d TRIWULAN II TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NO	JENIS IKAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN BENIH IKAN KONSUMSI LAUT (EKOR)			
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Kakap Putih	538.000	406.900	50.000	456.900	84,93
2.	Bubara		-	-	-	
3.	Kerapu Macan		-	-	-	
4.	Kerapu Bebek		-	-	-	
TOTAL			406.900	50.000	456.900	84,93

Ambon, 8 Juli 2024
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Sarwono



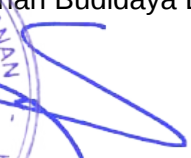
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAM www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 6. DATA DUKUNG PERSENTASE CALON INDUK IKAN LAUT YANG
DIPRODUKSI s.d TRIWULAN II TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NO	JENIS IKAN	TARGET	CAPAIAN PRODUKSI CALON INDUK (EKOR)			PERSENTASE CAPAIAN
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL	
1.	Kakap Putih	4090	730	500	1230	40,86
2.	Bubara		20	-	20	
3.	Clownfish		371	50	421	
	TOTAL		1121	550	1671	40,86

Ambon, 8 Juli 2024
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon


Sarwono





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAM www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 7. DATA DUKUNG PERSENTASE DISEMINASI TEKNOLOGI BUDIDAYA
IKAN TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

No.	Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi	Keterangan	Jumlah Peserta	Persentase Capaian Kegiatan
1.	Diseminasi Kegiatan Budidaya Laut Kabupaten kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara	1 Lokasi (Anggota DPR RI Komisi IV Ibu Alien Mus)	100 Orang	110%
2.	Diseminasi Kegiatan Budidaya Laut Kabupaten Buru, Provinsi Maluku	1 Lokasi (Anggota DPR RI Komisi IV Ibu Saadiah Uluputy, ST)	120 Orang	
3.	Diseminasi Kegiatan Budidaya Ikan Kota Ambon, Provinsi Maluku	1 Lokasi (Anggota DPR RI Komisi IV Bapak Ir. Abdulah Tuasikal, M.Si)	120 Orang	
4.	Diseminasi Kegiatan Budidaya Ikan di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan	1 Lokasi (Anggota DPR RI Komisi IV Bapak H. Sulaeman L Hamzah)	100 Orang	
Capaian Kegiatan			440 Orang	110%



Ambon, 8 Juli 2024
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Sarwono



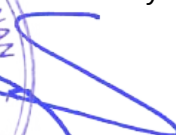
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 9. DATA DUKUNG PERSENTASE BANTUAN BENIH IKAN HIAS LAUT
YANG DISALURKAN KE MASYARAKAT s.d TRIWULAN II TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NO	JENIS IKAN	TARGET BANTUAN	CAPAIAN BANTUAN BENIH IKAN HIAS LAUT (EKOR)			
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Clownfish	3.000	1000	0	1000	33,33
			-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
	TOTAL		1000	0	1000	33,33

Ambon, 8 Juli 2024
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon


Sarwono



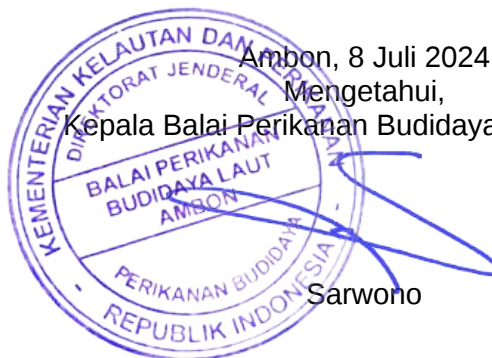


KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAN www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 11. DATA DUKUNG PERSENTASE LAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN
IKAN DAN LINGKUNGAN s.d TRIWULAN II TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NO	JENIS SAMPEL	TARGET SAMPEL	CAPAIAN UJI SAMPEL LABORATORIUM (SAMPEL)			PERSENTASE CAPAIAN
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL	
1.	Kualitas Air	615	558	136	694	136,32
2.	Mikrobiologi	135	284	63	347	
3.	Biologi Molekuler	51	43	8	51	
	TOTAL	801	885	207	1092	136,32



Ambon, 8 Juli 2024
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Sarwono



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

JALAN LAKSDYA LEO WATTIMENA, WAIHERU, BAGUALA KOTA AMBON 97232
TELEPON 0811471667, EMAIL : ambonbpbl@gmail.com
LAMAM www.kkp.go.id/djpb/bpblambon

IKU 12. DATA DUKUNG PERSENTASE PENGUJIAN SAMPEL AMR
s.d TRIWULAN II TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

NO	JENIS SAMPEL	TARGET SAMPEL	CAPAIAN UJI SAMPEL AMR (SAMPEL)			PERSENTASE CAPAIAN
			BULAN SEBELUMNYA	BULAN JUNI	TOTAL	
1.	AMR	35	27	10	37	105,71
	TOTAL		27	10	37	105,71

Ambon, 8 Juli 2024
Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
Sarwono





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.4668/DJPB.1/KP.720/VII/2024
Lampiran : 1 berkas
Hal : Capaian IKU IP-ASN Semester I Tahun 2024
Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

12 Juli 2024

Yth. Daftar Terlampir

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi nomor 1132/SJ.3/TU.140/VII/2024, tanggal 12 Juli 2024 hal Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan II Semester I Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya per tanggal 11 Juli 2023 dari hasil pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada *dashboard* IP ASN yang berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP yaitu **81,70 (kategori tinggi)**, yang terdiri dari **Kualifikasi 21,01; Kompetensi 30,10; Kinerja 25,58; dan Disiplin 5,00**. Adapun data capaian dapat dilihat pada *dashboard* di link <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/history?date=2024-07-11&q=>, atau telah kami rangkum sebagaimana pada lampiran 2.
2. Target Pengukuran IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada semester 1 adalah 80. Capaian Pengukuran IP ASN lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Semester I Tahun 2024 adalah **81,70**. Dengan Demikian Capaian IP ASN pada Semester I tahun 2024 adalah **102,12%** dari target yang telah ditetapkan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
2. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi.

Lampiran 1 Surat Dinas

Nomor : B.4668/DJPB.1/KP.720/VII/2024

Tanggal : 12 Juli 2024

Daftar Penerima Surat

A.	Pusat
1.	Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
2.	Direktur Perbenihan
3.	Direktur Pakan dan Obat Ikan
4.	Plt. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya
5.	Ketua Tim Kerja Program
B.	UPT
1.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
2.	Plh. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
3.	Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
4.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
5.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
6.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
7.	Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
8.	Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam, Jambi
9.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
10.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
11.	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
12.	Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
13.	Kepala Balai Layanan Usaha dan Produksi Perikanan Budidaya Karawang
14.	Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem
15.	Kepala Balai Pengujian Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Gemi Triastutik

Lampiran 2 Surat Dinas

Nomor : B.4668/DJPB.1/KP.720/VII/2024

Tanggal : 12 Juli 2024

**REKAPITULASI NILAI INDEKS PROFESIONALITAS ASN
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
PER TANGGAL 11 JULI 2024**

No.	Unit Kerja	Komponen IP ASN				Total	Kategori
		Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin		
1.	Sekretariat DJPB	21,06	31,19	25,93	5,00	83,18	Tinggi
2.	Dit Kawasan dan Kesehatan Ikan	21,77	29,41	27,31	5,00	83,49	Tinggi
3.	Dit Perbenihan	21,56	38,19	25,00	5,00	89,75	Tinggi
4.	Dit Pakan dan Obat Ikan	21,35	30,71	25,68	5,00	82,74	Tinggi
5.	Dit Produksi dan Usaha Budidaya	21,94	24,15	25,14	5,00	76,23	Sedang
6.	BBPBAP Jepara	20,86	29,00	25,85	5,00	79,87	Sedang
7.	BBPBAT Sukabumi	21,12	23,14	24,68	5,00	73,93	Sedang
8.	BBPBL Lampung	20,55	29,88	25,85	5,00	81,28	Tinggi
9.	BPBAP Situbondo	20,91	28,69	25,32	5,00	79,92	Sedang
10.	BPBAP Takalar	20,69	26,66	26,60	5,00	78,96	Sedang
11.	BPBAP Ujung Batee	21,31	25,26	25,12	5,00	76,68	Sedang
12.	BPBAT Mandiangin	20,89	38,06	25,83	5,00	89,35	Tinggi
13.	BPBAT Sei Gelam, Jambi	20,89	40,00	25,16	5,00	91,05	Sangat Tinggi
14.	BPBAT Tatelu	20,96	27,59	25,28	5,00	78,83	Sedang
15.	BPBL Ambon	29,91	28,42	25,64	5,00	79,97	Sedang
16.	BPBL Batam	20,84	26,85	25,98	5,00	78,67	Sedang
17.	BPBL Lombok	20,71	33,74	25,00	5,00	84,46	Tinggi
18.	BLUPPB Karawang	20,39	26,76	25,00	5,00	77,15	Sedang
19.	BPIUUK Karangasem	20,81	30,97	27,04	5,00	83,82	Tinggi
20.	BPKIL Serang	21,14	33,43	25,00	5,00	84,57	Tinggi
Rata-Rata		21,01	30,10	25,58	5,00	81,70	Tinggi

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Gemi Triastutik



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAM www.kkp.go.id

BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL NOMOR - 2983.08.07/ITJ/PL.420/VII/2024

Pada hari ini, tanggal **Delapan** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua empat**, telah dilakukan pembahasan dan penilaian atas data dukung penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang disampaikan auditi: BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

Dihadiri oleh:

Tim Auditi:

1. Nama: Sarwono, S.St.Pi.
NIP: 198308152005021001
Jabatan : Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon

Tim Pengawasan:

1. Nama: Ir. Nur Arif Azizi, M.M
NIP: 196008211986031004
Jabatan : Pengendali Mutu/Supervisor
2. Nama: Evin Nurviani, S.Pi, M.Ak, QIA
NIP: 197608112003122002
Jabatan : Pengendali Teknis
3. Nama: Herimawan Masykur F, S.Pi
NIP: 197804112005021001
Jabatan : Ketua Tim
4. Nama: Erwyansyah, S.Pi, M.Si
NIP: 197611092002121004
Jabatan : Anggota Tim
5. Nama: Adelaide Siregar, SE
NIP: 198110132005021003
Jabatan : Anggota Tim
6. Nama: Denis Puspitasari, S.Pi
NIP: 197904012005022002
Jabatan : Anggota Tim
7. Nama: Yan Purwadi K., S.St.Pi
NIP: 198201152005021002
Jabatan : Anggota Tim
8. Nama: Mohammad Ikhwan
NIP: 198902012020121003
Jabatan : Anggota Tim
9. Nama: Reezali Raharjaya, ST
NIP: 199403232018011002
Jabatan : Anggota Tim
10. Nama: Minakhus Sania
NIP: 199505282020122003
Jabatan : Anggota Tim
11. Nama: Dody Alamsyah A.S. Hasibuan, S.Pi
NIP: 199204082019021001
Jabatan : Anggota Tim
12. Nama: Baseni, S.St.Pi
NIP: 199003192015032004
Jabatan : Anggota Tim
13. Nama: Tiara Dwicahyani, S.Pi.
NIP: 199411132019022006
Jabatan : Anggota Tim
14. Nama: Deny Tri Prastyo, S.Pi
NIP: 199410252020121002
Jabatan : Anggota Tim

Dalam proses pemantauan/penilaian terhadap bukti pendukung tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP nomor: T.135/ITJ.3/HP.110/III/2024, perihal Audit Kinerja TA 2023-2024 pada Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon sesuai dengan Surat Tugas Nomor: B.3360.1/ITJ.3/KP.440/VI/2024, diperoleh hasil sebagaimana tertuang pada lampiran berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Berita Acara Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini bersifat penetapan sementara dan akan dilakukan validasi dan penetapan oleh Inspektur atas nama Inspektur Jenderal

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**Dikeluarkan pada tanggal:
08 Juli 2024**

Pihak yang menyepakati,



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengendali Mutu/Supervisor

Ir. Nur Arif Azizi, M.M
NIP. 196008211986031004

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Judul LHP : Audit Kinerja TA 2023-2024 pada Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon
Nomor LHP/Surat : T.135/ITJ.3/HP.110/III/2024
Tanggal Terbit : 09 Maret 2024
Provinsi : MALUKU

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN

LAMPIRAN BATL

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perubahan Pekerjaan Tidak Dilakukan sesuai Mekanisme Klausul Kontrak	01.1.4	1.	Memberi teguran tertulis kepada PPK Satker BPBL Ambon untuk mentaati mekanisme pelaksanaan kontrak sesuai klausul kontrak yang dibuat dan peraturan perundang-undangan	0.00	TL 27 MARET 2024 Surat Teguran Kepala BPBL Ambon kepada PPK Nomor:B.654/BPBLA/HP.510/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal teguran agar mentaati mekanisme pelaksanaan kontrak sesuai klausul kontrak yang dibuat dan peraturan perundang-undangan	0.00	TUNTAS
Perubahan Pekerjaan Tidak Dilakukan sesuai Mekanisme Klausul Kontrak	01.1.4	2.	Menginstruksikan kepada PPK Satker BPBPL Ambon supaya menarik kelebihan pembayaran atas perubahan harga satuan pekerjaan senilai Rp650.000,00 dari CV Miko Sejahtera senilai Rp350.000,00 dan CV Miracle Sentosa Abadi senilai Rp300.000,00 untuk disetor ke Kas Negara	650,000.00	TL 27 Maret 2024 1. Surat Instruksi Kepala BPBL Ambon kepada PPK Nomor:B.655/BPBLA/HP.510/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal supaya menarik kelebihan pembayaran atas perubahan harga satuan pekerjaan senilai Rp650.000,00 dengan rincian dari CV Miko Sejahtera senilai Rp350.000,00 dan CV Miracle Sentosa Abadi senilai Rp300.000,00 untuk disetor ke Kas Negara 2. Bukti setor senilai Rp350.000 atas pengembalian CV Miko Sejahtera dengan NTPN:4FD8C1JNFUSL500R tanggal 15 Maret 2024 3. Bukti setor senilai Rp300.000 atas pengembalian CV Miracle Sentosa dengan NTPN:2E7D255DF966PP4G tanggal 15 Maret 2024	650,000.00	TUNTAS
Perubahan Pekerjaan Tidak Dilakukan sesuai Mekanisme Klausul Kontrak	01.1.4	3.	Menginstruksikan kepada PPK Satker BPBPL Ambon supaya melengkapi Berita Acara negosiasi teknis dan harga atas perubahan pekerjaan tambah-kurang	0.00	TL 28 Maret 2024 Surat Instruksi Kepala BPBL Ambon kepada PPK Nomor:B.655/BPBLA/HP.510/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal supaya melengkapi Berita Acara negosiasi teknis dan harga atas perubahan pekerjaan tambah-kurang. Kekurangan: Sesuai rekomendasi yang diminta adalah BA negosiasi teknis dan harga, justifikasi teknis dapat dijadikan sebagai data dukung lampiran sbg pendukung negosiasi, lebih lanjut agar dibuatkan tabel sanding antara teknis/harga yaitu hps-penawaran-hasil negonya dan judul BA dirubah menjadi Berita Acara negosiasi teknis dan harga. TL 26 Juni 2024 Telah dilengkapi BA Negosiasi atas pekerjaan pemeliharaan Gedung Ambon	0.00	TUNTAS
Tidak Terdapat Output Pekerjaan Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana	01.1.3	4.	Kepala BPBL Ambon agar memberi teguran tertulis kepada PPK dan PPSPM Satker BPBL Ambon untuk cermat dalam menerima hasil pekerjaan Penyedia dan Konsultan Pengawas sesuai dengan Kontrak sebelum melakukan pembayaran	0.00	TL 28 MARET 2024 SURAT TEGURAN KEPALA BPBL AMBON KEPADA PPK DAN PPSPM NOMOR:B.656/BPBLA/HP.510/III/2024 TANGGAL 13 MARET 2024 PERIHAL TEGURAN AGAR CERMAT DALAM MENERIMA HASIL PEKERJAAN PENYEDIA DAN KONSULTAN PENGAWAS SESUAI DENGAN KONTRAK SEBELUM MELAKUKAN PEMBAYARAN.	0.00	TUNTAS

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tidak Terdapat Output Pekerjaan Konsultan Pengawas dan Kontraktor Pelaksana	01.1.3	5.	Kepala BPBL Ambon agar menginstruksikan kepada PPK Satker BPBL Ambon untuk menarik kelebihan pembayaran kepada Penyedia dan Konsultan Pengawas dengan total senilai Rp5.786.600,00, yaitu kepada 1) CV Cahaya Multi Inti senilai Rp1.000.000,00; 2) CV Miracle Sentosa Abadi senilai Rp2.500.000,00; 3) Tri Putra Konsultan senilai Rp333.000,00; 4) CV Griya Persada senilai Rp1.332.000,00; 5) PT. Muslimatrial senilai Rp621.600,00, untuk disetor ke Kas Negara	5,786,600.00	TI 28 Maret 2024 1. Surat Instruksi Kepala BPBL Ambon kepada PPK Nomor:B.657/BPBLA/HP.510/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal supaya menarik kelebihan pembayaran kepada Penyedia dan Konsultan Pengawas dengan total senilai Rp5.786.600,00, yaitu kepada 1) CV Cahaya Multi Inti senilai Rp1.000.000,00; 2) CV Miracle Sentosa Abadi senilai Rp2.500.000,00; 3) Tri Putra Konsultan senilai Rp333.000,00; 4) CV Griya Persada senilai Rp1.332.000,00; 5) PT. Muslimatrial senilai Rp621.600,00, untuk disetor ke Kas Negara; 2. Bukti setor CV Cahaya Multi Inti senilai Rp1.000.000,00; dengan NTPN:9E20461QV3OJ6PL7 tanggal 15 Maret 2024 3. Bukti setor CV Miracle Sentosa Abadi senilai Rp2.500.000,00; dengan NTPN:D5F1855DF966PRVL tanggal 15 Maret 2024 4. Bukti setor Tri Putra Konsultan senilai Rp333.000,00; dengan NTPN:841E548VVEJQCTBR tanggal 20 Maret 2024 5. Bukti setor CV Griya Persada senilai Rp1.332.000,00; dengan NTPN:C966D55DF966Q2CI tanggal 20 Maret 2024 6. Bukti setor PT. Muslimatrial senilai Rp621.600,0; dengan NTPN:1BD7455DF967QOPN tanggal 20 Maret 2024	5,786,600.00	TUNTAS
Penghunian Rumah Negara Belum dilengkapi dengan Surat izin Penghunian (SIP)	02.8.73	6.	Kepala BPBL Ambon selaku KPB agar membuat Surat Usulan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tentang Surat Izin Penghunian Rumah Negara	0.00	TL 28 Maret 2024 TELAH DITINDAKLANJUTI DENGAN SURAT KEPALA BPBL AMBON KEPADA SEKRETARIS DIRJEN PERIKANAN BUDI DAYA NOMOR B.749/BPBLA/PL.780/III/2024, TANGGAL 22 MARET 2024, HAL PERMOHONAN PENERBITAN SURAT IZIN PENGGUNAAN RUMAH NEGARA PADA BPBL AMBON. NAMUN DOKUMEN YANG DISAMPAIKAN TIDAK SESUAI. KEKURANGAN: SURAT PERMOHONAN penghunian YANG DILENGKAPI DENGAN LAMPIRAN DARI MASING-MASING CALON PENGHUNI 1) FORMULIR PERMOHONAN; 2) FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN KEPEGAWAIAN TERAKHIR; 3) PASPHOTO PEMOHON UKURAN 3 X 4 CM, SEBANYAK 5 (LIMA) LEMBAR; 4) FOTOKOPI KARTU KELUARGA; 5) FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK; DAN 6) SURAT PERNYATAAN UNTUK MENTAATI KEWAJIBAN DAN LARANGAN SESUAI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 22/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGDAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA. TL 19 Juni 2024 TELAH DITINDAKLANJUTI DENGAN: 1. SURAT KEPALA BPBL AMBON KEPADA SEKRETARIS DIRJEN PERIKANAN BUDI DAYA NOMOR B.1234/BPBLA/PL.780/VI/2024, TANGGAL 14 JUNI 2024, HAL USULAN PENERBITAN SURAT IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA PADA SATKER BPBL AMBON; 2. DATA DUKUNG PENGHUNIAN BERUPA FORMULIR PERMOHONAN, FOTOKOPI SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR, FOTOKOPI KARTU KELUARGA, FOTOKOPI KTP, SURAT PERNYATAAN UNTUK MENTAATI KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA PAS FOTO AN SARWONO, ERDY ASMAUL BASIR, ROBIANTA NURHADI, SALAMUDIN PAPUANGAN, IMAM NURHADI, HARIYANO, UMAR RIFAI, AKHMAD SURURI, LILIK FAHRUDIN, AGAM TRI WIBOWO, DINAR ROOSDINAR, SRIYANTI, ABDUL GANI, RAMLAN, HAMSAH AMIRUDDIN, KALASUM TUANKOTA, WANDA ELITA LUMAMULY, WA NUR AINI, ANDI IMA'DONNA, RAHMAZANI, DEMIATY RAKIB, SUNARTO, DODY YUNianto, WISNU FEBRYAN WIDYANTORO, HAMIDA PATTAH DAN IKAAMBAR SARI.	0.00	TUNTAS

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Belum Tertib	02.6.1	7.	Kepala BPBL Ambon agar menginstruksikan kepada Operator BMN untuk melakukan proses penghapusan terhadap barang rusak berat dan aset tetap lainnya berupa ikan air laut budidaya	0.00	TI 28 Maret 2024 1. Surat Instruksi Kepala BPBL Ambon kepada PPK Nomor:B.650/BPBLA/HP.510/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal supaya melakukan proses penghapusan terhadap barang rusak berat dan aset tetap lainnya berupa ikan air laut budidaya Kekurangan: Melakukan proses penghapusan terhadap barang rusak berat dan aset tetap lainnya berupa ikan air laut budidaya TL 19 Juni 2024 Telah ditindaklanjuti dengan; 1. Surat Persetujuan Penghapusan Nomor B.2315/DJPB.I/PL.750/III/2024, tanggal 28 Maret 2024, hal Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) karena sebab lain berupa aset tetap lainnya pada BPBL Ambon berupa 10 ekor calon induk ikan napoleon senilai Rp60.000.000,00; 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 405/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan KKP yang dikelola oleh DJPB pada BPBL Ambon berupa 10 ekor calon induk ikan napoleon senilai Rp60.000.000,00.	0.00	TUNTAS
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Belum Tertib	02.6.1	8.	Kepala BPBL Ambon agar menginstruksikan kepada Operator BMN untuk mengusulkan BMN yang belum dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP)	0.00	belum terdapat tindak lanjut TL 28 Maret 2024 Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat dari Kepala BPBL Ambon kepada Operator BMN Nomor B.650/BPBLA/HP.510/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal instruksi untuk melakukan proses penghapusan terhadap barang rusak berat dan aset tetap lainnya, mengusulkan BMN yang belum dilakukan Penetapan Status Penggunaannya, dan melakukan proses perubahan kodefikasi barang sesuai ketentuan 2. Surat dari Kepala BPBL Ambon kepada Sekretaris Ditjen PB Nomor B.696/BPBLA/PL.710/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 perihal Usulan Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Peralatan dan Mesin di bawah 100 juta; 3. Surat dari BPBL Ambon kepada Sekretaris Ditjen PB Nomor B.770/BPBLA/PL.710/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Usulan Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus; 4. Surat dari BPBL Ambon kepada Sekretaris Ditjen PB Nomor B.771/BPBLA/PL.710/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Usulan Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Peralatan dan Mesin Di Atas 100 juta; 5. Surat dari BPBL Ambon kepada Sekretaris Ditjen PB Nomor B.772/BPBLA/PL.710/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Usulan Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Gedung dan Bangunan; 6. Nota Dinas dari Sekretaris Ditjen PB kepada Kepala Biro Keuangan Nomor 693/DJPB.1/PL.710/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Usulan Penetapan BMN.	0.00	TUNTAS

Temuan Pengawasan		No	Rekomendasi		Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan		Penetapan Status Sementara
Ringkasan Temuan	Kode Temuan		Uraian Ringkasan	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Tindak Lanjut dan Hasil Penilaian Tim TLRHP	Nilai Tindak Lanjut (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Belum Tertib	02.6.1	9.	Kepala BPBL Ambon agar menginstruksikan kepada Operator BMN untuk melakukan proses perubahan kodefikasi barang sesuai ketentuan	0.00	belum terdapat tindak lanjut TL 28 Maret 2024 Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Kepala BPBL Ambon kepada Operator BMN Nomor B.650/BPBLA/HP.510/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal instruksi untuk melakukan proses penghapusan terhadap barang rusak berat dan aset tetap lainnya, mengusulkan BMN yang belum dilakukan Penetapan Status Penggunaannya, dan melakukan proses perubahan kodefikasi barang sesuai ketentuan; 2. ST an Imam Nurhadi untuk melaksanakan tugas inventarisasi BMN di BPBL Ambon; 3. Surat Keterangan dari Imam Nurhadi yang menerangkan bahwa saat ini belum bisa dilakukan input transaksi Tahun 2024 pada Aplikasi SAKTI Modul Aset dan Persediaan sampai dengan selesainya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 dikarenakan Modul Pelaporan belum dilakukan penutupan periode 14 - Tahun 2023. Kekurangan: bukti perubahan kodefikasi barang (jika sudah bisa input di SAKTI) TL 19 Juni 2024 Telah ditindaklanjuti dengan bukti perubahan kodefikasi barang pada aplikasi SAKTI (reklas keluar tugu/tanda batas administrasi kepemilikan sebanyak 2 unit dan reklas masuk pagar permanen sebanyak 2 unit).	0.00	TUNTAS
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Belum Tertib	02.6.1	10.	Kepala BPBL Ambon agar mengusulkan anggaran untuk pengurusan PBG/IMB	0.00	belum terdapat tindak lanjut TL 28 Maret 2024 Telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala BPBL Ambon kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon Nomor B.747/BPBLA/PL.220/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal permohonan penerbitan Izin Menerbitkan Bangunan (IMB) pada satker BPBL Ambon.	0.00	TUNTAS
Pertanggungjawaban Keuangan Belum Sesuai Ketentuan	01.1.9	11.	Kepala BPBL Ambon agar menginstruksikan secara tertulis kepada PPK dan PPSPM supaya cermat dalam menguji kebenaran materil dan keabsahan surat bukti hak tagih kepada negara	0.00	belum terdapat tindak lanjut TL 28 Maret 2024 Telah ditindaklanjuti dengan Surat Kepala BPBL Ambon kepada PPK dan PPSPM Nomor B.658/BPBLA/HP.510/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal instruksi supaya cermat dalam menguji kebenaran materil dan keabsahan bukti hak tagih kepada negara.	0.00	TUNTAS
Pertanggungjawaban Keuangan Belum Sesuai Ketentuan	01.1.9	12.	Kepala BPBL Ambon agar menginstruksikan secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran supaya menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp1.682.000,00 untuk disetor ke Kas Negara	1,682,000.00	belum terdapat tindak lanjut TL 28 Maret 2024 Telah ditindaklanjuti dengan: 1. Surat Nomor B.659/BPBLA/HP.510/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Kepala BPBL Ambon kepada Bendahara Pengeluaran perihal instruksi untuk menarik kelebihan pembayaran tagihan Speedy senilai Rp72.000,00 dan menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp1.610.000,00, untuk disetor ke Kas Negara; 2. Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor NTPN 3943d48VVEK54AF0 tanggal 25 Maret 2024 senilai Rp72.000,00; 3. Bukti Penerimaan Negara dengan Nomor NTPN 7219255DF96HHLKK tanggal 25 Maret 2024 senilai Rp1.610.000,00.	1,682,000.00	TUNTAS



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon

Sarwono, S.St.Pi.
NIP. 198308152005021001

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengendali Mutu/Supervisor



Ir. Nur Arif Azizi, M.M
NIP. 196008211986031004



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAM www.kkp.go.id

FORM-10

Nomor : 2983.08.07/ITJ/PL.420/VII/2024
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran : Lampiran 2. BATL LHP No. T.135/ITJ.3/HP.110/III/2024
Hal : Penentuan Status Tindak Lanjut

08 Juli 2024

Yth. Kepala Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

Dengan ini disampaikan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menentukan status tindak lanjut hasil pengawasan sebagai berikut:

NO	URAIAN	TEMUAN HASIL PENGAWASAN		
		JUMLAH		NILAI KEUANGAN
		KEJADIAN	SARAN	
A	Temuan			
	1. Awal	5	12	8,118,600
B	Tindak Lanjut			8,118,600
	1. Tuntas	5	12	8,118,600
	2. Proses	0	0	0
	3. Pending	0	0	0
	3. RTDD	0	0	0
C	Sisa Temuan			0
	1. Tuntas	0	0	0
	2. Proses	0	0	0
	3. Pending	0	0	0
	4. RTDD	0	0	0

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur III

Ir. WAHJUDI POERWANTO, M.Ak
NIP. 19670116 199703 1 002



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

Nomor : B.4621/DJPB.1/HP.620/VII/2024 11 Juli 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 2 berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" Triwulan II Tahun 2024

Yth. (daftar terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan II Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 31 Maret 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 30 Juni 2024 (Triwulan II Tahun 2024).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar 91,19% (tuntas 445 dari 488 rekomendasi).
3. Data capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.4621/DJPB.1/HP.620/VII/2024
Tanggal : 11 Juli 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA SURAT

1. Direktur Perbenihan
2. Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan
3. Direktur Pakan dan Obat Ikan
4. Plt. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya
5. Kepala BBPBL Lampung
6. Kepala BBPBAP Jepara
7. Kepala BPBAP Situbondo
8. Kepala BPBAP Ujung Batee
9. Kepala BPBAP Takalar
10. Kepala BPBAT Tatelu
11. Kepala BPBL Ambon
12. Kepala BPBL Batam
13. Kepala BLUPPB Karawang
14. Kepala BPIUUK Karangasem
15. Kepala BPKIL Serang
16. Plh. Kepala BBPBAT Sukabumi
17. Plt. Kepala BPBAT Sungai Gelam Jambi
18. Plt. Kepala BPBAT Mandiingin
19. Plt. Kepala BPBL Lombok

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.4621/DJPB.1/HP.620/VII/2024
Tanggal : 11 Juli 2024

Data Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP"
Triwulan II Tahun 2024

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	86,27%
2	Direktorat Perbenihan	100,00%
3	Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan	95,65%
4	Direktorat Pakan dan Obat Ikan	100,00%
5	Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya	100,00%
6	BBPBAT Sukabumi	100,00%
7	BBPBL Lampung	96,00%
8	BBPBAP Jepara	97,87%
9	BPBAP Situbondo	93,55%
10	BPBAP Ujung Batee	97,22%
11	BPBAP Takalar	100,00%
12	BPBAT Tatelu	100,00%
13	BPBAT Sungai Gelam	75,61%
14	BPBAT Mandiangin	100,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBL Lombok	72,00%
17	BPBL Batam	100,00%
18	BLUPPB Karawang	83,33%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Setditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gemi Triastutik

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 2161/SJ.2/KU.130/VII/2024

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa

Dari : Kepala Biro Keuangan

Hal : Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester I Tahun 2024

Tanggal : 10 Juli 2024

Sehubungan dengan telah ditetapkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Target nilai IKPA Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester I ditetapkan sebesar 83,00 dan Semester II Tahun 2024 sebesar 93,76 (nilai akhir).
2. Berdasarkan data aplikasi *OMSPAN* per tanggal 09 Juli 2024 pukul 10.00 WIB bahwa nilai IKPA KKP Semester I sebesar 91,20 dari target sebesar 83,00.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami sampaikan data capaian IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Kerja Eselon I), dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar capaian nilai IKU IKPA Semester I tahun 2024 pada masing-masing Satker.

Untuk meningkatkan capaian nilai IKPA Semester II tahun 2024, supaya Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;
2. Mengawal dan selalu melakukan pemantauan capaian nilai IKPA secara berkelanjutan setiap bulannya pada Satuan Kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Keuangan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap beberapa indikator IKPA;
4. Berkoordinasi dengan pihak internal KKP dan pihak eksternal yaitu KPPN,

Kanwil Ditjen Perbendaharaan, serta Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan apabila mengalami kendala terkait pelaksanaan capaian indikator IKPA dan pelaksanaan anggaran belanja tahun 2024.

Guna mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara *Smart*, Akuntabel, Integritas, Loyalitas, dan Sinergi (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Setyawati

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Staf Khusus Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan dan Program Prioritas Kementerian Kelautan Perikanan
3. Inspektur I, Inspektorat Jenderal
4. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.60	79.47	89.69	100.00	98.61	98.54	87.44	91.39	100%	0.00	91.39
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.96	11.92	17.94	10.00	9.86	9.85	21.86				
			Nilai Aspek	89.54		96.71				87.44				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	100.00	95.92	100.00	100.00	100.00	100.00	99.18	100%	0.00	99.18
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	15.00	19.18	10.00	10.00	10.00	25.00				
			Nilai Aspek	100.00		98.98				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.80	95.40	100.00	99.86	97.91	92.87	95.25	100%	0.00	95.25
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.17	19.08	10.00	9.99	9.79	23.22				
			Nilai Aspek	93.90		98.29				92.87				
3	03213	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	88.90	94.00	100.00	100.00	98.99	90.61	94.69	100%	0.00	94.69
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.34	18.80	10.00	10.00	9.90	22.65				
			Nilai Aspek	94.45		98.25				90.61				
4	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	87.49	86.29	100.00	94.02	98.42	88.20	91.68	100%	0.00	91.68
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.12	17.26	10.00	9.40	9.84	22.05				
			Nilai Aspek	93.75		94.68				88.20				
5	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	98.61	87.80	86.43	100.00	98.97	98.99	83.53	91.00	100%	0.00	91.00
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.86	13.17	17.29	10.00	9.90	9.90	20.88				
			Nilai Aspek	93.21		96.10				83.53				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.22	72.83	87.74	100.00	100.00	97.45	89.37	90.48	100%	0.00	90.48
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.92	10.92	17.55	10.00	10.00	9.75	22.34				
			Nilai Aspek	86.03		96.30				89.37				
7	03207	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Nilai	98.84	86.02	82.19	100.00	100.00	98.17	79.69	88.96	100%	0.00	88.96
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.88	12.90	16.44	10.00	10.00	9.82	19.92				
			Nilai Aspek	92.43		95.09				79.69				
8	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	58.84	94.33	100.00	100.00	100.00	84.30	88.77	100%	0.00	88.77
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	8.83	18.87	10.00	10.00	10.00	21.08				
			Nilai Aspek	79.42		98.58				84.30				
9	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.59	81.03	100.00	100.00	99.45	83.09	88.71	100%	0.00	88.71
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	11.79	16.21	10.00	10.00	9.95	20.77				
			Nilai Aspek	89.30		95.12				83.09				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
3	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
4	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.50	100.00	99.95	100%	0.00	99.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

5	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	100.00	99.12	100.00	100.00	100.00	100.00	99.82	100%	0.00	99.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.82	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.78				100.00				
6	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	100.00	99.05	100.00	100.00	100.00	100.00	99.81	100%	0.00	99.81
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.81	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.76				100.00				
7	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	Nilai	100.00	100.00	98.98	100.00	100.00	100.00	100.00	99.80	100%	0.00	99.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.80	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.75				100.00				
8	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	Nilai	100.00	100.00	98.71	100.00	100.00	100.00	100.00	99.74	100%	0.00	99.74
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.74	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.68				100.00				
9	043	032	649657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100.00	100.00	99.05	0.00	0.00	99.50	100.00	79.76	80%	0.00	99.70
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.81	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.27				100.00				
10	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.53	100.00	99.65	100%	0.00	99.65
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.65	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.13				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

11	053	032	649771	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI	Nilai	100.00	100.00	97.98	100.00	100.00	100.00	100.00	99.60	100%	0.00	99.60
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.60	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.50				100.00				
12	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	100.00	98.66	100.00	100.00	97.53	100.00	99.48	100%	0.00	99.48
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.73	10.00	10.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.05				100.00				
13	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	Nilai	100.00	100.00	97.32	100.00	100.00	100.00	100.00	99.46	100%	0.00	99.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.46	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.33				100.00				
14	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	97.11	100.00	100.00	100.00	100.00	99.42	100%	0.00	99.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.42	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.28				100.00				
15	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Nilai	100.00	100.00	96.72	100.00	100.00	99.61	100.00	99.31	100%	0.00	99.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.34	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.08				100.00				
16	123	032	649684	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II	Nilai	100.00	100.00	96.43	100.00	100.00	100.00	100.00	99.29	100%	0.00	99.29
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.29	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.11				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

17	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	Nilai	100.00	100.00	96.42	100.00	100.00	100.00	100.00	99.28	100%	0.00	99.28
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.28	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.11				100.00				
18	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	100.00	98.84	100.00	100.00	95.06	100.00	99.27	100%	0.00	99.27
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.77	10.00	10.00	9.51	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.48				100.00				
19	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	96.96	100.00	100.00	98.40	100.00	99.23	100%	0.00	99.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.39	10.00	10.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.84				100.00				
20	001	032	649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	100.00	97.01	0.00	0.00	99.52	100.00	79.35	80%	0.00	99.19
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.40	0.00	0.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.27				100.00				
21	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	95.88	100.00	100.00	100.00	100.00	99.18	100%	0.00	99.18
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.18	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.97				100.00				
22	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	100.00	95.88	100.00	100.00	100.00	100.00	99.18	100%	0.00	99.18
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.18	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.97				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

23	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	Nilai	100.00	100.00	95.28	100.00	100.00	100.00	100.00	99.06	100%	0.00	99.06
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.06	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.82				100.00				
24	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100.00	100.00	95.99	100.00	100.00	98.89	99.57	98.98	100%	0.00	98.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.20	10.00	10.00	9.89	24.89				
					Nilai Aspek	100.00		98.72				99.57				
25	136	032	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	100.00	94.65	100.00	100.00	100.00	100.00	98.93	100%	0.00	98.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.93	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.66				100.00				
26	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	100.00	95.02	100.00	100.00	98.95	100.00	98.90	100%	0.00	98.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.00	10.00	10.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.49				100.00				
27	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	Nilai	100.00	100.00	95.30	100.00	100.00	98.32	100.00	98.89	100%	0.00	98.89
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.06	10.00	10.00	9.83	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.40				100.00				
28	123	032	427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	Nilai	100.00	93.99	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	79.10	80%	0.00	98.87
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.10	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

29	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	Nilai	100.00	100.00	94.85	100.00	100.00	98.99	100.00	98.87	100%	0.00	98.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.97	10.00	10.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.46				100.00				
30	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	93.52	100.00	100.00	100.00	100.00	98.70	100%	0.00	98.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.70	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.38				100.00				
31	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	Nilai	100.00	100.00	93.38	100.00	100.00	100.00	100.00	98.68	100%	0.00	98.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.68	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.35				100.00				
32	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Nilai	100.00	100.00	98.70	100.00	100.00	88.83	100.00	98.62	100%	0.00	98.62
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.74	10.00	10.00	8.88	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.88				100.00				
33	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	Nilai	100.00	93.56	97.72	100.00	100.00	100.00	100.00	98.58	100%	0.00	98.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.03	19.54	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.78		99.43				100.00				
34	050	032	649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	93.34	97.54	100.00	100.00	100.00	100.00	98.51	100%	0.00	98.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.00	19.51	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.67		99.39				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

35	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	100.00	93.76	0.00	0.00	100.00	100.00	78.75	80%	0.00	98.44
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.75	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.88				100.00				
36	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	Nilai	100.00	94.09	96.58	100.00	100.00	100.00	100.00	98.43	100%	0.00	98.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	19.32	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.05		99.15				100.00				
37	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	Nilai	100.00	94.09	99.10	100.00	100.00	94.27	100.00	98.36	100%	0.00	98.36
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	19.82	10.00	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	97.05		98.34				100.00				
38	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	Nilai	100.00	100.00	96.54	100.00	100.00	99.79	95.92	98.27	100%	0.00	98.27
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.31	10.00	10.00	9.98	23.98				
					Nilai Aspek	100.00		99.08				95.92				
39	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	Nilai	100.00	100.00	96.57	100.00	100.00	89.12	100.00	98.23	100%	0.00	98.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.31	10.00	10.00	8.91	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.42				100.00				
40	071	032	649814	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA	Nilai	100.00	93.36	97.91	0.00	0.00	100.00	100.00	78.59	80%	0.00	98.23
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.00	19.58	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.68		98.96				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

41	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	100.00	91.43	0.00	100.00	100.00	100.00	88.29	90%	0.00	98.10
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.29	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.14				100.00				
42	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nilai	100.00	87.11	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.07	100%	0.00	98.07
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.07	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.56		100.00				100.00				
43	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	92.24	96.02	100.00	100.00	99.34	100.00	97.97	100%	0.00	97.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.84	19.20	10.00	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	96.12		98.84				100.00				
44	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	92.40	98.83	100.00	100.00	93.42	100.00	97.97	100%	0.00	97.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.86	19.77	10.00	10.00	9.34	25.00				
					Nilai Aspek	96.20		98.06				100.00				
45	045	032	649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	91.15	96.32	100.00	100.00	100.00	100.00	97.94	100%	0.00	97.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.67	19.26	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.58		99.08				100.00				
46	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Nilai	100.00	92.99	94.86	100.00	100.00	100.00	100.00	97.92	100%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.95	18.97	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.50		98.72				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

47	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	Nilai	100.00	93.80	94.24	100.00	100.00	99.63	100.00	97.88	100%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.07	18.85	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	96.90		98.47				100.00				
48	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	Nilai	100.00	92.55	94.92	100.00	100.00	100.00	100.00	97.87	100%	0.00	97.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.88	18.98	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.28		98.73				100.00				
49	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	85.65	100.01	100.00	100.00	100.00	100.00	97.85	100%	0.00	97.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.85	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.83		100.00				100.00				
50	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	89.17	100.00	100.00	99.83	100.00	97.82	100%	0.00	97.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	17.83	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.25				100.00				
51	134	032	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	100.00	91.73	100.00	100.00	94.71	100.00	97.82	100%	0.00	97.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.35	10.00	10.00	9.47	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.61				100.00				
52	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	92.94	100.00	100.00	91.45	100.00	97.73	100%	0.00	97.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.59	10.00	10.00	9.15	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.10				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

53	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	94.59	0.00	0.00	92.50	100.00	78.17	80%	0.00	97.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.92	0.00	0.00	9.25	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		93.54				100.00				
54	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	84.72	99.86	100.00	100.00	100.00	100.00	97.68	100%	0.00	97.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.71	19.97	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.36		99.97				100.00				
55	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	84.77	99.64	100.00	100.00	100.00	100.00	97.64	100%	0.00	97.64
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.72	19.93	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.39		99.91				100.00				
56	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	Nilai	100.00	92.61	93.53	100.00	100.00	100.00	100.00	97.60	100%	0.00	97.60
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.89	18.71	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.31		98.38				100.00				
57	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	88.52	97.04	100.00	100.00	99.04	100.00	97.59	100%	0.00	97.59
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.28	19.41	10.00	10.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	94.26		99.02				100.00				
58	015	032	649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	89.90	96.72	100.00	100.00	99.58	99.01	97.54	100%	0.00	97.54
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.49	19.34	10.00	10.00	9.96	24.75				
					Nilai Aspek	94.95		99.08				99.01				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

59	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	Nilai	100.00	92.53	93.56	100.00	100.00	99.50	100.00	97.54	100%	0.00	97.54
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.88	18.71	10.00	10.00	9.95	25.00				
					Nilai Aspek	96.27		98.27				100.00				
60	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	100.00	94.02	98.45	100.00	100.00	100.00	94.97	97.54	100%	0.00	97.54
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.10	19.69	10.00	10.00	10.00	23.74				
					Nilai Aspek	97.01		99.61				94.97				
61	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	Nilai	100.00	94.58	91.24	100.00	100.00	100.00	100.00	97.44	100%	0.00	97.44
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	18.25	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.29		97.81				100.00				
62	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	Nilai	100.00	86.46	97.12	100.00	100.00	100.00	100.00	97.39	100%	0.00	97.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.97	19.42	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.23		99.28				100.00				
63	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	94.20	91.12	100.00	100.00	100.00	100.00	97.35	100%	0.00	97.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	18.22	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.10		97.78				100.00				
64	061	032	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	87.33	96.63	100.00	100.00	99.24	100.00	97.35	100%	0.00	97.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.10	19.33	10.00	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	93.67		98.97				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

65	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	Nilai	100.00	88.01	95.19	100.00	100.00	100.00	100.00	97.24	100%	0.00	97.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.20	19.04	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.01		98.80				100.00				
66	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	100.00	86.11	100.00	100.00	100.00	100.00	97.22	100%	0.00	97.22
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	17.22	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.53				100.00				
67	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	Nilai	100.00	81.12	99.98	100.00	100.00	100.00	100.00	97.16	100%	0.00	97.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.17	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.56		100.00				100.00				
68	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	Nilai	100.00	92.13	93.26	100.00	100.00	97.81	99.25	97.07	100%	0.00	97.07
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.82	18.65	10.00	10.00	9.78	24.81				
					Nilai Aspek	96.07		97.77				99.25				
69	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	83.18	97.80	100.00	100.00	99.65	100.00	97.00	100%	0.00	97.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.48	19.56	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	91.59		99.36				100.00				
70	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	100.00	92.92	0.00	0.00	89.38	100.00	77.52	80%	0.00	96.90
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.58	0.00	0.00	8.94	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		91.15				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

71	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	Nilai	100.00	79.15	99.93	100.00	100.00	99.80	99.92	96.82	100%	0.00	96.82
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.87	19.99	10.00	10.00	9.98	24.98				
					Nilai Aspek	89.58		99.93				99.92				
72	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	93.90	91.99	100.00	100.00	91.86	99.94	96.65	100%	0.00	96.65
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.09	18.40	10.00	10.00	9.19	24.99				
					Nilai Aspek	96.95		95.96				99.94				
73	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	91.01	99.51	98.67	100.00	100.00	92.78	96.61	100%	0.00	96.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.65	19.90	9.87	10.00	10.00	23.19				
					Nilai Aspek	95.51		99.55				92.78				
74	068	032	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nilai	100.00	90.69	93.74	0.00	0.00	99.15	100.00	77.27	80%	0.00	96.58
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.60	18.75	0.00	0.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	95.35		96.45				100.00				
75	063	032	567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	90.83	93.10	0.00	0.00	100.00	100.00	77.24	80%	0.00	96.56
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.62	18.62	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.42		96.55				100.00				
76	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	Nilai	100.00	89.85	90.27	100.00	100.00	100.00	100.00	96.53	100%	0.00	96.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.48	18.05	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.93		97.57				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

77	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	Nilai	100.00	85.89	93.34	100.00	100.00	99.00	100.00	96.45	100%	0.00	96.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.88	18.67	10.00	10.00	9.90	25.00				
					Nilai Aspek	92.95		98.09				100.00				
78	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	Nilai	100.00	92.60	89.54	100.00	0.00	99.71	100.00	86.77	90%	0.00	96.41
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.89	17.91	10.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	96.30		96.42				100.00				
79	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	Nilai	100.00	100.00	94.50	100.00	100.00	100.00	89.94	96.39	100%	0.00	96.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.90	10.00	10.00	10.00	22.49				
					Nilai Aspek	100.00		98.63				89.94				
80	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	94.97	86.04	100.00	100.00	100.00	99.62	96.36	100%	0.00	96.36
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.25	17.21	10.00	10.00	10.00	24.90				
					Nilai Aspek	97.49		96.51				99.62				
81	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	81.04	95.26	100.00	100.00	100.00	99.98	96.20	100%	0.00	96.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.16	19.05	10.00	10.00	10.00	24.99				
					Nilai Aspek	90.52		98.82				99.98				
82	178	032	340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	100.00	86.06	0.00	0.00	98.67	99.30	76.90	80%	0.00	96.13
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	17.21	0.00	0.00	9.87	24.83				
					Nilai Aspek	100.00		92.37				99.30				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

83	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	86.97	91.30	100.00	100.00	98.34	99.86	96.10	100%	0.00	96.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.05	18.26	10.00	10.00	9.83	24.97				
					Nilai Aspek	93.49		97.41				99.86				
84	062	032	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	Nilai	100.00	92.94	92.53	0.00	0.00	100.00	97.65	76.86	80%	0.00	96.07
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.94	18.51	0.00	0.00	10.00	24.41				
					Nilai Aspek	96.47		96.27				97.65				
85	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	Nilai	100.00	89.69	95.32	100.00	100.00	99.56	94.24	96.03	100%	0.00	96.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.45	19.06	10.00	10.00	9.96	23.56				
					Nilai Aspek	94.85		98.72				94.24				
86	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	Nilai	100.00	88.24	88.53	100.00	100.00	100.00	100.00	95.94	100%	0.00	95.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.24	17.71	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.12		97.13				100.00				
87	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Nilai	100.00	87.95	92.12	100.00	100.00	93.12	100.00	95.93	100%	0.00	95.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	18.42	10.00	10.00	9.31	25.00				
					Nilai Aspek	93.98		96.31				100.00				
88	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Nilai	100.00	93.03	84.41	100.00	100.00	100.00	100.00	95.84	100%	0.00	95.84
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.95	16.88	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.52		96.10				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

89	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	Nilai	100.00	93.44	84.35	100.00	100.00	100.00	99.57	95.78	100%	0.00	95.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	16.87	10.00	10.00	10.00	24.89				
					Nilai Aspek	96.72		96.09				99.57				
90	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Nilai	100.00	85.12	99.91	100.00	100.00	96.49	93.34	95.73	100%	0.00	95.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.77	19.98	10.00	10.00	9.65	23.33				
					Nilai Aspek	92.56		99.10				93.34				
91	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	Nilai	100.00	87.89	96.78	100.00	100.00	86.90	97.96	95.72	100%	0.00	95.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.18	19.36	10.00	10.00	8.69	24.49				
					Nilai Aspek	93.95		95.92				97.96				
92	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	88.20	87.51	100.00	100.00	99.31	100.00	95.66	100%	0.00	95.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.23	17.50	10.00	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	94.10		96.70				100.00				
93	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	100.00	88.47	100.00	100.00	96.37	93.21	95.63	100%	0.00	95.63
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	17.69	10.00	10.00	9.64	23.30				
					Nilai Aspek	100.00		96.21				93.21				
94	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	Nilai	100.00	71.07	99.46	100.00	100.00	99.76	100.00	95.53	100%	0.00	95.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.66	19.89	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	85.54		99.80				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

95	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	90.61	96.68	100.00	100.00	99.60	90.36	95.48	100%	0.00	95.48
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.59	19.34	10.00	10.00	9.96	22.59				
					Nilai Aspek	95.31		99.07				90.36				
96	022	032	645693	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG	Nilai	100.00	80.31	99.21	100.00	100.00	90.31	98.17	95.46	100%	0.00	95.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.05	19.84	10.00	10.00	9.03	24.54				
					Nilai Aspek	90.16		97.38				98.17				
97	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	95.33	0.00	0.00	99.49	88.77	76.21	80%	0.00	95.26
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.07	0.00	0.00	9.95	22.19				
					Nilai Aspek	100.00		97.41				88.77				
98	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	Nilai	100.00	88.96	85.06	100.00	100.00	97.99	100.00	95.16	100%	0.00	95.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.34	17.01	10.00	10.00	9.80	25.00				
					Nilai Aspek	94.48		95.76				100.00				
99	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	93.19	88.48	100.00	100.00	82.92	100.00	94.97	100%	0.00	94.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.98	17.70	10.00	10.00	8.29	25.00				
					Nilai Aspek	96.60		92.85				100.00				
100	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	87.79	95.14	100.00	100.00	97.99	91.80	94.95	100%	0.00	94.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.17	19.03	10.00	10.00	9.80	22.95				
					Nilai Aspek	93.90		98.28				91.80				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

101	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	Nilai	100.00	94.23	83.16	100.00	100.00	91.57	100.00	94.92	100%	0.00	94.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	16.63	10.00	10.00	9.16	25.00				
					Nilai Aspek	97.12		93.68				100.00				
102	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	Nilai	100.00	87.05	91.81	100.00	100.00	100.00	93.13	94.70	100%	0.00	94.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.06	18.36	10.00	10.00	10.00	23.28				
					Nilai Aspek	93.53		97.95				93.13				
103	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	Nilai	100.00	89.34	98.46	100.00	100.00	100.00	86.41	94.69	100%	0.00	94.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.40	19.69	10.00	10.00	10.00	21.60				
					Nilai Aspek	94.67		99.62				86.41				
104	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	Nilai	100.00	74.91	91.39	100.00	100.00	0.00	100.00	66.24	70%	0.00	94.62
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.24	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.46		100.00				100.00				
105	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	73.38	93.67	100.00	100.00	98.21	100.00	94.56	100%	0.00	94.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.01	18.73	10.00	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	86.69		97.97				100.00				
106	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	100.00	88.26	85.87	100.00	100.00	91.62	99.69	94.50	100%	0.00	94.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.24	17.17	10.00	10.00	9.16	24.92				
					Nilai Aspek	94.13		94.37				99.69				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

107	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBİ (AK KP WAKATOBİ)	Nilai	100.00	92.18	78.35	100.00	100.00	100.00	100.00	94.50	100%	0.00	94.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.83	15.67	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.09		94.59				100.00				
108	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	100.00	94.59	100.00	100.00	100.00	82.33	94.50	100%	0.00	94.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.92	10.00	10.00	10.00	20.58				
					Nilai Aspek	100.00		98.65				82.33				
109	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	85.03	84.34	98.00	100.00	100.00	100.00	94.42	100%	0.00	94.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.75	16.87	9.80	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.52		95.59				100.00				
110	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100.00	74.87	95.73	0.00	0.00	99.70	100.00	75.35	80%	0.00	94.18
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.23	19.15	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	87.44		97.72				100.00				
111	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	92.69	88.29	100.00	100.00	100.00	90.26	94.13	100%	0.00	94.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.90	17.66	10.00	10.00	10.00	22.56				
					Nilai Aspek	96.35		97.07				90.26				
112	178	032	645691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	76.69	92.69	0.00	0.00	99.18	100.00	74.96	80%	0.00	93.70
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.50	18.54	0.00	0.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	88.35		95.94				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

113	167	032	649568	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ENTIKONG	Nilai	100.00	92.77	97.80	0.00	0.00	100.00	85.92	74.95	80%	0.00	93.69
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	19.56	0.00	0.00	10.00	21.48				
					Nilai Aspek	96.39		98.90				85.92				
114	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	Nilai	100.00	83.11	93.33	100.00	100.00	0.00	92.42	84.24	90%	0.00	93.60
					Bobot	10	15	20	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.47	18.67	10.00	10.00	0.00	23.10				
					Nilai Aspek	91.56		97.78				92.42				
115	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	Nilai	100.00	78.55	99.04	100.00	100.00	70.07	99.09	93.37	100%	0.00	93.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.78	19.81	10.00	10.00	7.01	24.77				
					Nilai Aspek	89.28		92.28				99.09				
116	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	61.14	96.39	100.00	100.00	99.16	100.00	93.36	100%	0.00	93.36
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.17	19.28	10.00	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	80.57		98.89				100.00				
117	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	100.00	96.52	0.00	0.00	99.86	81.42	74.65	80%	0.00	93.31
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.30	0.00	0.00	9.99	20.36				
					Nilai Aspek	100.00		98.19				81.42				
118	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	70.25	89.21	100.00	100.00	98.91	99.98	93.27	100%	0.00	93.27
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.54	17.84	10.00	10.00	9.89	24.99				
					Nilai Aspek	85.13		97.03				99.98				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

119	103	032	649792	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAU- BAU	Nilai	100.00	72.44	92.32	100.00	100.00	99.48	95.88	93.25	100%	0.00	93.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.87	18.46	10.00	10.00	9.95	23.97				
					Nilai Aspek	86.22		97.95				95.88				
120	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	84.51	94.67	100.00	100.00	100.00	85.86	93.08	100%	0.00	93.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.68	18.93	10.00	10.00	10.00	21.47				
					Nilai Aspek	92.26		98.67				85.86				
121	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	79.84	80.68	100.00	100.00	99.24	100.00	93.04	100%	0.00	93.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.98	16.14	10.00	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	89.92		94.98				100.00				
122	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	67.14	92.64	100.00	100.00	94.12	100.00	93.01	100%	0.00	93.01
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.07	18.53	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	83.57		96.69				100.00				
123	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	69.77	94.56	100.00	100.00	94.02	96.11	92.81	100%	0.00	92.81
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.47	18.91	10.00	10.00	9.40	24.03				
					Nilai Aspek	84.89		97.14				96.11				
124	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	83.27	93.62	0.00	0.00	100.00	91.68	74.14	80%	0.00	92.67
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.49	18.72	0.00	0.00	10.00	22.92				
					Nilai Aspek	91.64		96.81				91.68				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

125	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	77.69	87.22	0.00	0.00	100.00	100.00	74.10	80%	0.00	92.62
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.65	17.44	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.85		93.61				100.00				
126	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	Nilai	100.00	86.91	93.73	100.00	100.00	92.43	86.08	92.55	100%	0.00	92.55
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	18.75	10.00	10.00	9.24	21.52				
					Nilai Aspek	93.46		96.54				86.08				
127	127	032	427520	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I	Nilai	100.00	75.61	97.77	100.00	100.00	100.00	86.11	92.42	100%	0.00	92.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.34	19.55	10.00	10.00	10.00	21.53				
					Nilai Aspek	87.81		99.44				86.11				
128	037	032	427624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	Nilai	100.00	91.86	93.94	100.00	100.00	100.00	77.24	91.88	100%	0.00	91.88
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.78	18.79	10.00	10.00	10.00	19.31				
					Nilai Aspek	95.93		98.49				77.24				
129	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	Nilai	100.00	86.33	96.43	100.00	100.00	100.00	77.01	91.49	100%	0.00	91.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.95	19.29	10.00	10.00	10.00	19.25				
					Nilai Aspek	93.17		99.11				77.01				
130	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	67.39	89.89	100.00	100.00	98.62	92.39	91.05	100%	0.00	91.05
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.11	17.98	10.00	10.00	9.86	23.10				
					Nilai Aspek	83.70		97.13				92.39				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

131	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	70.11	88.95	100.00	100.00	95.22	92.17	90.87	100%	0.00	90.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.52	17.79	10.00	10.00	9.52	23.04				
					Nilai Aspek	85.06		96.04				92.17				
132	095	032	029172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	82.76	87.41	0.00	0.00	100.00	89.86	72.36	80%	0.00	90.45
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.41	17.48	0.00	0.00	10.00	22.46				
					Nilai Aspek	91.38		93.71				89.86				
133	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Nilai	50.00	88.81	89.22	100.00	100.00	91.76	100.00	90.34	100%	0.00	90.34
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	5.00	13.32	17.84	10.00	10.00	9.18	25.00				
					Nilai Aspek	69.41		95.24				100.00				
134	038	032	239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	78.85	86.91	0.00	0.00	100.00	91.67	72.13	80%	0.00	90.16
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.83	17.38	0.00	0.00	10.00	22.92				
					Nilai Aspek	89.43		93.46				91.67				
135	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	Nilai	100.00	86.95	87.40	100.00	100.00	44.51	100.00	89.97	100%	0.00	89.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.04	17.48	10.00	10.00	4.45	25.00				
					Nilai Aspek	93.48		82.98				100.00				
136	014	032	567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	Nilai	100.00	76.57	93.78	0.00	0.00	98.43	87.11	71.86	80%	0.00	89.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.49	18.76	0.00	0.00	9.84	21.78				
					Nilai Aspek	88.29		96.11				87.11				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

137	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	78.45	92.01	0.00	0.00	100.00	85.86	71.63	80%	0.00	89.54
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.77	18.40	0.00	0.00	10.00	21.47				
					Nilai Aspek	89.23		96.01				85.86				
138	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	Nilai	100.00	61.98	91.47	100.00	100.00	100.00	87.43	89.45	100%	0.00	89.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.30	18.29	10.00	10.00	10.00	21.86				
					Nilai Aspek	80.99		97.87				87.43				
139	061	032	219030	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	62.50	70%	0.00	89.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		0.00				100.00				
140	008	032	690933	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	100.00	61.80	0.00	0.00	0.00	100.00	62.36	70%	0.00	89.09
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	12.36	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
141	017	032	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	Nilai	100.00	60.98	96.48	100.00	100.00	100.00	80.37	88.54	100%	0.00	88.54
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.15	19.30	10.00	10.00	10.00	20.09				
					Nilai Aspek	80.49		99.12				80.37				
142	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	Nilai	100.00	80.62	89.09	98.00	100.00	76.59	84.45	88.48	100%	0.00	88.48
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.09	17.82	9.80	10.00	7.66	21.11				
					Nilai Aspek	90.31		90.92				84.45				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

143	076	032	649746	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN	Nilai	100.00	75.64	91.84	0.00	0.00	100.00	84.14	70.75	80%	0.00	88.44
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.35	18.37	0.00	0.00	10.00	21.03				
					Nilai Aspek	87.82		95.92				84.14				
144	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	Nilai	50.00	87.93	87.07	100.00	98.94	98.30	92.32	88.41	100%	0.00	88.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	5.00	13.19	17.41	10.00	9.89	9.83	23.08				
					Nilai Aspek	68.97		96.08				92.32				
145	015	032	309039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	73.99	77.66	0.00	0.00	0.00	100.00	61.63	70%	0.00	88.04
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.10	15.53	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.00		0.00				100.00				
146	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	83.18	80.98	100.00	100.00	88.89	81.47	87.93	100%	0.00	87.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.48	16.20	10.00	10.00	8.89	20.37				
					Nilai Aspek	91.59		92.47				81.47				
147	009	032	690955	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	93.49	56.43	0.00	0.00	100.00	100.00	70.31	80%	0.00	87.89
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	11.29	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.75		78.22				100.00				
148	030	032	049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	70.00	80%	0.00	87.50
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		75.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

149	134	032	039017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	70.00	80%	0.00	87.50
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		75.00				100.00				
150	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	100.00	28.75	90.50	100.00	100.00	97.89	100.00	87.20	100%	0.00	87.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.31	18.10	10.00	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	64.38		97.10				100.00				
151	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	67.10	93.37	100.00	100.00	95.33	73.98	86.77	100%	0.00	86.77
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.07	18.67	10.00	10.00	9.53	18.50				
					Nilai Aspek	83.55		97.18				73.98				
152	050	032	319098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	62.22	81.63	0.00	0.00	0.00	100.00	60.66	70%	0.00	86.66
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.33	16.33	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.11		0.00				100.00				
153	063	032	259038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	89.54	61.16	0.00	0.00	0.00	100.00	60.66	70%	0.00	86.66
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.43	12.23	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.77		0.00				100.00				
154	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	58.48	69.25	100.00	100.00	96.37	97.07	86.53	100%	0.00	86.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.77	13.85	10.00	10.00	9.64	24.27				
					Nilai Aspek	79.24		91.41				97.07				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

155	009	032	649640	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNG PINANG	Nilai	100.00	100.00	93.38	0.00	0.00	100.00	61.34	69.01	80%	0.00	86.26
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.68	0.00	0.00	10.00	15.33				
					Nilai Aspek	100.00		96.69				61.34				
156	009	032	329087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	100.00	93.31	0.00	0.00	100.00	61.06	68.93	80%	0.00	86.16
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.66	0.00	0.00	10.00	15.26				
					Nilai Aspek	100.00		96.66				61.06				
157	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	Nilai	100.00	71.43	94.23	100.00	100.00	81.74	72.78	85.93	100%	0.00	85.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.71	18.85	10.00	10.00	8.17	18.19				
					Nilai Aspek	85.72		93.99				72.78				
158	083	032	649800	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA	Nilai	100.00	76.08	97.36	0.00	100.00	86.13	71.00	77.25	90%	0.00	85.83
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.41	19.47	0.00	10.00	8.61	17.75				
					Nilai Aspek	88.04		94.50				71.00				
159	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	Nilai	100.00	79.38	81.41	100.00	0.00	99.91	76.28	77.25	90%	0.00	85.83
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.91	16.28	10.00	0.00	9.99	19.07				
					Nilai Aspek	89.69		93.77				76.28				
160	051	032	690987	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

161	012	032	690979	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
162	030	032	690928	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
163	134	032	691010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
164	042	032	691020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
165	012	032	691017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	70%	0.00	85.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
166	135	032	649788	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA II	Nilai	100.00	77.55	90.12	0.00	0.00	99.47	75.50	68.48	80%	0.00	85.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.63	18.02	0.00	0.00	9.95	18.88				
					Nilai Aspek	88.78		94.80				75.50				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

167	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	76.88	88.82	100.00	100.00	94.22	66.67	85.38	100%	0.00	85.38
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.53	17.76	10.00	10.00	9.42	16.67				
					Nilai Aspek	88.44		95.76				66.67				
168	039	032	249086	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	75.87	59.26	0.00	0.00	100.00	100.00	68.23	80%	0.00	85.29
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.38	11.85	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.94		79.63				100.00				
169	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	82.14	78.50	100.00	76.54	96.90	79.37	85.21	100%	0.00	85.21
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.32	15.70	10.00	7.65	9.69	19.84				
					Nilai Aspek	91.07		87.99				79.37				
170	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	67.55	88.63	100.00	100.00	100.00	69.38	85.20	100%	0.00	85.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.13	17.73	10.00	10.00	10.00	17.35				
					Nilai Aspek	83.78		97.16				69.38				
171	048	032	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	Nilai	100.00	62.86	93.78	0.00	0.00	99.68	78.98	67.90	80%	0.00	84.87
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.43	18.76	0.00	0.00	9.97	19.74				
					Nilai Aspek	81.43		96.73				78.98				
172	039	032	249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	70.52	68.21	0.00	0.00	98.19	95.09	67.81	80%	0.00	84.76
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.58	13.64	0.00	0.00	9.82	23.77				
					Nilai Aspek	85.26		83.20				95.09				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

173	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	85.69	87.97	0.00	0.00	92.82	69.93	67.21	80%	0.00	84.02
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.85	17.59	0.00	0.00	9.28	17.48				
					Nilai Aspek	92.85		90.40				69.93				
174	134	032	039163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	50.00	63.63	100.00	0.00	100.00	100.00	75.23	90%	0.00	83.58
					Bobot	10	15	20	10	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	12.73	10.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		87.88				100.00				
175	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	Nilai	100.00	70.12	73.96	100.00	100.00	100.00	71.37	83.15	100%	0.00	83.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.52	14.79	10.00	10.00	10.00	17.84				
					Nilai Aspek	85.06		93.49				71.37				
176	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Nilai	50.00	72.11	75.55	100.00	100.00	100.00	88.88	83.15	100%	0.00	83.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	5.00	10.82	15.11	10.00	10.00	10.00	22.22				
					Nilai Aspek	61.06		93.89				88.88				
177	123	032	079136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	42.09	74.21	0.00	0.00	100.00	100.00	66.16	80%	0.00	82.69
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.31	14.84	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	71.05		87.11				100.00				
178	063	032	691070	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	77.92	62.38	0.00	0.00	0.00	94.17	57.71	70%	0.00	82.44
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.69	12.48	0.00	0.00	0.00	23.54				
					Nilai Aspek	88.96		0.00				94.17				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

179	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	Nilai	100.00	83.33	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	57.50	70%	0.00	82.14
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.67		0.00				100.00				
180	061	032	690990	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	33.33	78.16	0.00	0.00	100.00	100.00	65.63	80%	0.00	82.04
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.00	15.63	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.67		89.08				100.00				
181	178	032	691078	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	78.34	56.35	100.00	0.00	0.00	90.00	65.52	80%	0.00	81.90
					Bobot	10	15	20	10	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.75	11.27	10.00	0.00	0.00	22.50				
					Nilai Aspek	89.17		78.18				90.00				
182	185	032	691079	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	100.00	73.27	0.00	0.00	0.00	70.00	57.15	70%	0.00	81.65
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	14.65	0.00	0.00	0.00	17.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				70.00				
183	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	80.65	92.50	0.00	0.00	88.76	63.09	65.25	80%	0.00	81.56
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.10	18.50	0.00	0.00	8.88	15.77				
					Nilai Aspek	90.33		90.63				63.09				
184	061	032	219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	47.16	72.56	0.00	0.00	100.00	93.88	65.05	80%	0.00	81.32
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.07	14.51	0.00	0.00	10.00	23.47				
					Nilai Aspek	73.58		86.28				93.88				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

185	049	032	179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	42.47	87.94	0.00	0.00	99.76	81.63	64.34	80%	0.00	80.43
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.37	17.59	0.00	0.00	9.98	20.41				
					Nilai Aspek	71.24		93.85				81.63				
186	012	032	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	83.33	50.00	0.00	0.00	0.00	93.02	55.75	70%	0.00	79.65
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.50	10.00	0.00	0.00	0.00	23.26				
					Nilai Aspek	91.67		0.00				93.02				
187	042	032	690982	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	82.50	55.63	70%	0.00	79.46
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.63				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				82.50				
188	008	032	691054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	66.67	57.83	0.00	0.00	0.00	94.14	55.10	70%	0.00	78.72
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	11.57	0.00	0.00	0.00	23.54				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				94.14				
189	062	032	691072	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
190	051	032	189036	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

191	037	032	229111	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
192	039	032	249170	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
193	009	032	329088	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
194	134	032	690927	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
195	012	032	690934	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
196	037	032	690946	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

197	039	032	690948	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
198	030	032	049098	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
199	123	032	079137	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
200	039	032	691069	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
201	051	032	691063	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
202	123	032	691052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

203	009	032	691038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
204	020	032	690952	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
205	123	032	690976	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
206	037	032	690991	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
207	039	032	690993	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
208	020	032	690997	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

209	123	032	691014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
210	037	032	691029	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
211	039	032	691031	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
212	020	032	691035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	55.00	70%	0.00	78.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				100.00				
213	063	032	690949	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	6.61	83.91	0.00	0.00	100.00	100.00	62.77	80%	0.00	78.47
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.99	16.78	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	53.31		91.96				100.00				
214	185	032	690958	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	21.73	83.09	0.00	0.00	0.00	100.00	54.88	70%	0.00	78.40
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.26	16.62	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	60.87		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

215	012	032	691055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	82.32	55.54	0.00	0.00	100.00	76.67	62.62	80%	0.00	78.28
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.35	11.11	0.00	0.00	10.00	19.17				
					Nilai Aspek	91.16		77.77				76.67				
216	061	032	691066	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	52.76	59.19	0.00	0.00	0.00	100.00	54.75	70%	0.00	78.22
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.91	11.84	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	76.38		0.00				100.00				
217	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	59.92	88.73	0.00	0.00	0.00	80.17	39.03	50%	0.00	78.06
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	20.04				
					Nilai Aspek	79.96		0.00				80.17				
218	051	032	189143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	53.67	61.93	0.00	0.00	0.00	95.98	54.43	70%	0.00	77.76
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.05	12.39	0.00	0.00	0.00	23.99				
					Nilai Aspek	76.84		0.00				95.98				
219	061	032	690945	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	20.10	79.79	0.00	0.00	0.00	100.00	53.97	70%	0.00	77.10
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.02	15.96	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	60.05		0.00				100.00				
220	038	032	239067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	69.90	60.16	0.00	0.00	100.00	76.05	61.53	80%	0.00	76.91
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.49	12.03	0.00	0.00	10.00	19.01				
					Nilai Aspek	84.95		80.08				76.05				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

221	046	032	169124	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	26.42	73.32	0.00	0.00	100.00	87.39	60.48	80%	0.00	75.59
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.96	14.66	0.00	0.00	10.00	21.85				
					Nilai Aspek	63.21		86.66				87.39				
222	001	032	069145	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	16.67	76.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.70	70%	0.00	75.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.50	15.20	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	58.34		0.00				100.00				
223	017	032	129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	70.66	68.42	0.00	0.00	100.00	63.64	60.19	80%	0.00	75.24
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.60	13.68	0.00	0.00	10.00	15.91				
					Nilai Aspek	85.33		84.21				63.64				
224	015	032	309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		0.00				100.00				
225	037	032	229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		0.00				100.00				
226	062	032	289028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	52.50	70%	0.00	75.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	75.00		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

227	020	032	691073	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	78.78	58.20	0.00	0.00	100.00	65.27	59.78	80%	0.00	74.72
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.82	11.64	0.00	0.00	10.00	16.32				
					Nilai Aspek	89.39		79.10				65.27				
228	030	032	049033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	85.83	61.02	0.00	0.00	96.72	58.00	59.25	80%	0.00	74.06
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.87	12.20	0.00	0.00	9.67	14.50				
					Nilai Aspek	92.92		78.87				58.00				
229	016	032	269120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	53.77	81.00	0.00	0.00	98.46	60.29	59.18	80%	0.00	73.98
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.07	16.20	0.00	0.00	9.85	15.07				
					Nilai Aspek	76.89		89.73				60.29				
230	134	032	690972	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	86.88	51.72	70%	0.00	73.88
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	21.72				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				86.88				
231	136	032	199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	38.16	69.98	0.00	0.00	100.00	77.18	59.02	80%	0.00	73.77
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.72	14.00	0.00	0.00	10.00	19.30				
					Nilai Aspek	69.08		84.99				77.18				
232	038	032	691068	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	67.23	63.80	0.00	0.00	100.00	64.17	58.89	80%	0.00	73.61
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.08	12.76	0.00	0.00	10.00	16.04				
					Nilai Aspek	83.62		81.90				64.17				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

233	062	032	289112	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	16.67	56.68	0.00	0.00	100.00	100.00	58.84	80%	0.00	73.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.50	11.34	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	58.34		78.34				100.00				
234	045	032	159118	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	46.45	59.54	0.00	0.00	100.00	79.60	58.77	80%	0.00	73.47
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.97	11.91	0.00	0.00	10.00	19.90				
					Nilai Aspek	73.23		79.77				79.60				
235	061	032	219099	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	25.98	65.81	0.00	0.00	100.00	86.00	58.56	80%	0.00	73.20
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.90	13.16	0.00	0.00	10.00	21.50				
					Nilai Aspek	62.99		82.91				86.00				
236	020	032	299391	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	52.38	57.08	0.00	0.00	100.00	73.62	57.68	80%	0.00	72.10
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.86	11.42	0.00	0.00	10.00	18.40				
					Nilai Aspek	76.19		78.54				73.62				
237	175	032	019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	16.67	50.00	0.00	0.00	100.00	100.00	57.50	80%	0.00	71.88
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.50	10.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	58.34		75.00				100.00				
238	008	032	690978	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	33.33	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	70%	0.00	71.43
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.67		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

239	178	032	691002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	33.33	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	70%	0.00	71.43
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	66.67		0.00				100.00				
240	134	032	691048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	73.34	52.30	0.00	0.00	100.00	61.94	56.95	80%	0.00	71.18
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.00	10.46	0.00	0.00	10.00	15.49				
					Nilai Aspek	86.67		76.15				61.94				
241	050	032	691075	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	5.20	51.43	0.00	0.00	100.00	100.00	56.07	80%	0.00	70.08
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.78	10.29	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	52.60		75.72				100.00				
242	037	032	691067	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	74.49	48.62	70%	0.00	69.46
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	18.62				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				74.49				
243	038	032	690947	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	11.67	56.71	0.00	0.00	0.00	100.00	48.09	70%	0.00	68.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.75	11.34	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	55.84		0.00				100.00				
244	014	032	119038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	16.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	47.50	70%	0.00	67.86
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	58.34		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

245	014	032	119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	16.67	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	47.50	70%	0.00	67.86
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	58.34		0.00				100.00				
246	015	032	690998	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	0.00	62.03	0.00	0.00	0.00	100.00	47.41	70%	0.00	67.72
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
247	001	032	069146	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	0.00	56.86	0.00	0.00	0.00	100.00	46.37	70%	0.00	66.25
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
248	060	032	691065	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	23.68	66.20	0.00	0.00	100.00	62.70	52.47	80%	0.00	65.58
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	3.55	13.24	0.00	0.00	10.00	15.67				
					Nilai Aspek	61.84		83.10				62.70				
249	060	032	209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	Nilai	100.00	36.07	60.11	0.00	0.00	100.00	59.34	52.27	80%	0.00	65.34
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.41	12.02	0.00	0.00	10.00	14.84				
					Nilai Aspek	68.04		80.06				59.34				
250	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	81.53	82.25	100.00	75.00	83.64	0.00	64.54	100%	0.00	64.54
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.23	16.45	10.00	7.50	8.36	0.00				
					Nilai Aspek	90.77		85.22				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

251	012	032	109132	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
252	014	032	119142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
253	045	032	159119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
254	136	032	199138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
255	038	032	239139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
256	062	032	289113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

257	015	032	309171	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
258	178	032	340151	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
259	014	032	691056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
260	008	032	099326	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
261	095	032	690926	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
262	001	032	690930	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

263	123	032	690931	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
264	014	032	690935	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
265	042	032	690937	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
266	045	032	690939	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
267	049	032	690941	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
268	051	032	690942	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

269	062	032	690951	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
270	015	032	690953	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
271	178	032	690957	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
272	030	032	690973	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
273	001	032	690975	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
274	014	032	690980	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

275	045	032	690984	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
276	038	032	690992	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
277	063	032	690994	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
278	062	032	690996	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
279	009	032	691000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
280	175	032	691008	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

281	030	032	691011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
282	001	032	691013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
283	008	032	691016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
284	014	032	691018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
285	045	032	691022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
286	046	032	691023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

287	051	032	691025	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
288	136	032	691026	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
289	060	032	691027	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
290	061	032	691028	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
291	038	032	691030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGERA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
292	016	032	691033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

293	062	032	691034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
294	015	032	691036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
295	050	032	691037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
296	178	032	691040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
297	185	032	691041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
298	068	032	691045	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

299	175	032	691046	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
300	095	032	691047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.00	70%	0.00	64.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				100.00				
301	134	032	039164	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	39.90	44.97	70%	0.00	64.25
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	9.97				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				39.90				
302	095	032	029090	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	16.67	50.00	0.00	0.00	0.00	88.33	44.58	70%	0.00	63.69
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00	22.08				
					Nilai Aspek	58.34		0.00				88.33				
303	065	032	330094	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	58.00	44.50	70%	0.00	63.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	14.50				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				58.00				
304	065	032	691077	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	97.67	44.42	70%	0.00	63.45
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	24.42				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				97.67				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

305	045	032	691060	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	94.12	43.53	70%	0.00	62.19
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	23.53				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				94.12				
306	185	032	632335	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	31.75	65.90	0.00	0.00	0.00	61.82	43.40	70%	0.00	61.99
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.76	13.18	0.00	0.00	0.00	15.45				
					Nilai Aspek	65.88		0.00				61.82				
307	030	032	691049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	89.73	42.43	70%	0.00	60.62
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	22.43				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				89.73				
308	010	032	089004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	16.67	50.00	0.00	0.00	0.00	79.00	42.25	70%	0.00	60.36
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00	19.75				
					Nilai Aspek	58.34		0.00				79.00				
309	065	032	339096	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	16.67	50.00	0.00	0.00	0.00	76.70	41.68	70%	0.00	59.54
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00	19.18				
					Nilai Aspek	58.34		0.00				76.70				
310	049	032	691024	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	82.50	40.63	70%	0.00	58.04
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.63				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				82.50				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

311	016	032	691071	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	4.07	57.47	0.00	0.00	100.00	57.09	46.38	80%	0.00	57.97
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.61	11.49	0.00	0.00	10.00	14.27				
					Nilai Aspek	52.04		78.74				57.09				
312	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	Nilai	100.00	83.33	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	40.00	70%	0.00	57.14
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	91.67		0.00				30.00				
313	049	032	690986	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	74.46	38.61	70%	0.00	55.16
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	18.61				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				74.46				
314	063	032	259107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	16.67	50.00	0.00	0.00	0.00	62.58	38.15	70%	0.00	54.49
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00	15.64				
					Nilai Aspek	58.34		0.00				62.58				
315	017	032	129124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	37.50	70%	0.00	53.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				30.00				
316	175	032	690970	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	70.00	37.50	70%	0.00	53.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	17.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				70.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

317	017	032	691019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	37.50	70%	0.00	53.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				30.00				
318	017	032	690936	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	37.50	70%	0.00	53.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				30.00				
319	043	032	691021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	70.00	37.50	70%	0.00	53.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	17.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				70.00				
320	017	032	690981	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	66.67	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	37.50	70%	0.00	53.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	83.34		0.00				30.00				
321	042	032	139138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	38.91	37.23	70%	0.00	53.18
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	9.73				
					Nilai Aspek	75.00		0.00				38.91				
322	060	032	690989	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	68.50	37.13	70%	0.00	53.04
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	17.13				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				68.50				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

323	065	032	691001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	66.75	36.69	70%	0.00	52.41
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	16.69				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				66.75				
324	046	032	169034	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.49	35.12	70%	0.00	50.18
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.62				
					Nilai Aspek	75.00		0.00				30.49				
325	017	032	129034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	35.00	70%	0.00	50.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.50	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	75.00		0.00				30.00				
326	135	032	059190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	16.67	50.00	0.00	0.00	0.00	47.50	34.38	70%	0.00	49.11
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00	11.88				
					Nilai Aspek	58.34		0.00				47.50				
327	043	032	149124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	16.67	50.00	0.00	0.00	0.00	44.00	33.50	70%	0.00	47.86
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00	11.00				
					Nilai Aspek	58.34		0.00				44.00				
328	016	032	690995	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	47.50	31.88	70%	0.00	45.54
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	11.88				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				47.50				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

329	049	032	179114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	44.00	31.00	70%	0.00	44.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	11.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				44.00				
330	020	032	299396	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	41.67	30.42	70%	0.00	43.45
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.42				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				41.67				
331	001	032	691051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Nilai	100.00	7.40	51.94	0.00	0.00	0.00	35.00	30.25	70%	0.00	43.21
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	1.11	10.39	0.00	0.00	0.00	8.75				
					Nilai Aspek	53.70		0.00				35.00				
332	009	032	691076	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	40.82	30.21	70%	0.00	43.15
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.21				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				40.82				
333	060	032	209118	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	35.45	28.86	70%	0.00	41.23
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.86				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				35.45				
334	015	032	691074	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	33.00	28.25	70%	0.00	40.36
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	8.25				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				33.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

335	175	032	690925	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.14	27.54	70%	0.00	39.34
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.54				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.14				
336	136	032	691064	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
337	051	032	189144	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
338	016	032	269121	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
339	010	032	690932	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
340	043	032	690938	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

341	046	032	690940	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
342	136	032	690943	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
343	060	032	690944	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
344	016	032	690950	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
345	010	032	690977	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
346	185	032	691003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

347	010	032	691053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
348	017	032	691057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
349	042	032	691058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
350	043	032	691059	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
351	049	032	691062	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
352	175	032	019063	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

353	010	032	089144	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.50	70%	0.00	39.29
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				30.00				
354	095	032	691009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	33.33	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	70%	0.00	35.71
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	66.67		0.00				0.00				
355	010	032	089143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	16.67	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	70%	0.00	32.14
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	58.34		0.00				0.00				
356	095	032	029173	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
357	046	032	691061	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
358	042	032	139139	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

359	043	032	149125	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
360	046	032	169125	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
361	063	032	259108	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
362	050	032	319099	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
363	065	032	339097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
364	048	032	418192	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

365	135	032	690929	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
366	050	032	690954	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
367	065	032	690956	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
368	095	032	690971	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
369	135	032	690974	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
370	043	032	690983	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

371	046	032	690985	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
372	136	032	690988	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
373	050	032	690999	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
374	135	032	691012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
375	010	032	691015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
376	063	032	691032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

377	065	032	691039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
378	066	032	691042	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
379	113	032	691043	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
380	085	032	691044	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
381	135	032	691050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				
382	135	032	059191	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	70%	0.00	28.57
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	100.00		0.00				0.00				

MSLK5201-M1.pdf

Kinerjaku

- Ropeg Warehouse

Indikator Pelaksanaan Anggaran

spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiKPASatker/indikatorKinerja

SMART | KEMENKEU

e-ZI

e-SAKIP REVIU

2023 - Aplikasi Pela...

Login & Portal

Home

E-Pegawai

Perikanan - Pencaria...

eKinerja 2022

Search - Medcom.id

Direktorat Jenderal...

MONEVPA

haichat

BALAI BUDIDAYA ...
T.A. 2024

EXCEL

PDF

FILTER

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | JUNI

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	91.01	99.51	98.67	100.00	100.00	92.78	96.61	100%	0.00	96.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.65	19.90	9.87	10.00	10.00	23.19				
					Nilai Aspek	95.51		99.55				92.78				

Type here to search

26°C Hujan ringan

4:09 PM 7/4/2024



DATA DUKUNG

Triwulan II_2024

**RASIO JUMLAH PEMBERITAAN NETRAL
DAN POSITIF TERHADAP TOTAL
PEMBERITAAN TENTANG SUB-SEKTOR
PERIKANAN BUDIDAYA**

Disusun Oleh:

Tim Kinerja

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

LAPORAN CAPAIAN RASIO JUMLAH PEMBERITAAN NETRAL DAN POSITIF TERHADAP TOTAL PEMBERITAAN TENTANG SUB-SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TRIWULAN II TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Secara umum komunikasi adalah proses pemindahan berita atau pesan dari seorang ke penerima dengan tujuan untuk mengubah perilaku atau keputusan si penerima pesan. Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama dengan berbagai media untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk pemberitaan program – program kebijakan perikanan budidaya telah menyusun publikasi dalam bentuk rilis media dan konten infografis dengan mengangkat pemberitaan keberhasilan program perikanan budidaya di masyarakat.

Penyebaran informasi sector perikanan budidaya yang selama ini dilaksanakan adalah bentuk dokumentasi dan peliputan kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Tim Komisi IV DPR RI serta stakeholder lainnya. Kegiatan ini dilakukan di berbagai lokasi perikanan budidaya maupun Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB dalam rangka mensosialisasikan program prioritas perikanan budidaya.

Selain pemberitaan yang berasal dari internal Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, pengumpulan pemberitaan sub sector perikanan budidaya juga diperoleh dari informasi atau berita media online yang memuat berita sub sector perikanan budidaya secara umum sehingga informasi yang diperoleh dapat dijadikan bahan inputan bagi peningkatan kualitas pemberitaan perikanan budidaya dalam mendukung kemajuan program kebijakan sector perikanan dan kelautan.

II. DESKRIPSI TONE BERITA

Media Relations menurut Dian Wardhani (2008:1) adalah aktivitas komunikasi public relations/humas untuk menjalin hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian pengertian serta dukungan dalam bentuk publikasi organisasi yang maksimal dan balance (berimbang). Adapun pendapat Lesly dalam Yosol (2011:29) mengatakan media relations sangat berhubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Dengan itu sebuah instansi harus memiliki hubungan media relations yang baik agar mendapat pemberitaan yang baik untuk instansinya.

Perkembangan media massa yang sangat pesat ini mempengaruhi kegiatan media relations yang dijalankan oleh instansi pemerintahan maupun swasta. Adapun kegiatan yang dilakukan Public Relations Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan antara lain mengamati perkembangan media, target sasaran, dan isu – isu yang berkembang di masyarakat agar dapat menentukan strategi media relations yang tepat untuk organisasinya.

Menurut standar analisis humas pada media tradisional yang dikeluarkan Institute for Public Relations (2012) Tone berita adalah penilaian yang dilakukan setelah membaca keseluruhan artikel (Eisenmann, 2012). Menurut Stacks (2006), tone mengukur apa yang dirasakan oleh target audiens tentang individu, perusahaan, produk atau topik, setelah membaca/melihat/mendengar berita di media massa. Tone biasanya terbagi atas positif, netral/balanced, dan negatif. Berikut indikator penentuan sebuah tone (Eisenmann, 2012):

Tabel 1. Deskripsi Tone Berita

No.	Tone Pemberitaan	Deskripsi
1.	Positif	Peliputan media membuat pembaca mendukung, merekomendasikan, dan/atau bersedia bekerjasama dengan perusahaan/brand
2.	Netral	Peliputan media tidak mengandung sentimen tertentu, hanya melaporkan fakta yang ada. Dalam pemberitaan yang negatif, sebuah artikel bisa saja netral jika hanya menyuguhkan fakta tanpa ada komentar editorial. Jika perusahaan/brand berada dalam kondisi yang tidak baik, paling tidak perusahaan/brand berupaya mendapatkan peliputan yang netral.
3.	Negatif	Peliputan media membuat pembaca tidak mau mendukung dan bekerjasama dengan perusahaan/brand.
4.	Balanced (Berimbang)	Hasil dari tone secara keseluruhan adalah berimbang.

III. RASIO JUMLAH PEMBERITAAN YANG NETRAL DAN POSITIF DIBANDING TOTAL PEMBERITAAN TENTANG SUB-SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA TRIWULAN II 2024

1. Publikasi yang dilakukan bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kehumasan yang dilakukan oleh Bagian Program, Data dan Informasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon agar mampu berperan sebagai media pemberi informasi terhadap kebijakan maupun keberhasilan BPBL Ambon kepada masyarakat pembudidaya;
2. Capaian keberhasilan pencapaian ini didorong oleh gencarnya publikasi kegiatan BPBL Ambon yang bernilai positif dengan dilakukan penyebaran konten informasi teknis maupun kegiatan prioritas yang di upload pada kanal media BPBL

Ambon sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh terwujudnya pemberitaan positif sub sector perikanan budidaya di masyarakat;

3. Pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan tentang perikanan budidaya yang dimuat di media massa baik lokal maupun nasional;
4. Realisasi rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor Perikanan Budidaya Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar 100 % dimana pemberitaan sub sector perikanan budidaya yang berhasil dikumpulkan memiliki tendensi isu positif.
5. Keberhasilan capaian ini menunjukkan semakin membaiknya pemberitaan perikanan budidaya di berbagai media baik cetak maupun online.

IV. JUMLAH PEMBERITAAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN TONE NETRAL DAN POSITIF SELAMA BULAN APRIL 2024

No.	Sumber Isu	Tanggal	Pernyataan	Kecenderungan (Positif atau Negatif)	Narasumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	https://www.antaraneews.com/berita/4047972/bangli-ambil-sejumlah-langkah-atasi-ikan-predator-di-danau-batur	7 April 2024	Bupati Bangli, Bali, Sang Nyoman Sedana Arta memimpin langsung gerakan penanganan ikan predator Red Devil yang menjadi ancaman pada keanekaragaman hayati di Danau Batur, Kecamatan Kintamani. Ikan predator Red Devil ini sudah terdeteksi sejak tahun 2016. Ia mengatakan populasi tumbuh cukup pesat sehingga mengancam masyarakat setempat yang membudidayakan ikan mujair yang menjadi kuliner andalan pariwisata di Kintamani dan Kabupaten Bangli.	Positif	Pewart: Adi Lazuardi Editor: Risbiani Fardaniah
2	https://www.antaraneews.com/berita/4052139/akademisi-minta-setop-kriminalisasi-petambak-udang-karimun-jawa	9 April 2024	Kalangan akademisi dan praktisi bidang kelautan dan budi daya perikanan menyerukan agar menyetop kriminalisasi terhadap petambak udang Karimun Jawa karena dituding melakukan pencemaran air laut "Penanganan kasus pencemaran air laut dengan tersangka petambak udang Karimun	Positif	Pewart: Agus Wira Sukarta Editor: Guido Merung

			Jawa hendaknya dilakukan dengan metode ilmiah. Hal itu harus dilakukan demi menghindarkan para petambak dari tindakan kriminalisasi oleh aparaturnya," kata Manajer Produksi Tambak PT Kerta Arnawa Jaya Ir IBM Suastika MSI,		
3	https://www.antaranews.com/berita/4063575/kkp-komitmen-permudah-layanan-perizinan-usaha-perikanan	18 April 2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen memberikan pelayanan perizinan aktivitas usaha perikanan yang mudah bagi masyarakat. "Kita terus berkomitmen memberikan pelayanan prima untuk <i>stakeholders</i> . Perizinan semakin mudah dan tidak ribet," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Tb Haeru Rahayu	Positif	Pewarta: Sinta Ambarwati Editor: Faisal Yunianto
4	https://www.antaranews.com/berita/4068264/kkp-manfaatkan-sistem-ti-canggih-guna-pantau-pemanfaatan-kuota-bbl	22 April 2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyiapkan sistem informasi pemantauan elektronik untuk mengawal pemanfaatan kuota penangkapan benih bening lobster (BBL) oleh nelayan atau kelompok nelayan. Sistem ini memuat hulu-hilir pengelolaan pemanfaatan BBL. Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Tb. Haeru Rahayu mengatakan sistem tersebut berupa Sistem Informasi Pengelolaan	Positif	Pewarta: PR Wire Editor: PR Wire

			Lobster Kepiting dan Rajungan (SILOKER). Sistem terintegrasi ini dapat diakses pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga kelompok nelayan penangkap BBL.		
5	https://www.antaranews.com/berita/4068054/aruna-dorong-pengembangan-skill-berbasis-keberlanjutan	21 April 2024	Startup teknologi perikanan Aruna mendorong pengembangan <i>skill</i> sumber daya manusia (SDM) yang berbasis <i>sustainability</i> atau keberlanjutan termasuk pada para karyawannya melalui program sertifikasi kepemimpinan <i>sustainable development goals</i> (SDGs). Program sertifikasi tersebut yang diselenggarakan oleh SDG Academy Indonesia dan Tanoto Foundation serta didukung oleh UNDP Indonesia, Bappenas, Nippon Closure Co Japan, dan ICMG Japan.	Positif	Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah Editor: Indra Gultom
6	https://www.antaranews.com/berita/4071963/budi-daya-ikan-air-tawar-soroti-kearifan-pertanian-tradisional	24 April 2024	Dengan kolam-kolam ikan berusia lebih dari 30 abad di sepanjang sungai yang jernih, Desa Lingjiao di wilayah Xiuning, Provinsi Anhui, China timur, memiliki suasana pertanian yang khas. Kolam-kolam tersebut dibangun dengan bebatuan lokal dan menjadi rumah bagi lebih dari 100 ikan karper rumput dan ikan karper merah yang berenang dengan bebas.	Positif	Pewarta: Xinhua Editor: Santoso

			"Desa kami memiliki tradisi yang kaya dalam pembudidayaan ikan di sumber-sumber mata air alami yang tersebar di antara pegunungan. Suhu mata air pegunungan ini rendah, sehingga siklus perkembangbiakannya panjang dan ikannya tidak lembek serta lezat,"		
7	https://www.antaraneews.com/berita/4071633/rektor-unhas-permen-kp-7-2024-langkah-tepat-kelola-benur	23 April 2024	Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Jamaluddin Jompa mengatakan, keputusan memperbaharui kebijakan tata kelola benih bening lobster (BBL) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 7 Tahun 2024 sebagai langkah yang tepat untuk mengatasi maraknya penyelundupan BBL alias benur. "Pemerintah harus diapresiasi mengurai benang kusut ini dengan membuat aturan baru. Walau tidak sempurna, tapi ya namanya saja menuju kebaikan, di situ sudah ada perbaikan. Minimal bahwa daripada ini diselundupkan toh kita juga belum bisa maksimalkan pemanfaatannya maka ya diekspor ya enggak papa, ini kan bernilai devisa,"	Positif	Pewartu: Sinta Ambarwati Editor: Faisal Yunianto

8	https://www.antaraneews.com/berita/4075191/kkp-luncurkan-proyek-percontohan-tambak-udang-tradisional-plus	25 April 2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) berkolaborasi dengan eFishery dan UNIDO, meluncurkan proyek percontohan budi daya udang tradisional plus. Unit kepanjangan BPPSDM KP yakni Balai Riset Perikanan Budi daya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros, Sulawesi Selatan menyebut kegiatan percontohan budi daya udang tradisional plus dilakukan di instalasi tambak Silvofishery Marana, Maros yang telah ditetapkan sebagai Smart Fisheries Village (SFV) berbasis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dikembangkan BPPSDM KP melalui unit kerja BRPBAP3 Maros. Pengembangan tambak udang tradisional plus, lanjutnya, dinilai lebih berkelanjutan secara lingkungan karena tidak mengonversi lahan produktif, mampu mempertahankan area bakau, rendah jejak karbon, serta lebih ramah lingkungan.	Positif	Pewartu: Sinta Ambarwati Editor: Adi Lazuardi
---	---	---------------	--	---------	---

V. JUMLAH PEMBERITAAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN TONE NETRAL DAN POSITIF SELAMA BULAN MEI 2024

No.	Sumber Isu	Tanggal	Pernyataan	Kecenderungan (Positif atau Negatif)	Narasumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	https://www.antaraneews.com/berita/4085745/dekan-unpad-budi-daya-di-laut-jadi-masa-depan-perikanan-indonesia	2 Mei 2024	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Yudi Nurul Ihsan menilai, budi daya perikanan di laut mampu menjadi masa depan perikanan Indonesia, karenanya dibutuhkan dukungan berbagai pihak terkait upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program itu. "Ide Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saya kira perlu didukung tentang upaya untuk budi daya perikanan. Budi daya khususnya mariculture (budi daya di laut) bisa jadi masa depan perikanan,"	Positif	Pewartu: Sinta Ambarwati Editor: Biqwanto Situmorang
2	https://www.antaraneews.com/berita/4084665/purwakarta-perkuat-posisi-sebagai-daerah-penghasil-ikan-air-tawar	2 Mei 2024	Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jabar, memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah penghasil ikan air tawar di Provinsi Jawa Barat menyusul terbukanya peluang pasar ikan air tawar di tingkat nasional. "Kami terus mendorong peningkatan produksi budidaya perikanan air tawar.	Positif	Pewartu: M.Ali Khumaini Editor: Evi Ratnawati

			Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta Benni Irwan juga meminta agar posisi Purwakarta sebagai penghasil utama ikan air tawar di Jawa Barat terus diperkuat,"		
3	https://www.antaraneews.com/berita/4089618/kkp-kembangkan-jejaring-perbenihan-ikan-nila-nasional	5 Mei 2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan jejaring perbenihan ikan nasional ikan nila sebagai salah satu upaya meningkatkan produksi ikan nila Indonesia pada 2024. “Untuk bisa mencapai target produksi ikan nila nasional 2024, salah satunya diupayakan dengan terus membangun jejaring bisnis dan distribusi induk dan benih berkualitas,” ungkap Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu proyek percontohan (<i>modeling</i>) budi daya ikan nila salin berbasis kawasan dengan luasan 80 hektare telah siap beroperasi di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang, Jawa Barat yang dibangun di lahan bekas tambak udang yang sudah tidak produktif berbasis darat (<i>land based</i>) bukan danau (<i>lake based</i>).	Positif	Pewartanya: Sinta Ambarwati Editor: Ahmad Buchori
4	https://www.antaraneews.com/berita/4086972/pemkab-ajak-pelajar-budidayakan-rumput-laut-bekal-usaha-di-masa-depan	3 Mei 2024	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, mengajak pelajar setempat melakukan budidaya rumput laut	Positif	Pewartanya: Mario Sofia Nasution

			yang bertujuan sebagai bekal usaha dan keahlian yang mereka miliki untuk masa depan. "Kami mengedukasi pengembangan rumput laut yang diikuti 25 peserta didik dari Jurusan Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut (APAPL)," kata Pendamping Teknis Suku Dinas (Sudin) KPKP Kepulauan Seribu, Fauzi Rahman Pulau Tidung yang cocok menggunakan metode patok dasar. Setelah rumput laut berhasil ditanam selanjutnya perawatan, tahapan ini yang menentukan banyaknya hasilnya panen.		Editor: Sri Muryono
5	https://www.antaraneews.com/berita/4086468/lab-oratorium-rumput-laut-wakatobi-bantu-penuhi-ketersediaan-bibit	3 Mei 2024	Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Haliana menyebut bahwa laboratorium bibit rumput laut dapat membantu memenuhi ketersediaan bibit bagi para petani rumput laut di daerah tersebut. Bupati Haliana saat ditemui di Wakatobi, Kamis (2/5), mengatakan bahwa permasalahan ketersediaan bibit rumput laut itu kini bisa diatasi dengan fasilitas laboratorium yang diberikan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan RI	Netral	Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra Editor: Indra Gultom

			untuk pengembangan budidaya rumput laut di Kabupaten Wakatobi.		
6	https://www.antaraneews.com/berita/4090773/kkp-buka-peluang-kerja-sama-budi-daya-lobster-dengan-negara-lain	6 Mei 2024	Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Tugas Media dan Komunikasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Doni Ismanto mengungkapkan, Indonesia melalui KKP membuka kesempatan luas bagi negara lain untuk menjalin kerja sama budi daya benih bening lobster (BBL) dengan syarat membawa dana serta teknologi. Sementara bila investor asing datang membawa dana dan teknologi untuk budi daya BBL, maka Indonesia tak hanya mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi melainkan juga sisi pengembangan SDM dan teknologi budi daya BBL dalam negeri yang kian maju.	Positif	Pewarta: Sinta Ambarwati Editor: Ahmad Buchori
7	https://www.antaraneews.com/berita/4092705/kkp-sulap-tambak-udang-jadi-modeling-budi-daya-nila-salin	7 Mei 2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) membuat terobosan dengan mengubah lahan bekas tambak udang tak terpakai menjadi modeling budi daya ikan nila salin seluas 80 hektare. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tambak udang tersebut sudah terbengkalai sejak	Positif	Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia Editor: Ahmad Buchori

			1998. Aset negara yang tidak berfungsi ini, kembali dihidupkan untuk lokasi budi daya ikan nila salin yang telah dibangun sejak 2023.		
8	https://www.antaraneews.com/berita/4092528/peliti-ugm-paparkan-hasil-riset-kekayaan-biota-air-tawar-kaltim	7 Mei 2024	Peneliti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta memaparkan hasil riset kekayaan keanekaragaman hayati biota air tawar di perairan sungai Kelay Berau dan Danau Muara Siran Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. “Kami menemukan jenis ikan dengan nama lokal atuk sembelung -<i>Pangio alternans</i>-, ikan endemik Kalimantan yang berstatus terancam punah -<i>Endangered</i>- di Sungai Kelay Kabupaten Berau,” kata Dosen Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Donan Satria Yudha pada Sosialisasi Hasil Penelitian Potensi Keanekaragaman Hayati Biota Perairan di Muara Siran dan Sungai Kelay di Samarinda,	Positif	Pewartanya: Ahmad Rifandi Editor: M. Tohamaksun
9	https://www.antaraneews.com/berita/4094241/kalteng-bantu-peralatan-pokmaswas-dukung-pelestarian-perikanan	8 Mei 2024	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan bantuan berupa berbagai alat kelengkapan pengawasan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Kabupaten Pulang Pisau	Positif	Pewartanya: Muhammad Arif Hidayat Editor: Bambang Sutopo Hadi

			sebagai upaya mendukung pelestarian sumber daya perikanan. "Bantuan ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendukung upaya pengawasan dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng Darliansjah di Palangka Raya		
--	--	--	--	--	--

VI. JUMLAH PEMBERITAAN PERIKANAN BUDIDAYA DENGAN TONE NETRAL DAN POSITIF SELAMA BULAN JUNI 2024

No.	Sumber Isu	Tanggal	Pernyataan	Kecenderungan (Positif atau Negatif)	Narasumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	https://www.antaranews.com/berita/4134939/kkp-dukung-pendederan-tiram-mutiara-lewat-balai	3 Juni 2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung kegiatan pendederan tiram mutiara untuk meningkatkan produksi mutiara lewat balai-balai yang dimiliki di beberapa lokasi. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu lewat keterangan yang diterima di Jakarta, mengatakan Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIU2K) Karangasem dan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Positif	Pewartu: Sinta Ambarwati Editor: Adi Lazuardi

			bersinergi dengan tempat-tempat penetasan (<i>hatchery</i>) tiram mutiara baik milik pemerintah maupun swasta untuk terus meningkatkan kegiatan pemuliaan induk tiram mutiara hingga produksi induk dan benih tiram mutiara berkualitas.		
2	https://www.antaranews.com/berita/4133556/menteri-kkp-lima-tahun-ke-depan-penangkapan-ikan-diganti-budidaya	3 Juni 2024	Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, dalam lima hingga 10 tahun ke depan, Indonesia harus menerapkan konsep ekonomi biru dengan mengurangi jumlah penangkapan ikan dan diganti dengan budidaya. "Pembangunan ekonomi biru khususnya di sektor perikanan Indonesia arahnya ke mana, dalam lima atau 10 tahun yang datang itu penangkapan harus menurun, tapi budidaya yang harus meningkat," "Sekarang tradisional itu harus kita tinggalkan, karena budidaya di sektor perikanan juga itu, kita masih sangat lemah. Selain caranya masih tradisional, kita juga enggak punya standar <i>best practice</i>,"	Positif	Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia Editor: Evi Ratnawati
3	https://www.antaranews.com/berita/4133340/menteri-kkp-menu-ikan-pada-program-makan-gratis-harus-tematik	2 Juni 2024	Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan pemberian ikan pada menu program makan gratis harus disesuaikan dengan wilayahnya.	Positif	Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia

			Trenggono menyebutkan beberapa wilayah di Indonesia memiliki komoditas ikan unggulan sebagai potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mensuplai ikan sebagai salah satu menuanya.		Editor: M. Hari Atmoko
4	https://www.antaraneews.com/berita/4136676/kkp-lakukan-pendampingan-budi-daya-teripang-di-tual-maluku	4 Juni 2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong pembudidayaan teripang dengan menetapkan Kota Tual, Maluku Tenggara sebagai satu-satunya Kampung Perikanan Budidaya Teripang di Indonesia hingga memberikan fasilitas kepada kelompok nelayan. Keterlibatan KKP dalam budi daya teripang berupa pendampingan terhadap masyarakat pesisir Desa Taar, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, serta penyediaan sarana prasarana mulai dari alat transportasi hingga waring.	Positif	Pewart: Maria Cicilia Galuh Prayudhia Editor: Faisal Yunianto
5	https://www.antaraneews.com/berita/4139886/kkp-indonesia-negara-eksportir-ikan-hias-kedua-terbesar-di-dunia	6 Juni 2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan Indonesia saat ini menjadi negara eksportir ikan hias terbesar kedua di dunia setelah Jepang. “Ikan hias Indonesia saat ini sebagai negara eksportir itu menempati ranking kedua dunia setelah Jepang, jadi ini adalah satu capaian mungkin tiga sampai empat tahun yang lalu	Positif	Pewart: Sinta Ambarwati Editor: Faisal Yunianto

			kita masih di lima besar kemudian secara konsisten naik tahun kemarin kita sudah mencapai kedua,” ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo		
6	https://www.antaranews.com/berita/4141956/kkp-tegaskan-miliki-sejumlah-program-untuk-dukung-kelestarian-laut	7 Juni 2024	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan, memiliki sejumlah program yang dicanangkan guna menjaga kelestarian laut termasuk sumber daya perikanan yang terkandung di dalamnya. "Sesuai dengan kebijakan ekonomi biru yang diinisiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ditjen PKRL melaksanakan tiga dari lima program prioritas yaitu perluasan kawasan konservasi laut," Program tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati laut seperti lamun, mangrove, dan terumbu karang sehingga memberikan manfaat dalam meningkatkan kadar serapan karbon yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim serta menjaga aset ekosistem laut.	Positif	Pewarta: Sinta Ambarwati Editor: Faisal Yunianto
7	https://www.antaranews.com/berita/4141374/kalteng-catatkan-produksi-perikanan-budidaya-136-ribu-ton-pada-2023	7 Juni 2024	Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mampu memacu produksi perikanan budi daya terus tumbuh setiap tahun, hingga	Positif	Pewarta: Muhammad Arif Hidayat

			pada 2023 hasilnya mencapai sebanyak 136.164,09 ton. "Apabila dilakukan analisa kenaikan produksi setiap tahun, terjadi kenaikan rata-rata per tahun sebesar 7,63 persen," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng Darliansjah Peningkatan produksi perikanan budi daya di Kalteng, tak lepas dari dukungan program dan kegiatan pemerintah provinsi terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan, baik melalui bantuan sarana prasarana, serta dukungan lainnya.		Editor: Nusarina Yuliasuti
--	--	--	--	--	-----------------------------------

VII. PENUTUP

A. Simpulan

1. Capaian adalah rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif total pemberitaan tentang perikanan budidaya;
2. Rasio jumlah pemberitaan positif tentang perikanan budidaya di media online, pada triwulan II tahun 2024 adalah 100% dimana semua pemberitaan terkait sub sector perikanan budidaya yang berhasil dikumpulkan bernilai tone positif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian presentase jumlah pemberitaan positif tentang perikanan budidaya triwulan II, telah diperoleh capaian maksimal, Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas pemberitaan sebagai upaya peningkatan publikasi terkait program prioritas perikanan budidaya;
2. Meningkatkan frekuensi pemberitaan perikanan budidaya baik mencakup teknis maupun non teknis pada berbagai kanal media yang dimiliki sehingga penyebaran informasi dapat dilakukan secara intens dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan fungsi koordinasi dengan berbagai pihak (media) baik local maupun nasional guna membantu meningkatkan sebaran informasi sub sector perikanan budidaya.

Ambon, 8 Juli 2024

Mengetahui,
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

